

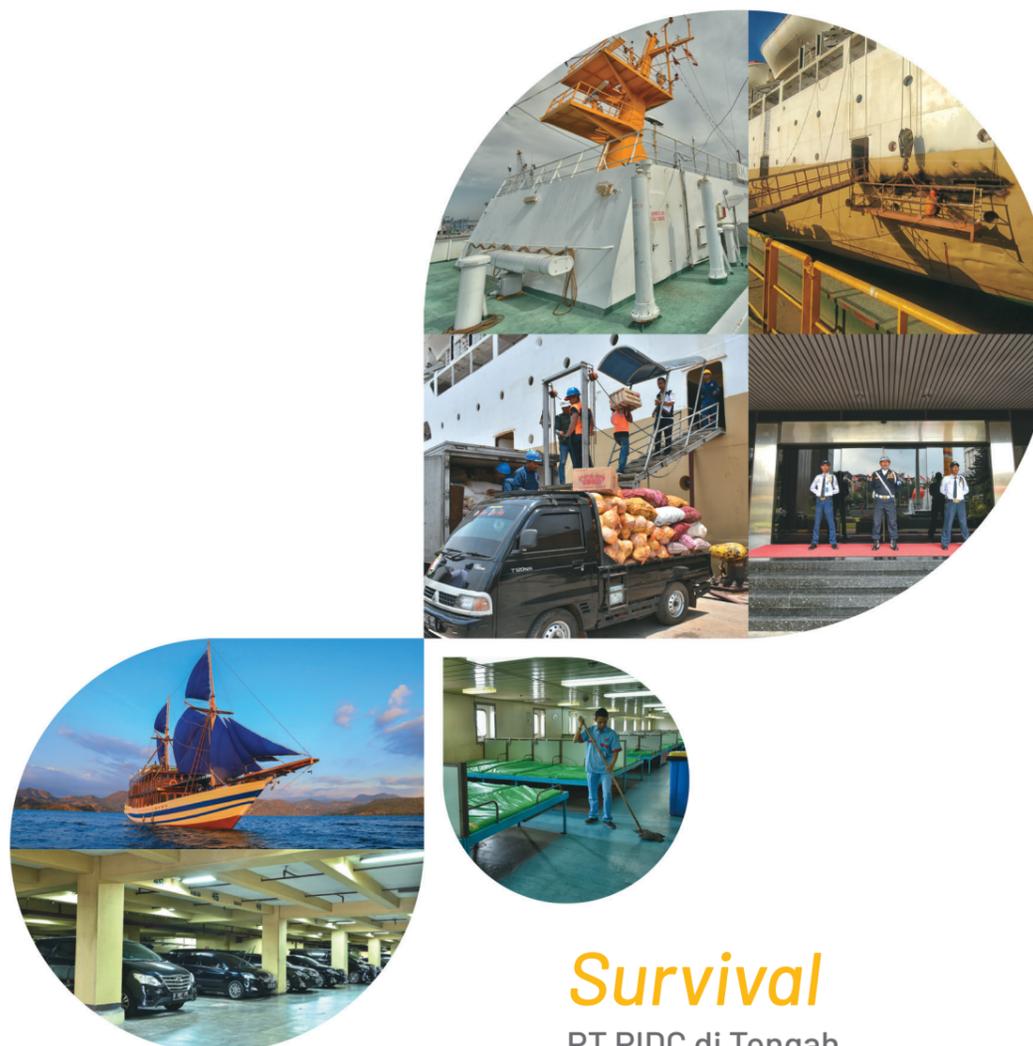


Survival

PT PIDC di Tengah
Situasi Pandemi



2020
LAPORAN TAHUNAN
Annual Report



Survival

PT PIDC di Tengah Situasi Pandemi

Tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Pandemi global COVID-19 mempengaruhi kondisi perekonomian dan industri secara global dan nasional. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap bisnis-bisnis yang dikelola oleh PT PIDC.

Namun demikian, di tengah situasi dan kondisi tersebut, Perseroan tetap teguh berupaya mengejar target-target yang telah ditentukan dan mencari solusi untuk mengatasi berbagai kendala yang timbul.

Selama tahun 2020 PT PIDC mengimplementasikan langkah-langkah strategis dengan mengedepankan penerapan protokol kesehatan yang tepat dalam rangka mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan.

Kebijakan efisiensi biaya pada seluruh lini usaha dan peningkatan kompetensi individu maupun organisasi, dilakukan secara konsisten. Selain itu optimalisasi proses internal, serta strategi dan inisiatif lainnya telah diterapkan, guna memastikan bahwa Perseroan terus mencapai tujuan keberlanjutan, meskipun di tengah situasi pandemi Covid-19 yang sangat tidak kondusif.

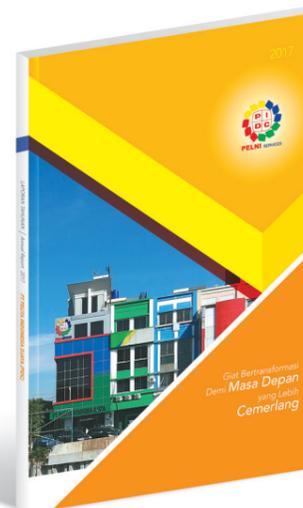
PT PIDC memiliki komitmen yang solid untuk terus menciptakan peluang, guna mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan di tengah tantangan bisnis yang tidak ringan di masa pandemi.

Karena Perusahaan meyakini, bahwa pencapaian bisnis yang diraih di tahun 2020 akan menjadi batu loncatan untuk tahun 2021 di saat kita semua melangkah maju dengan penuh optimisme.

2016
Megasah Keunggulan,
Menjadi Pilar Berkelanjutan



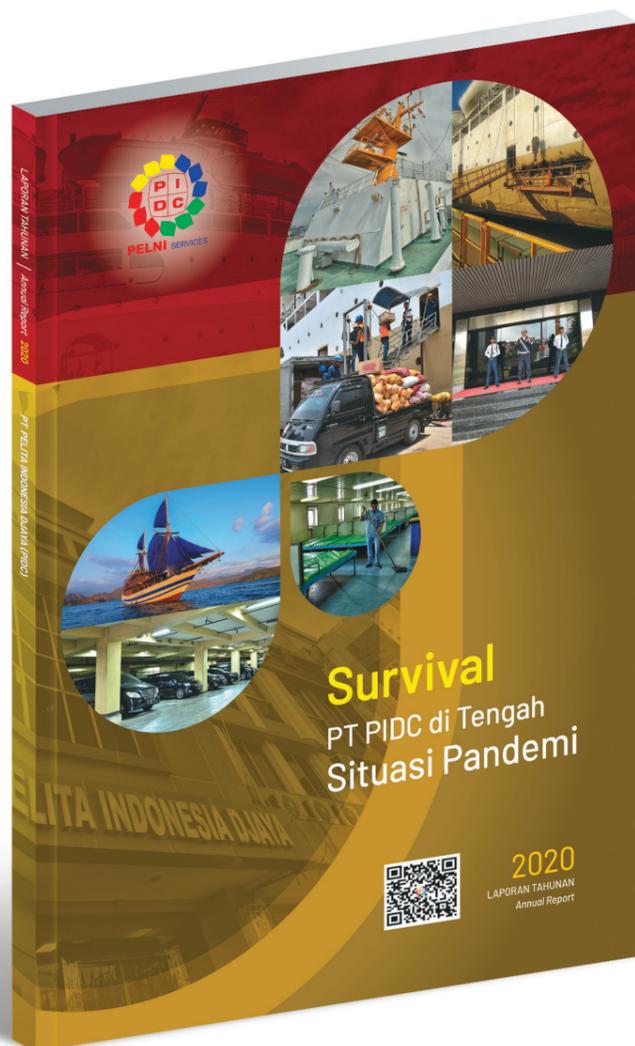
2017
Giat Bertransformasi Masa
Depan yang Lebih Cemerlang



2018
Pertumbuhan Berkelanjutan
Untuk Menatap Masa Depan
Gemilang



2020
Survival
PT PIDC di Tengah Situasi
Pandemi



2019
Optimalisasi Sumberdaya
Untuk Keberlanjutan



“

“Di tengah kondisi yang penuh tantangan Perusahaan tetap mampu menunjukkan kinerja positif dengan mencatatkan laba bersih sebesar Rp22.468 juta.”

Pendapatan Usaha
Rp368.211 Juta

Laba Bersih (Setelah Pajak)
Rp22.468 Juta

Total Aset
Rp271.142 Juta

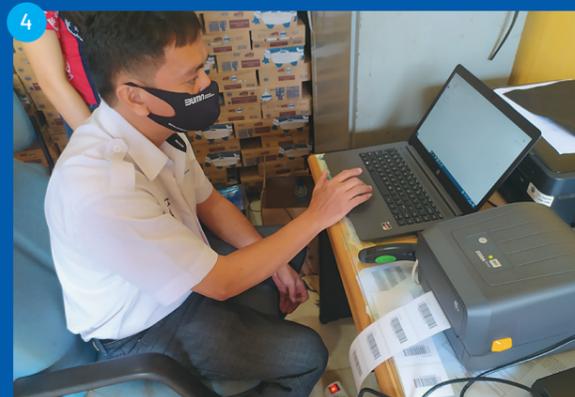


PT PIDC adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mendukung perusahaan Induk yaitu PT PELNI (Persero) dengan *branding* nama PELNI Services untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa (PT PELNI dan lainnya) dalam pelaksanaannya berdasarkan kontrak kerja dengan jangka waktu tertentu.

“



Peristiwa Penting 2020



Keterangan:

1. Penandatanganan Plakat Gudang Cakung.
- 2 & 3. Peresmian gudang cakung sekaligus perayaan HUT PIDC ke 51.
4. Pelatihan sistem wms dan *barcoding* barang untk *supply* ke kapal.
5. Penerapan sistem wms dan *barcoding* barang untk *supply* ke kapal.
6. Bakti Sosial Kementerian Sosial.
7. Pendampingan Karantina di KM Sinabung Surabaya.

Kilas Kinerja

Keunggulan PT PIDC:

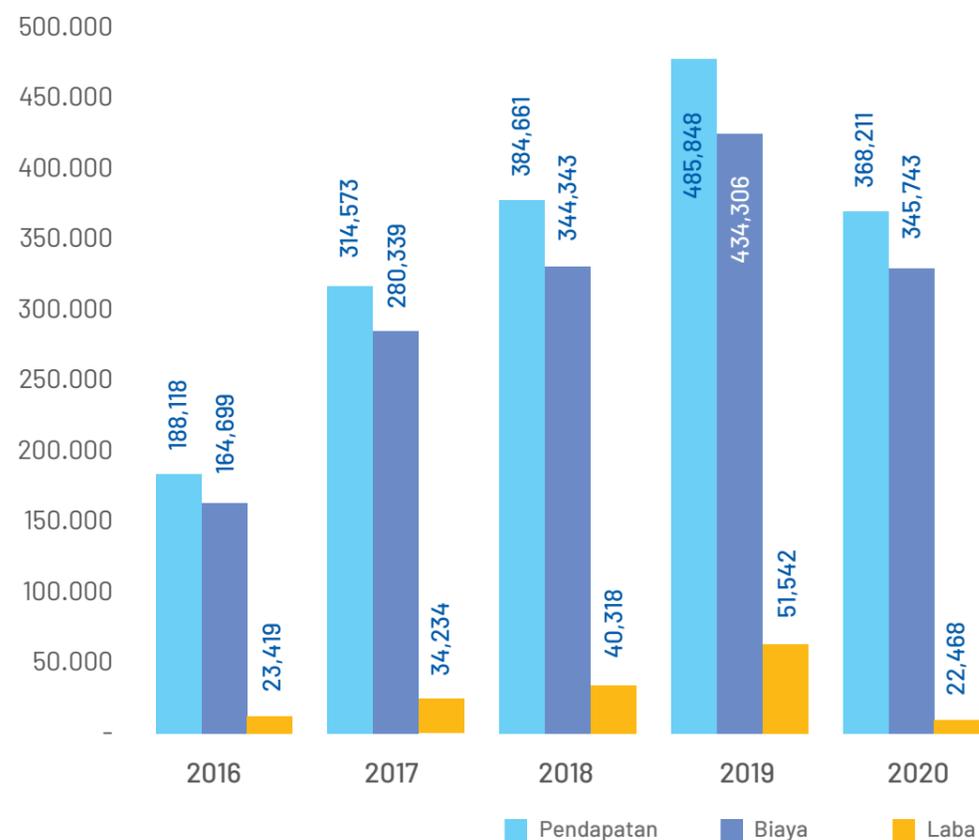
- Revitalisasi layanan jasa yang menaikkan *customer value* (kecepatan, ketepatan, keefisienan, keandalan);
- Percepatan akuisisi pasar melalui keunggulan kompetitif;
- Optimalisasi jaringan bisnis untuk meningkatkan *coverage area* pelayanan dan sekaligus mengimbangi ekspansi pesaing;
- *Equal treatment* dalam menyusun *service level* dengan para *vendor* bisnis;
- Membangun sistem operasi berbasis proses bisnis yang efisien;
- Penguatan tim pelayanan;
- *Brand building* dan *repositioning* ke layanan jasa pelayanan;
- Menguasai *captive market*;
- Memiliki *customer based* dilingkup industrinya.

Ikhtisar Kinerja Keuangan

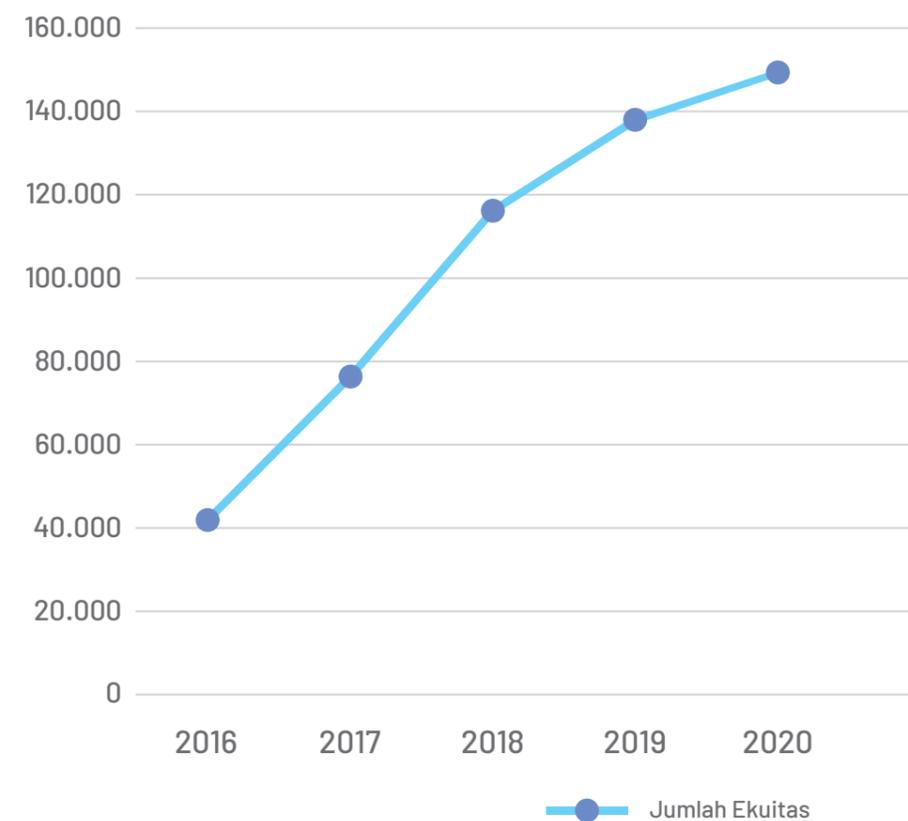
Perkembangan Kinerja Perusahaan

URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020	PERTUMBUHAN (TURUN)
LAPORAN LABA (RUGI) KONSOLIDASIAN (dalam satuan Juta Rupiah)						
Pendapatan Usaha	188,118	314,573	384,661	485,848	368,211	(24.21)
Biaya Usaha	(144,640)	(251,679)	(304,504)	(368,406)	(295,857)	(19.69)
Laba Kotor	43,478	62,894	80,157	117,442	72,354	(38.39)
Beban Administrasi dan Umum	(13,024)	(17,566)	(26,437)	(43,979)	(41,527)	(5.58)
Laba Usaha	30,454	45,328	53,720	73,462	30,827	(58.04)
Pendapatan (Beban) Non Usaha Bersih	703	(3)	242	(1,686)	(733)	(57)
Laba Sebelum Pajak	31,157	45,326	53,962	71,777	30,093	(58.07)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan						
Pajak Kini	(8,286)	(11,827)	(13,930)	(20,487)	(7,754)	(62.15)
Pajak Tangguhan	359	274	298	266	85	(68.25)
Laba Tahun Berjalan	23,230	33,773	40,329	51,556	22,424	(56.51)
Penghasilan Komprehensif Lain	(208)	475	(53)	769	(29)	(103.84)
Jumlah Laba Komprehensif	23,438	34,248	40,382	50,787	22,454	(55.79)
Hak Minoritas	(19)	(14)	(11)	(14)	44	(409.86)
Laba Rugi Konsolidasian	23,419	34,234	40,318	51,542	22,468	(56,41)
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (dalam satuan Juta Rupiah)						
Aset Lancar	96,495	125,140	150,991	229,825	219,441	(4.52)
Aset Tidak lancar	8,982	13,178	27,079	40,757	51,701	26.85
TOTAL ASET	105,477	138,318	178,069	270,581	271,142	0.21
Liabilitas Jangka Pendek	53,384	50,941	57,900	93,718	88,316	(5.76)
Liabilitas Jangka Panjang	7,251	9,353	7,932	37,008	(14,669)	(20.29)
Total Liabilitas	60,635	60,294	59,832	130,726	117,817	(9.88)
Modal Kerja	44,762	77,931	118,133	139,586	153,326	9.84
Kepentingan Non Pengendali	80	94	105	269	223	(17.33)
Total Ekuitas	44,842	78,024	118,238	139,855	153,548	9.79
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	105,477	138,318	178,069	270,581	271,142	0.21
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN						
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	8,337	11,233	24,396	35,428	8,052	(77.24)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	(30)	(5,391)	(17,518)	(18,955)	(14,669)	(22.61)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	-	1,332	(1,435)	(2,627)	(19,749)	651.72
Kenaikan (Penurunan) Kas dan Setara Kas	8,307	7,175	5,442	13,846	(26,367)	(291.22)
Saldo Awal Kas dan Setara Kas	6,297	14,604	21,779	27,221	41,066	50.65
Saldo Akhir Kas dan Setara Kas	14,604	21,779	27,221	41,066	16,700	(64.29)
RASIO KEUANGAN						
Gross Profit Margin	23.40%	19.99%	20.84%	23.68%	19.62%	(17.14)
Operating Profit Margin	16.72%	14.43%	14.09%	16.40%	16.40%	-
Net Profit Margin	12.41%	10.73%	10.48%	12.17%	6.09%	(49.94)
EBITDA Margin	16.93%	14.47%	13.27%	16.83%	9.18%	(45.58)
Net Return On Investment	22.35%	24.41%	21.92%	31.90%	12.74%	(60.07)
Net Return On Equity	50.54%	32.82%	34.11%	67.16%	17.94%	(73.29)
Dept to Equity Ratio	51.81%	43.29%	55.61%	83.54%	76.84%	(8.02)
Dept to Total Asset	55.80%	43.59%	35.74%	45.52%	43.45%	(4.54)
Current Ratio	188.15%	245.66%	271.37%	266.77%	248.47%	(6.86)
Total Asset Turn Over	179.28%	227.43%	209.06%	179.99%	139.04%	(22.75)

Perkembangan Pendapatan, Biaya dan Laba Konsolidasi Perusahaan

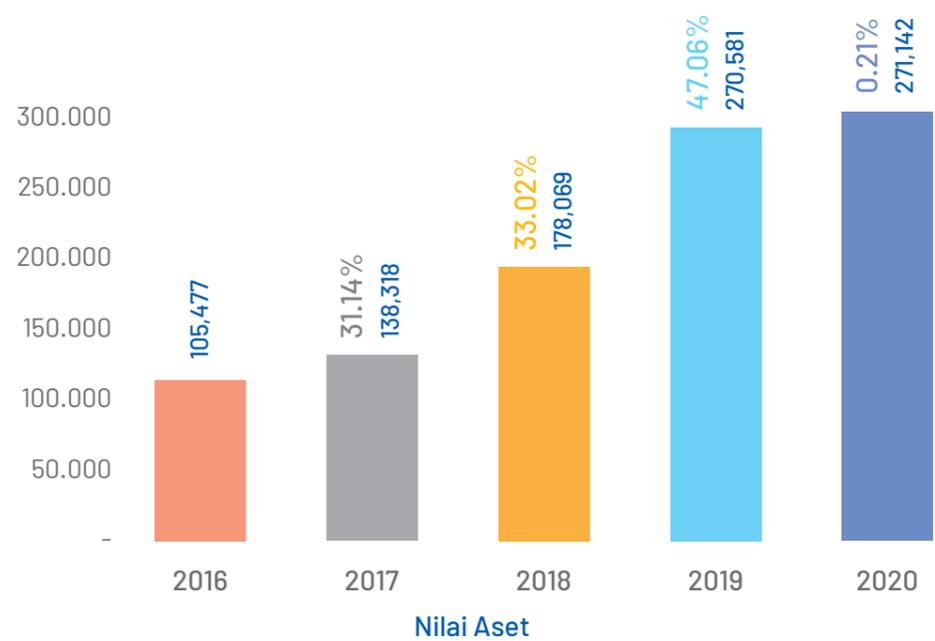


Ekuitas



Perkembangan Aset Perusahaan

Dalam Jutaan Rupiah





Laporan Dewan Komisaris

Dalam pandangan Komisaris, Direksi telah berupaya maksimal menerapkan berbagai kebijakan strategis didalam situasi pandemi, guna menjaga pertumbuhan kinerja bisnis agar tetap positif, dan menjaga posisi keuangan tetap solid.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pemegang Saham yang Kami Hormati,

Kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Pengasih, karena berkat rahmat-Nya, Perusahaan mampu melalui tahun 2020 yang penuh tantangan ini dengan baik. Kami percaya, pengalaman panjang PT PIDC selama ini di bidangnya, telah mampu menempa daya tahan dan kelenturan perusahaan didalam menghadapi berbagai situasi sulit akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan di tahun 2020.

Para pemangku kepentingan, perkenankan kami menyampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris atas perkembangan dan pengelolaan PT PIDC untuk tahun buku 2020 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pandangan Umum terhadap Situasi Ekonomi Makro

Tahun 2020 merupakan masa yang penuh tantangan. Pandemi Covid-19 berdampak besar bagi ekonomi Indonesia. Kebijakan Pemerintah dalam mengatasi pandemi virus Corona (Covid-19) telah menekan pertumbuhan ekonomi nasional ke tingkat yang paling rendah selama beberapa tahun terakhir.

Berbagai pembatasan bisnis dan sosial untuk mengantisipasi penyebaran virus Covid-19 berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang mengalami kontraksi sebesar 2,19% di tahun 2020, dibandingkan dengan pertumbuhan sebesar 4,96% di tahun 2019.

Lemahnya aktivitas ekonomi yang bersifat multidimensi mempengaruhi hampir seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Dalam pandangan Dewan Komisaris, kondisi yang sangat menantang inilah yang harus dihadapi manajemen Perseroan di tahun buku 2020.

Penilaian atas Kinerja Direksi

Bersama ini kami melaporkan, Dewan Komisaris sesuai fungsi dan kewenangannya, di tahun 2020 telah memberikan arahan, agar Perseroan menyesuaikan aktivitas dan merumuskan strategi keberlanjutan usaha, serta mengevaluasi kembali target-target yang telah disusun pada awal tahun, berkaitan dengan situasi khusus terjadinya pandemi Covid-19 di tanah air.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, fungsi Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas pengurusan PT PIDC serta memberikan nasihat kepada Direksi sepanjang tahun 2020. Karena itu, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, selama tahun 2020 Dewan Komisaris telah memberikan arahan dan persetujuan atas inisiatif-inisiatif strategis Direksi dalam menyikapi kondisi eksternal dan internal, agar Perusahaan tetap dapat mencapai kinerja bisnis yang optimal, meskipun di tengah situasi pandemi.

Memang didalam mengantisipasi situasi sulit di masa pandemi, Dewan Komisaris dan Direksi senantiasa berkomunikasi secara intens, guna mengevaluasi berbagai perkembangan dan perubahan bisnis yang terjadi di tanah air. Kami Dewan Komisaris memberikan arahan dan rekomendasi kepada Direksi, yang mencakup operasional perusahaan, pengelolaan keuangan, pengembangan usaha, dan lain-lain, didalam mengantisipasi berbagai dinamika yang terjadi di tanah air dengan adanya kejadian *force majeure* pandemi Covid-19.

Sekalipun menghadapi tantangan yang sangat berat di tahun 2020, di tengah situasi ekonomi yang sangat tidak kondusif diakibatkan pandemi Covid-19, Perusahaan ternyata mampu *survive* dan masih tetap mencatatkan kinerja bisnis yang cukup baik, dan menjaga posisi keuangan yang tetap solid.

Karena itu dalam pandangan Dewan Komisaris, Direksi telah berupaya maksimal dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan selama tahun 2020, dengan menerapkan berbagai kebijakan strategis, guna mempertahankan pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Untuk itu, kami memberikan apresiasi dan penghargaan khusus terhadap Direksi.

Pandangan Atas Kinerja Bisnis Perusahaan

Dewan Komisaris menyadari, tahun buku 2020 dilalui dengan kondisi perekonomian yang luar biasa menantang. Situasi ekonomi nasional yang tidak kondusif sebagai dampak dari pandemi itulah yang harus dihadapi oleh Perusahaan di sepanjang tahun 2020.

Namun demikian, PT PIDC ternyata mampu melalui tahun 2020 yang penuh dengan tantangan yang tidak ringan ini dengan baik, dan Perusahaan tetap mampu menjaga kinerja bisnisnya relatif cukup baik, meskipun terjadi penurunan dari berbagai sisi.

Untuk pendapatan usaha Perusahaan pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp368.211 juta, atau 86,66% dari anggaran sebesar Rp424.873 juta, dan menurun 24,21% dibandingkan dengan pendapatan usaha tahun 2019 sebesar Rp485.848 juta.

Sementara itu laba bersih Perusahaan setelah pajak adalah sebesar Rp22.468 juta, atau 87,19% dari anggarannya sebesar Rp25.769, dan mengalami penurunan sebesar 56,41% dibanding tahun 2019 sebesar Rp51.542 juta.

Sedangkan, khusus untuk jumlah aset Perusahaan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp271.142 juta, atau 88,70% dari anggaran sebesar Rp305.683 juta. Apabila dibandingkan dengan jumlah aset tahun 2019 yaitu Rp270.581 juta, maka trend-nya masih meningkat sebesar 0,21%.

Kami memberikan apresiasi terhadap hasil pencapaian kinerja tersebut diatas, yang tergolong masih cukup baik, di tengah-tengah situasi sulit masa pandemi Covid-19 yang telah meluluhlantakkan iklim bisnis dan ekonomi secara nasional. Dewan Komisaris memandang segenap jajaran Direksi beserta seluruh jajaran manajemen Perseroan telah berupaya secara maksimal untuk membukukan kinerja yang positif di tahun ini.

Kami menilai, selama tahun 2020 upaya-upaya yang telah dilakukan Direksi, mulai dari langkah-langkah efisiensi, kemudian pengoptimalan bisnis-bisnis yang dimiliki dan berbagai strategi lainnya mampu menjaga PT PIDC untuk tetap bisa *survive* di masa-masa sulit selama pandemi Covid-19 di tahun 2020, sehingga Perusahaan mampu menjaga kinerja bisnisnya tetap tumbuh cukup baik meskipun mengalami penurunan di beberapa *segmen*.

Pandangan Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Selanjutnya, kami dari Dewan Komisaris juga memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) di PT PIDC sepanjang tahun 2020.

Dewan Komisaris di tahun 2020 terus mendorong Direksi agar mengimplementasikan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara konsisten, termasuk menjaga komitmen kepatuhan terhadap semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut hemat kami, selama tahun 2020 Direksi dan jajarannya telah berkomitmen optimal didalam menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tersebut, antara lain kami dukung dengan pengawasan secara melekat dari Dewan Komisaris, yang secara rutin memberikan masukan/arahan selama tahun buku 2020.

Kami juga memberikan saran, pembenahan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT PIDC harus terus dilakukan secara kontinyu/berkesinambungan.

Dewan Komisaris juga memastikan bahwa manajemen Perusahaan selama tahun 2020 telah melaksanakan operasional perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, meliputi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pandangan atas Prospek Usaha

Pandemi Covid-19 masih akan menjadi isu krusial di tahun 2021. Namun demikian keberhasilan pengendalian COVID-19, serta kebijakan penanganannya akan menjadi faktor kunci bagi pemulihan ekonomi di tahun 2021.

Dewan Komisaris meyakini, bahwa Perseroan tetap memiliki prospek usaha yang positif di tahun 2021 seiring dengan prospek perekonomian nasional di tahun tersebut yang diperkirakan akan membaik, sejalan dengan membaiknya perekonomian global.

Dikarenakan Perusahaan telah memiliki bisnis yang stabil selama puluhan tahun, maka kami meyakini Perseroan akan mampu mengoptimalkan prospek usaha yang ada, sehingga Perusahaan akan mampu kembali berkembang dengan pesat, seperti di tahun-tahun sebelumnya dimasa sebelum pandemi Covid-19.

Saran dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja manajemen selama Tahun 2020, Dewan Komisaris juga telah memberikan saran dan rekomendasi dalam rangka perbaikan kinerja perusahaan meliputi rekomendasi untuk

memperbaiki kinerja keuangan, memperbaiki proses bisnis, memperbaiki sistem pengendalian internal, memperbaiki manajemen risiko, memperbaiki budaya PIDC dan pengelolaan sistem informasi.

Apresiasi

Akhirnya, apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami tujukan kepada para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan.

Apresiasi terdalam juga kami berikan kepada seluruh jajaran Direksi, Manajemen, dan seluruh karyawan

yang telah menunjukkan kerja keras, loyalitas dan dedikasinya turut berpartisipasi untuk melalui masa-masa yang penuh tantangan dan mendukung PIDC untuk terus tumbuh dan berkembang, demi keberhasilan kita bersama.

Semoga Perusahaan dapat terus memberikan manfaat terbaik bagi pelanggan, mitra usaha, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan di masa mendatang. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semua dalam mewujudkan harapan yang kita cita-citakan bersama. Amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 22 Juli 2021
Atas nama Dewan Komisaris



M Tukul Harsono
Komisaris Utama

Profil Dewan Komisaris



M TUKUL HARSONO

Komisaris Utama

Lahir:

Demak, tahun 1967

Pendidikan:

Lulusan dari Master Mariner Universitas BP3IP. Sebagai komisaris utama PT PIDC berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT PELNI (Persero), yang diselenggarakan pada tanggal 15 november 2019.

Perjalanan Karir:

- Direktur PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (2016).
- Direktur Usaha Angkutan Penumpang 2016 -2017.
- Direktur Operasi dan Pelayanan PT PELNI (Persero) (2016-2020).



Menyikapi dampak pandemi COVID-19 berkepanjangan sepanjang tahun 2020, Perusahaan telah bergerak cepat merespons setiap kendala yang muncul, guna mereduksi penurunan kinerja, serta tetap mampu menangkap peluang yang ada. Sehingga di akhir tahun, Perusahaan tetap mampu membukukan hasil kinerja bisnis yang tetap terjaga positif, meskipun mengalami penurunan, serta memastikan posisi keuangan masih tetap solid.

Laporan Direksi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pemegang Saham dan Para Pemangku Kepentingan yang kami hormati,

Pertama-tama kami menghaturkan puji syukur kami kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat-Nya PT PIDC mampu melalui tahun 2020 yang penuh dengan tantangan ini dengan kinerja bisnis yang masih terjaga cukup baik, meskipun harus menghadapi situasi sulit di masa pandemi.

Menyikapi kondisi bisnis yang menantang di masa pandemi, kami memang mengambil sikap untuk tetap menjalankan bisnis seperti biasa, namun lebih berhati-hati dengan mengelola aspek bisnis dan aspek kesehatan secara paralel dan berimbang. Kami juga fokus pada perbaikan aspek-aspek keunggulan operasional, sehingga di saat kondisi membaik nantinya, Perusahaan sudah siap meraih dan mengembangkan peluang usahanya secara optimal.

Kami percaya berbagai tantangan yang menghadang perusahaan di tahun 2020, akan menjadikan kami lebih kuat, tangguh dan sigap dalam menghadapi perubahan di masa mendatang.

Pandangan Umum Terhadap Makro Ekonomi

Situasi makro ekonomi global memang dihadapkan pandemi Covid-19 yang menimbulkan dampak luar biasa (*extraordinary*) sepanjang tahun 2020. Berbagai indikator menunjukkan aktivitas konsumsi, investasi, dan produksi di banyak negara tertekan tajam dan mengakibatkan penurunan perdagangan internasional.

Kondisi perekonomian dunia tahun 2020 memang menghadapi tantangan yang sangat berat. Merebaknya pandemi Covid-19 telah membuat kinerja perekonomian dunia mengalami kontraksi, terlebih pada semester pertama tahun 2020, ekonomi global mengalami kontraksi yang sangat dalam. Aktivitas ekonomi global turun dan melemah, sehingga menimbulkan resesi di hampir semua negara di dunia.

Mobilitas masyarakat global juga menurun tajam, hingga mencapai level terendahnya pada pertengahan 2020. Meski demikian, kinerja yang relatif baik terlihat pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan penanganan Covid-19, antara lain industri bahan pangan, alat kesehatan dan obat-obatan, serta

teknologi yang menjadi penunjang aktivitas kerja jarak jauh, sejalan dengan penerapan *work from home*, *school from home*, dan *social distancing*.

Covid-19 juga memberikan tekanan kuat kepada ekonomi dalam negeri Indonesia. Pada tahun 2020 Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan bahwa perekonomian Indonesia tercatat $-2,07\%$, (jauh di bawah pertumbuhan tahun sebelumnya, yaitu $5,02\%$), dipengaruhi oleh pelemahan di berbagai sektor ekonomi karena pandemi Covid-19.

Pandangan Atas Pencapaian Kinerja Bisnis Perseroan

Meskipun dalam situasi pandemi Covid-19 berkepanjangan di tahun 2020, PT PIDC tetap mampu menjaga kinerja bisnisnya relatif cukup baik, meskipun terjadi penurunan.

Penurunan terjadi baik dari sisi produksi, pendapatan dan laba bersih konsolidasi. Hal ini dampak dari kondisi Pandemi Covid-19 terutama di kuartal 1 di mana ada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), larangan masuk di beberapa Pelabuhan dan pengurangan kapasitas jumlah penumpang sampai 50% .

Pendapatan usaha PT PIDC pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp368.211 juta, atau $86,66\%$ dari anggaran sebesar Rp424.873 juta, dan menurun $24,21\%$ dibandingkan dengan Pendapatan Usaha tahun 2019 sebesar Rp485.848 juta.

Pendapatan usaha perusahaan berasal dari kontribusi segmen Usaha Jasa sebesar $27,20\%$, Usaha Komersial $50,68\%$, Usaha JMI (Jasa Maintenance & IT) $12,98\%$, Usaha Penunjang $8,14\%$, Usaha Entitas Anak (PT PBN) sebesar $0,87\%$, dan Usaha Entitas Anak (PT PANI) sebesar $0,13\%$.

Untuk biaya usaha, pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp295.857 juta atau $87,31\%$ dari anggaran sebesar Rp338.854 juta, atau tercapai $80,31\%$ dibandingkan dengan biaya usaha di tahun 2019 sebesar Rp368.406 juta.

Biaya usaha tahun 2020 sebesar Rp295.857 juta berkontribusi dari segmen Usaha Jasa sebesar $24,31\%$, Usaha Komersial $51,58\%$, Usaha JMI (Jasa Maintenance & IT) $15,09\%$, Usaha Penunjang

8,50%, Usaha Entitas Anak (PT PBN) sebesar 0,44%, dan Usaha Entitas Anak (PT PANI) sebesar 0,08%.

Sementara itu, untuk laba kotor usaha pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp72.354 juta atau 84,11% dari anggaran sebesar Rp86.019 juta, atau tercapai sebesar 61,61% dibandingkan dengan laba usaha tahun 2019 sebesar Rp117.442 juta. Laba kotor usaha tersebut berkontribusi dari segmen Usaha Jasa sebesar 39,00%, Usaha Komersial sebesar 47,02%, Usaha Jasa *Maintenance & IT* sebesar 4,33%, Usaha Penunjang sebesar 6,67%, Usaha Entitas Anak (PT PBN) sebesar 2,65%, dan Usaha Entitas Anak (PT PANI) sebesar 0,33%.

Sedangkan realisasi laba bersih sebelum pajak tahun 2020 tercapai sebesar Rp30.093 juta atau 94,90% dari anggarannya sebesar Rp31.712 juta. Bila dibandingkan dengan realisasi laba tahun 2019 sebesar Rp 71.777 juta, maka laba bersih menurun sebesar 41,93%.

Untuk laba bersih PT PIDC setelah pajak adalah sebesar Rp22.468 juta atau 87,19% dari anggarannya sebesar Rp25.769, dan mengalami penurunan dibanding tahun 2019 sebesar 56,41%.

Terhitung untuk jumlah aset PT PIDC per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp271.142 juta, atau 88,70% dari anggaran sebesar Rp305.683 juta, dan apabila dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp270.581 juta, maka *trend*-nya masih meningkat sebesar 0,21%.

Pandangan Terhadap Prospek Usaha

Tak bisa dipungkiri, sehubungan dengan iklim bisnis di tanah air di tahun 2020 yang terpuruk diakibatkan dampak pandemi Covid-19, maka hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap bisnis-bisnis dari Perusahaan. Sehingga berbagai kinerja keuangan PT PIDC di tahun 2020 memang harus mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Namun demikian, dengan perkembangan vaksinasi nasional yang diharapkan akan diikuti oleh pengurangan kebijakan pembatasan fisik dan sosial, sehingga dapat mendorong pemulihan kembali ekonomi nasional. Keberhasilan pengendalian

Covid-19 serta kebijakan penanganannya akan menjadi faktor kunci bagi pemulihan ekonomi di tahun 2021 dan tahun-tahun ke depannya.

Bagi PT PIDC, dengan nantinya perekonomian nasional mulai kembali membaik, maka Perusahaan optimis untuk bisa lebih mengoptimalkan pangsa pasar yang sudah ada selama ini, sekaligus mengembangkan pangsa pasar-pangsa pasar baru.

Hal ini sejalan dengan tujuan strategis jangka panjang yang diamanatkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yaitu menjadi perusahaan yang sehat secara *financial (sustainable profit)*, sehingga dapat melakukan investasi yang berkelanjutan (*sustainable growth*) untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan yang didukung SDM dengan kompetensi yang tinggi dan berperilaku sesuai GCG dalam menjalankan usahanya (*corporate value*), sehingga dapat mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

Perseroan yakin dapat terus tumbuh dan berkembang di masa mendatang dengan menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Kemampuan individu, pengembangan individu, dan kerjasama tim akan terus ditingkatkan melalui program kerja dan strategi yang tepat sasaran.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Dalam Laporan Direksi ini, kami juga mengabarkan tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Perusahaan selama tahun 2020.

Meskipun dalam situasi pandemi Covid-19, kami senantiasa memastikan, Perusahaan di tahun 2020 telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perseroan Yang Baik secara konsisten dan berkesinambungan, serta menjadikannya sebagai landasan operasional.

PT PIDC memahami bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan acuan standar yang wajib diterapkan oleh sebagai landasan operasional kegiatan usaha perusahaan sebagaimana ditetapkan oleh regulator. Dalam jangka panjang, penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik mempunyai

relevansi terhadap kinerja atau *performance* suatu perusahaan, karena nilai akhir (*ultimate value*) penerapan GCG adalah meningkatkan kinerja (*high performance*), serta citra perusahaan yang baik (*good corporate image*).

Aktualisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT PIDC dilakukan di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada ketentuan dan persyaratan terkait dengan pelaksanaan Tata Kelola yang Baik bagi perusahaan.

Optimalisasi penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan akan terus kami lakukan dengan penguatan infrastruktur untuk mencapai praktik terbaik, penyesuaian sistem dan prosedur yang diperlukan guna mendukung pelaksanaannya yang semakin efektif.

Direksi berpedoman pada Pedoman Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*). *Board Manual* berisi tentang petunjuk tata laksana kerja Dewan Komisaris dan Direksi serta menjelaskan tahapan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai Visi dan Misi Perusahaan, sehingga diharapkan akan tercapai standar kerja yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Di masa pandemi, perusahaan beberapa kali harus beradaptasi dalam transformasi budaya kerja dan mobilitas karyawan, sebagai akibat dari kebijakan *Work From Home (WFH)* atau bekerja di rumah selama pembatasan sosial berskala besar yang diberlakukan Pemerintah. Empati, adaptasi, dan komunikasi adalah kunci utama pengelolaan karyawan di masa pandemi, hingga ke masa *new normal*.

Namun demikian, meskipun dalam situasi pandemi, PT PIDC tetap secara konsisten melakukan pembinaan SDM guna meningkatkan kompetensi dan profesionalisme karyawan.

Kami menyadari bahwa meskipun dalam situasi pandemi, kompetensi SDM Perusahaan tidak boleh menurun, namun justru kompetensinya harus meningkat. Karena justru kompetensi dari SDM itu sangat dibutuhkan guna menghadapi segala situasi sulit di masa pandemi.

Secara berkesinambungan PT PIDC melakukan pembinaan dan pengembangan pegawai untuk memenuhi kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan, baik melalui metode pendidikan, pelatihan, penugasan khusus maupun program mutasi dan promosi.

Selama tahun 2020 program peningkatan/pengembangan kompetensi SDM dilakukan antara lain melalui pendidikan dan latihan, *workshop*, dan *coaching* yang diselenggarakan oleh pihak internal maupun eksternal, guna mendapatkan pengetahuan dan kemampuan khusus.

Guna mendorong peningkatan produktivitas pegawai PT PIDC menerapkan *Key Performance Indicator (KPI)* atau Kontrak Manajemen yang digunakan sebagai acuan kinerja dan dasar penyusunan program kerja tahun berjalan.

Penerapan Program Corporate Social Responsibility (CSR)

PT PIDC terus berkomitmen memberikan kontribusi terhadap masyarakat di sekitar wilayah bisnisnya melalui pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Melalui pelaksanaan program CSR, Perusahaan ingin memberikan kontribusi bagi upaya-upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengelola dampak-dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnis Perusahaan.

PT PIDC saat ini juga berupaya terus untuk membangun sistem keamanan dan menerapkan SMK3 untuk mencapai *zero accident*, serta berusaha untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan setiap kegiatannya.

Apresiasi Kepada Pemangku Kepentingan

Pada kesempatan yang baik ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris yang telah memberikan dukungan, arahan dan nasihat penting sepanjang tahun 2020, serta kepada Pemegang Saham atas kepercayaan yang telah diberikan.

Penghargaan setinggi-tingginya saya sampaikan

kepada seluruh karyawan Perusahaan dan entitas anak yang telah bekerja keras dengan penuh dedikasi dan integritas menghadapi berbagai tantangan yang ada.

Semoga Perusahaan dapat terus memberikan manfaat yang optimal bagi pemegang saham, karyawan, dan masyarakat luas.

Jakarta, 22 Juli 2021
Atas nama Direksi



Effendi
Direktur Utama

Profil Dewan Direksi**EFFENDI**

Direktur Utama

Lahir:

Tasikmalaya pada tahun 1962

Pendidikan:

Universitas Mpu Tantular Jurusan Hukum Tahun 2002.

Karir:

- Mengawali karir pada tahun 1988 di PT PELNI (Persero) hingga pada tahun 2012.
- Kemudian menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Purna Artanugraha (ASPAN) dan bergabung dengan PT PIDC th 2016 sebagai Direktur Utama PT PELITA INDONESIA DJAYA (PIDC) hingga saat ini.

**Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang
Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2020
PT Pelita Indonesia Djaya (PT PIDC)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Pelita Indonesia Djaya (PT PIDC) tahun 2020 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 22 juli 2021

Dewan Komisaris



M Tukul Harsono
Komisaris Utama

Dewan Direksi



Effendi
Direktur Utama

Identitas Perusahaan

Nama Perusahaan	: PT PELITA INDONESIA DJAYA
Nama Sebutan	: PT PIDC
Kantor Pusat	: Jl. Let-Jen Soeprapto Komplek Ruko Cempaka Mas Blok Q no 5, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat 10640
Telepon	: 021 42883740
Surat Elektronik	: www.pidc.co.id
e-mail	: corporate@pidc.co.id
Tanggal Berdiri	: 29 September 1969
Tanggal Beroperasi	: 29 September 1969
Dasar Hukum	: Akta Notaris No. 53 tanggal 29 September 1969 Notaris Djojo Muljadi, SH yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 12 tanggal 10 Pebruari 1970 dirubah Akta Notaris No. 05 tanggal 13 Desember 2019 Notaris Ida Adiningsih, SH. Di Jakarta dan surat pengesahan dari KEMENKUMHAM RI Nomor: AHU-000242605.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1984 tertanggal 9 Juli 1984, menjadi Anak Perusahaan PT PELNI (Persero).
Modal Dasar	: Rp2.010.000.000,-
Modal Disetor	: Rp2.010.000.000,-
Pemegang Saham	: 1. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) - 99,50% 2. Yayasan Kesehatan Pesiunan PT PELNI (YKPP) - 0.50%
NPWP	: 01.307.708.6-093.000
TDP	: 246/24.3PT.7/31.71/-1.824.27/e/2018 Tanggal 24 Juli 2018
SIUP	: 264/24.1PM.1/31.71/-1.824.27/e/2018 Tanggal 25 Juli 2018
Jumlah Pegawai	: 1409 orang per 31 Desember 2020
Kegiatan Usaha	: a. Usaha Jasa: Jasa Kebersihan (<i>Cleaning Service</i>), Jasa Pengawasan dan Pengamanan, <i>House Keeping</i> , Jasa Hiburan Band, Jasa Pengelolaan Janitor, <i>Jasa Manage Services</i> . b. Usaha Komersial : Pengelolaan Bahan Makanan, <i>Supplement food</i> , Air mineral & <i>Mealbox</i> , Kendaraan disewakan & Pinisi. c. Usaha Jasa <i>Maintenance & IT</i> : Siskomkap, PELNI TV, <i>BTS Multioperator</i> , <i>Maintenance AHU, AC & Chiler Kapal</i> , Renovasi dan <i>Running Repair Kamar mandi, Vending Machine</i> . d. Usaha Jasa Lainnya: <i>Minitheater</i> , Gerai Pelni Perintis & <i>Driver Service</i> .

Sekilas Perusahaan

Dalam rangka menyetatkan Perusahaan Negara Pelajaran Nasional Indonesia (P.N. PELNI), atas persetujuan Menteri Perhubungan Republik Indonesia tanggal 4 April 1969 nomor: M.8/4/25 Phb, didirikanlah "Usaha Sampingan" dengan akta pendirian tertanggal 29 September 1969 nomor: 53 yang diperbaiki dengan akta tanggal 24 Nopember 1969 nomor 46 oleh Notaris Djojo Muljadi, SH yang di umumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 12 tanggal 10 Pebruari 1970 yang bernama "PT PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION" (disingkat PT PIDC)

Pendirian Perusahaan PT PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION yang modal dasarnya dipisahkan dari kekayaan Negara yang tertanam dalam P.N. PELNI, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) maka PT PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION menjadi Perusahaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari pendirian PT PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION menjadi perusahaan milik Negara, maka keluarlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 1970 tertanggal 23 September 1970 dimana ditetapkan pemisahan sebagian dari kekayaan Negara Republik Indonesia yang tertanam dalam Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia (PN.PELNI) untuk dipergunakan sebagai penyertaan Negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perseroan Terbatas PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION (PT PIDC).

Berdasarkan penelitian ternyata Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) tidak dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan prinsip prinsip ekonomi yang dikehendaki, untuk menjamin kelangsungan usahanya, maka keluarlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 16 tahun 1984 tertanggal 9 Juli 1984 dimana ditetapkan pengalihan pemilikan dan penguasaan modal Negara Republik Indonesia dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, sehingga seluruh modal Negara Republik Indonesia dalam bentuk saham pada Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) dialihkan pemilikan

dan penguasaannya kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dan selanjutnya PT PIDC dijadikan anak perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI).

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1984 tertanggal 9 Juli 1984, dimana ditetapkan Kekayaan Negara yang tertanam pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI) untuk dipisahkan dan dijadikan penyertaan modal PT PELNI pada PT Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) sesuai Surat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S- 88 / MK.013/1991 tertanggal 23 Januari 1991 sebesar:

Modal Dasar/Disetor	Rp2.000.000.000,00
Cadangan	Rp233.930.877,46
Jumlah	Rp2.233.930.877,46

Perubahan kekayaan Negara yang tertanam pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PT PELNI) untuk dipisahkan dan dijadikan penyertaan modal PT PELNI pada PT Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) dengan Akta Notaris nomor 23 tertanggal 14 Juni 1996 Notaris F.J. Mawati yaitu:

- **10.000 lembar saham istimewa dengan nilai nominal Rp 1.000.000.000,-**
- **100.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp 1.000.000.000,- atau seluruhnya berjumlah 10.000 (sepuluh ribu) saham istimewa dan 100.000 (seratus ribu) saham biasa atau sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)**

Dengan masuknya pemegang saham baru yaitu YAYASAN KESEHATAN PENSIUNAN PERSEROAN TERBATAS PELAYARAN NASIONAL INDONESIA, berdasarkan Surat Menteri Negara Pendayagunaan BUMN /Kepala Badan Pengelolaan BUMN tertanggal 12 Mei 1998 Nomor: S-65/M/PBUMN/1998, mengambil sebanyak 10 (sepuluh) saham, maka PT Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) merubah Anggaran Dasarnya dengan Akta Notaris Nomor 21 tertanggal 10 April 2001 Notaris SP. Henny Singgih, SH sehingga Modal Dasar Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation PT PIDC menjadi:

- **PT PELNI (Persero) sebanyak 2.000 (dua ribu) saham atau bernilai nominal sebesar Rp2.000.000.000 (dua milyar rupiah).**
- **YAYASAN KESEHATAN PENSIUNAN PT PELNI sebanyak 10 (sepuluh) saham atau bernilai nominal sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau seluruhnya berjumlah 2010 (dua ribu sepuluh) saham atau bernilai nominal sebesar Rp2.010.000.000,- (dua milyar sepuluh juta rupiah).**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan terbatas maka PT PELITA INDONESIA DJAYA CORPORATION (PT PIDC) merubah nama menjadi PT PELITA INDONESIA DJAYA berkedudukan di Jakarta dengan Akta Notaris nomor 22 tertanggal 10 September 2001.

PT PIDC merubah Anggaran Dasarnya dengan Akta Notaris nomor 19 tertanggal 17 November 2014 Notaris Dewi Sugina Mulyani, SH dan telah

mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU 11563.40.20.2014 tanggal 24 November 2014. Dan terakhir diubah dengan Akte Notaris No. 05 tanggal 13 Desember 2019, Notaris Ida Adiningsih, SH Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari KEMNKUMHAM RI Nomor AHU-0242605.AH.01.11 Tahun. 2019 tanggal 16 Desember 2019

Agar tumbuh secara konsisten dan berkelanjutan dengan memanfaatkan kekuatan dari Perusahaan Induk yaitu PT PELNI sebagai pelayanan jasa kepada masyarakat dibidang transportasi laut maka PT. Pelita Indonesia Djaya (PT PIDC) ikut berkiprah membantu Induk Perusahaan (PT PELNI) dalam meningkatkan pelayanannya kepada pengguna jasa PT PELNI sehingga PT Pelita Indonesia Djaya (PT PIDC) merubah brand image menjadi PELNI SERVICES dengan Surat Keputusan Direksi Nomor: 020/DIR/SK/IX/2014 tanggal 29 September 2014.

Arti Logo PT PIDC



Kubus warna merah, kuning, biru, hijau tersusun melingkar melambangkan gerakan yang DINAMIS PT PIDC dalam mencapai tujuan VISI dan MISI serta semangat Inovasi yang sinergi disemua bidang pelayanan yang tidak terpisahkan dimulai dari hal yang kecil menuju ke yang besar sehingga perusahaan tumbuh dan berkembang dengan cepat dan dapat memberikan nilai tambah ke *Stakeholder*.

Warna Kuning

Melambangkan Intelektualitas kerja serta penuh perhatian dalam merespon kepentingan pelanggan.

Warna Merah

Melambangkan semangat yang Tegas, Kreatif Energik penuh motivasi yang harus dilakukan untuk memberikan pelayanan yang Prima.

Warna Biru

Melambangkan semangat ekspresi Artistik, kekuatan kerjasama dan komunikatif dengan stakeholder sehingga tercipta komunikasi yang nyaman.

Warna Hijau

Melambangkan proses Pelayanan Prima (Kepuasan Pelanggan) kepercayaan bagi pelanggan baik internal maupun eksternal.

Visi dan Misi



Misi

- Memberikan layanan berbasis teknologi terbaik.
- Memberikan ketersediaan layanan dan kepuasan pelanggan.
- Melaksanakan tata kelola perusahaan guna memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

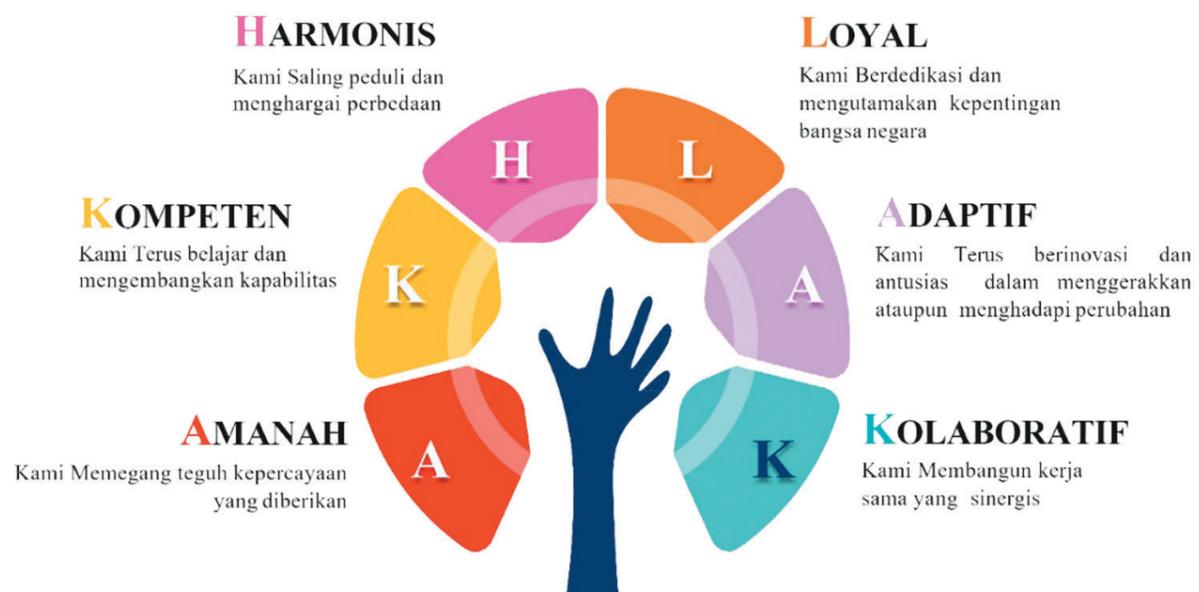


Visi

Menjadi perusahaan jasa berbasis teknologi terkemuka di Indonesia.



Akhlak **BUMN**



Nilai **Perusahaan**

FAST

Cepat dalam menyediakan informasi dan memberikan layanan kepada pelanggan internal maupun eksternal.

ACCESSIBLE

Memberikan kemudahan dalam segala hal untuk mencapai tujuan bersama, termasuk kemudahan untuk ditemui dalam segala urusan bisnis.

INFORMATIVE

Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pelanggan secara jelas dan dapat dimengerti baik secara lisan maupun tulisan.

RESPONSIBLE

Bertanggung jawab terhadap segala hal yang telah dilakukan dan dikerjakan termasuk didalamnya menangani risiko yang timbul.

Kegiatan Perusahaan

Dalam tahun 2020 Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

CORE BUSINESS



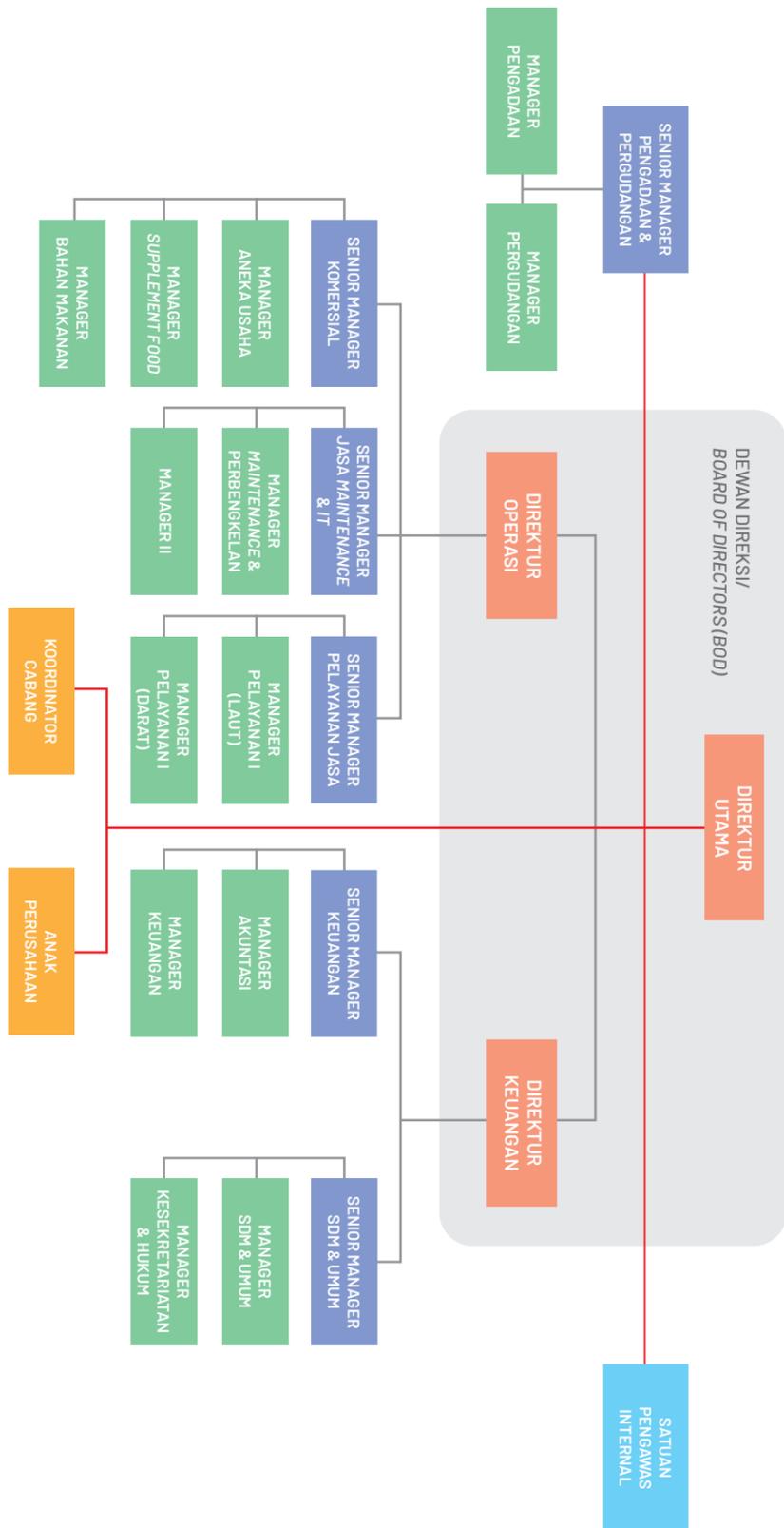
UNIT USAHA

1. *Cleaning Service*
2. Pengamanan
3. Janitor
4. Hiburan Band
5. *House Keeping*
6. *Manage Service / Frontliner*

1. Bahan Baku Makanan, *Supplement Food*, Air Mineral dan *Mealbox*
2. Kendaraan Disewakan
3. Pinisi
4. Wisma Bahtera Tretes

1. Siskomkap
2. Bts Multi Operator
3. *Maintenance Ahu, AC & Chiler Kapal*
4. *Renovasi & Running Repair Kamar Mandi*
5. *Vending Machine*

1. *Driver Services*
2. *Cover Kasur*
3. Tenaga Kerja Bongkar Muat (Tkbm)



Struktur Organisasi
PT PELITA INDONESIA DJAYA (PT PIDC)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
Nomor : 09.30/DIR/SK/001/100/2020
Tanggal : 30 September 2020

Perusahaan

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan telah melakukan beragam kegiatan dan inisiatif terkait dengan usaha perusahaan adalah sebagai berikut:

Kegiatan Usaha

1. Kegiatan Usaha Jasa, terdiri dari:

a. Usaha Jasa Pengawasan dan Pengamanan

Usaha Jasa Pengawasan dan Pengamanan adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan tenaga pengamanan. Dalam kegiatan usahanya perusahaan melakukan kontrak kerjasama yaitu:

- Kontrak dengan PT PELNI (Persero) dalam rangka peningkatan keamanan di Kantor Pusat, Kantor Cabang dan di atas kapal-kapal Pelni sesuai Kontrak nomor: TH.04.27-01/SS/2020 tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir 31 Desember 2020, rincian petugas Pengawasan dan Pengamanan sbb:
 - Pengamanan Darat berlokasi di Kantor Pusat, Kantor Cabang, Persemat Tanjung Priok, Galangan Surya Surabaya berjumlah 155 orang
 - Receptionist Kantor Pusat berjumlah 2 orang
 - Pengamanan Laut di kapal sebanyak 147 orang sbb:
 - Tipe 2000: KM. Umsini, KM. Tidar, KM. Dobonsolo, KM. Bukit Siguntang, KM. Gunung Dempo dan KM. Dorolonda KM. Labobar sejumlah 96 orang petugas
 - Tipe 1000: KM. Kelimutu, KM. Lawit, KM. Tatamailau, KM. Sirimau, KM. Awu, KM. Leuser, KM. Binaiya, KM. Bukit Raya dan KM. Tilongkabila berjumlah 36 orang
 - Tipe 500: KM. Pangrango, KM. Sangiang dan KM. Wilis berjumlah 9 orang
 - Tipe Ro-Ro: KM. Egon, *JetLiner* berjumlah 6 orang.
- Kontrak dengan Wisma Bahtera Pelni Cipayung, sesuai kontrak nomor: 111/SPK/HBI/XI/2019 dengan jumlah tenaga pengamanan sebanyak 4 orang berlaku sampai Dengan 31 Oktober 2020.

b. Usaha Jasa Pelayanan Kebersihan (*Cleaning Service*)

Usaha Jasa Pelayanan Kebersihan (*Cleaning Service*) adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan tenaga kebersihan (*Cleaning Service*). Dalam kegiatan usahanya perusahaan melakukan kontrak dengan PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

- Sesuai Kontrak Nomor: TH.03.04-02/SS/2020 tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 untuk Pelayanan Kebersihan (*Cleaning Service*) pada 26 (dua puluh enam) kapal penumpang PT PELNI (Persero) sebanyak 320 orang petugas yaitu melaksanakan pekerjaan jasa pelayanan kebersihan, kerapihan dan higienisasi di ruang kelas ekonomi dan kamar mandi kelas ekonomi untuk kapal:
 - 1 (satu) kapal tipe 3000 yaitu KM. Labobar, jumlah petugas kebersihan sebanyak 19 orang.
 - 11 (sebelas) kapal tipe 2000 yaitu KM. Umsini, KM. Tidar, KM. Bukit Siguntang KM. Lambelu, KM. Sinabung, KM. Dorolonda, KM. Gunung Dempo, KM. Nggapulu, KM. Ciremai, KM. Dobonsolo dan KM. Kelud, masing-masing jumlah petugas kebersihan sebanyak 16 orang.
 - 9 (sembilan) kapal tipe 1000 yaitu KM. Bukit Raya, KM. Binaiya, KM. Leuser KM. Lawit, KM. Awu, KM. Tilongkabila, KM. Sirimau KM. Tatamailau, dan KM. Kelimutu, masing-masing jumlah petugas kebersihan sebanyak 10 orang.
 - 5 (lima) kapal tipe 500/RoRo yaitu KM. Sangiang, KM. Pangrango, KM. Wilis, KM. Egon, dan KFC. *Jetliner*, masing-masing jumlah petugas kebersihan sebanyak 6 orang.
- Kegiatan usaha yang menyediakan pelayanan dan pemeliharaan kebersihan, kerapihan, higienisasi di Gedung Kantor PT PELNI (Persero):
 - Kantor Pusat sesuai kontrak nomor TH.10.14-01/SS/2019 tanggal 1 September 2019, berakhir 31 Agustus 2020 dengan tenaga *cleaning service* 31 orang.
 - Kantor Cabang PT PELNI (Persero) Surabaya sesuai kontrak nomor: TH.03.31 02/SS/2020 tanggal 01 April 2020, berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 8 orang.
 - Kantor Cabang PT PELNI (Persero) Makassar sesuai kontrak nomor: TH.03.31-02/SS/2020 tanggal 01 April 2020, berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 6 petugas.
 - Kantor Cabang Tanjung Priok sesuai kontrak nomor TH.03.31-02/SS/2020 tanggal 01 April 2020, berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 4 orang.
 - Kantor PT PELNI (Persero) Kemayoran sesuai kontrak nomor: TH.03.31-02/SS/2020 tanggal 01 April 2020, berakhir tanggal 31 Desember 2020 sebanyak 3 orang.

f) Jasa pemeliharaan kebersihan gedung kantor PT PELNI (Persero) di 13 (Tiga Belas) cabang dengan kontrak nomor TH/02.21-03/SS/2020 tanggal 01 Januari 2020 dan berakhir 31 Desember 2020 total 17 orang.

- Pemeliharaan kebersihan dan perawatan taman gedung Kantor Pusat PT PELNI (Persero) dengan kontrak nomor: TH.03.18-01/SPK/2020 tanggal 01 April 2020 dan berakhir sampai dengan 31 Maret 2021 sebanyak 2 orang.
- Jasa *Cleaning Service* Rumah Sakit PELNI Nomor kontrak 067.P/Hkm/PT.PIDC/VIII/2019 dan 08.01/PKS/DIR/001/100/2019 terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Juli 2020.

c. Usaha Jasa Pengelolaan Kasur

Usaha Jasa Pengelolaan Kasur adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan tenaga untuk mengelola, merawat kasur di atas kapal penumpang PT PELNI (Persero). Dalam kegiatan usahanya perusahaan melakukan kontrak dengan PT PELNI (Persero) sesuai kontrak nomor: TH.1.22-03/SS/2020 tanggal 1 Januari 2020 berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 pada 24 (dua puluh empat) kapal penumpang PT PELNI (Persero) meliputi membersihkan dan memasang kasur pada setiap dek kelas Wisata/Ekonomi, mengontrol jumlah kasur dan menjaga kondisi kasur agar tetap dalam keadaan baik, dengan jumlah petugas kasur yang ditempatkan diatas kapal sebanyak 57 orang sbb:

- KM. Labobar, KM. Tidar, KM. Bukit Siguntang, KM. Lambelu, KM. Sinabung, KM. Dorolonda, KM. Gunung Dempo, KM. Nggapulu, KM. Umsini, KM. Ciremai, KM. Dorolonda dan KM. Kelud dengan tenaga masing-masing 3 orang.
- KM. Binaiya, KM. Leuser, KM. Lawit, KM. Awu, KM. Bukit Raya, KM. Tilongkabila, KM. Sirimau, KM. Tatamailau dan KM. Kelimutu dengan tenaga masing-masing 2 orang.
- KM. Wilis, KM. Sangiang dan KM. Pangrango dengan tenaga masing-masing 1 orang.

d. Usaha Jasa Pengelolaan Hiburan Band

Usaha Jasa Pengelolaan Hiburan Band adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan hiburan band di atas kapal penumpang PT PELNI (Persero). Dalam kegiatan usahanya Perusahaan melakukan kontrak dengan PT PELNI (Persero) sesuai kontrak nomor: TH.02.06-05/SS/2020 tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 pada 21 (dua puluh satu) kapal penumpang PT PELNI (Persero) untuk memberikan hiburan berupa *full band/organ tunggal* kepada penumpang kapal PELNI (Persero) pada jam yang telah ditentukan, yaitu:

- Full Band* terdiri dari 8 kapal: untuk KM. Umsini, KM. Tidar, KM. Bukit Siguntang, KM. Lambelu, KM. Sinabung, KM. Dorolonda, KM. Nggapulu. Semua *Full Band* berlaku 14 hari, Kecuali KM. Kelud berlaku 7 hari.
- Organ Tunggal terdiri dari 13 kapal : untuk KM. Labobar, KM. Gunung Dempo, KM. Bukit Raya, KM. Binaiya, KM. Leuser, KM. Lawit, KM. Awu, KM. Tilongkabila, KM. Ciremai, KM. Sirimau, KM. Tatamailau KM. Dobonsolo dan KM. Kelimutu. Semua Organ Tunggal berlaku 1 voyage/ 14 hari, Kecuali KM. Sirimau dan KM. Leuser berlaku 1 voyage/ 28 hari.

e. Usaha Jasa Pengelolaan Tenaga Janitor

Usaha Jasa Pengelolaan Tenaga Janitor adalah Usaha yang bergerak di bidang penyediaan tenaga Janitor. Dalam kegiatan usahanya perusahaan melakukan kontrak dengan PT PELNI (Persero),

- Kegiatan usaha yang menyediakan tenaga Janitor di Gedung Kantor PT PELNI sesuai kontrak nomor: TH.16.1-01/SS/2020 tanggal 1 Desember 2019 berakhir tanggal 30 November 2020 dalam rangka menunjang kegiatan operasional perusahaan diantaranya menciptakan lingkungan kerja yang bersih, teratur dan memberikan pelayanan kepada Pegawai PT PELNI (Persero) dengan jumlah tenaga Janitor 35 orang.
- Kegiatan usaha yang menyediakan tenaga Janitor di Kantor Cabang PT PELNI (Persero) Balikpapan, Bima, Tanjung Pinang, Nunukan, Kendari dan Ambon, sesuai kontrak nomor: TH.02.04-01/SPK/2020 tanggal 1 Januari 2020 berakhir tanggal 31 Desember 2020 dalam rangka menunjang kegiatan operasional perusahaan diantaranya menciptakan lingkungan kerja yang bersih, teratur dan memberikan pelayanan kepada Pegawai PT PELNI (Persero) dengan jumlah tenaga Janitor 11 orang.

f. Usaha Jasa *Manage Service*, *DCS*, *Contact Center* dan Laporan Perjalanan serta Jurnal Harian Kapal

Usaha Jasa *Manage Service* Embarkasi/Debarkasi dan *Frontliner*, *DCS*, *Contact Center* dan Laporan Perjalanan serta Jurnal Harian Kapal, di Cabang-Cabang PT PELNI (Persero):

- Manage Service* HB Cipayung, Surat Keputusan Nomor 002/SPK/HB/2/2020 tanggal 01 Maret 2020 berakhir tanggal 31 Desember 2021, dengan jumlah petugas sebanyak 25 orang.
- Pekerjaan *Handling Control Center* di PT PELNI (Persero) dengan kontrak No: TH.1.6-01/

SPK/2020 tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

3. Jasa layanan tiket kapal PT PELNI (Persero) dengan kontrak No: TH.1.22-02/SS/2020 tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
4. SDM *Contact Center* dengan PT SBN dengan Kontrak No. SBN/AGR/01.01-01/2020 tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
5. Pelayanan embarkasi/debarkasi dan *Frontliner* di kantor cabang PT PELNI (Persero) dengan kontrak TH.1.2-05/SS/2020 tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
6. Layanan *Departure Control System (DCS)* dan *Admin employ* dengan kontrak TH.12.30-01/SS/2019 tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2020.
7. Layanan input data laporan perjalanan dan jurnal harian kapal dengan kontrak No: TH.03.09-01/SPK/2020 tanggal 1 Januari 2020 berakhir tanggal 31 Desember 2020.
8. Jasa *entry data* di PT PELNI (Persero) dengan kontrak TH.11.13/02/SPK/2020 tanggal 1 Mei 2020 sampai dengan 1 April 2020.
9. Jasa pemeliharaan dan perawatan taman di Gedung Kantor Pusat PT PELNI (Persero) dengan kontrak: TH.03.18-01/SPK/2020 tanggal 1 April 2020 sampai dengan 31 Maret 2021.
10. Pekerjaan penyediaan jasa driver PT PELNI (Persero) dengan kontrak: TH/10.24-02/SS/2019 tanggal 1 November 2019 sampai dengan 31 Oktober 2020.
11. Pengadaan bilik virus removal chamber atau disinfektan di kantor pusat dan cabang-cabang PT PELNI (Persero) dengan kontrak: TH.05.05-03/SPK/2020 tanggal 1 April 2020 sampai dengan 15 Mei 2020.
12. Pengadaan Kasur ekonomi untuk kapal penumpang PT PELNI (Persero) dengan kontrak: TH.03.10-03/SS/2020 tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
13. Pengadaan Vitamin untuk ABK PT PELNI (Persero) dengan kontrak: TH.04.21-02/SPK/2020 tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020.

14. Pekerjaan Jasa Teknisi PT PELNI (Persero) Cab Surabaya dengan kontrak 12.23/05 SPL/095/2019 tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

15. Pekerjaan Jasa Teknisi PT PELNI (Persero) Cab. Pontianak dengan kontrak 10.16/01 SPL/095/2020 tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2021.

2. Kegiatan Usaha Komersial

a. Usaha Permakanan

Usaha Permakanan adalah usaha yang bergerak di bidang penyediaan bahan makanan penumpang dan awak kapal. Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan kontrak dengan PT PELNI (Persero) nomor: TH.02.11-01/SS/2020 tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir tanggal 31 Desember 2020 yaitu:

1. Tipe 3000: KM. Labobar
2. Tipe 2000: KM. Umsini, KM. Tidar, KM. Bukit Siguntang, KM. Lambelu, KM. Dorolonda, KM. Nggapulu, dan KM. Gunung Dempo
3. Tipe 1000: KM. Bukit Raya, KM. Binaiya, KM. Leuser, KM. Lawit, KM. Awu, KM. Tilongkabila, KM. Ciremai, KM. Sirimau, KM. Tatamailau, KM. Dobonsolo, KM. Kelimutu
4. Tipe 500: KM. Pangrango, KM. Sangiang dan KM. Wilis
5. Tipe Roro: KM. Egon

b. Usaha Sewa Kendaraan Dinas

Usaha Sewa Kendaraan Dinas adalah usaha yang bergerak di bidang penyewaan mobil dinas atas menyediakan kendaraan dinas untuk PT PELNI kantor pusat, cabang-cabang PT PELNI dan PT SBN dengan jumlah unit di tahun 2020 sebanyak 89 unit. Dalam kegiatan usahanya, Perusahaan melakukan kontrak kerjasama yaitu:

1. Sesuai kontrak dengan PT PELNI (Persero) nomor TH.12.12-02/SS/2017 tanggal 12 Desember 2017 dan berakhir 12 Desember 2020 tentang Pengadaan sewa kendaraan operasional gudang presmat Tanjung Priok Jakarta, yaitu Truk Hino Louhan FG 235JP Tahun 2017.
2. Sesuai kontrak dengan PT PELNI (Persero) Nomor TH.12.12-02/SS/2017 tanggal 12 Desember 2017 dan berakhir 12 Desember 2020 tentang Pengadaan sewa kendaraan operasional gudang presmat Tanjung Priok Jakarta, yaitu Truk Hino Louhan FG 235JP Tahun 2017.
3. Sesuai kontrak nomor: TH.10.10-02/SS/2017 tanggal 10 Oktober 2017 dan berakhir tanggal

10 Oktober 2020 tentang Pekerjaan sewa kendaraan dinas operasional PT PELNI (Persero) Kantor Pusat Tahun 2017 yaitu 2 unit Toyota Vios G A/T 1.5.

4. Sesuai Kontrak nomor: SBN/AGR/05.26-16/2019 tanggal 26 Mei 2019 dan berakhir tanggal 25 Mei 2021 tentang Pengadaan sewa menyewa kendaraan operasional PT SBN yaitu 3 unit mobil Pajero Sport Dakar 4x2 2.5 L A/T Tahun 2019.
5. Sesuai kontrak Nomor TH/05.08-03/SS/2020 tanggal 10 April 2020 dan berakhir tanggal 10 April 2021. Tentang pekerjaan sewa kendaraan dinas di kantor pusat PT PELNI (Persero), yaitu 3 unit Toyota Vios G A/T 1.5 Tahun 2015, 12 unit Toyota Innova G M/T 2.0 Tahun 2015 dan 6 unit Toyota Innova 2.0 Q A/T Venturer Tahun 2020.
6. Sesuai kontrak nomor TH.09.10-02/SS/2018 tanggal 9 Oktober 2018 dan berakhir tanggal 9 Oktober 2021. Tentang pekerjaan sewa kendaraan dinas Direksi PT PELNI (Persero), yaitu 6 unit Toyota Camry Hybrid 2.5 A/T Tahun 2019 dan 1 unit Toyota Alphard Tahun 2018.
7. Sesuai kontrak Nomor TH. 09.10-01/SS/2018 tanggal 10 September 2018 dan Berakhir tanggal 10 Oktober 2021. Tentang pekerjaan sewa 9 unit kendaraan untuk operasional kantor cabang PT PELNI (Persero), yaitu 9 unit Toyota Avanza G 1,3 M/T Tahun 2018.
8. Sesuai kontrak nomor TH.6.7-01/SS/2017 tanggal 7 Juni 2017 dan berakhir tanggal 7 Juni 2020. Tentang pekerjaan sewa kendaraan dinas operasional cabang, yaitu 3 unit Toyota Avanza G M/T 1.3 cabang A, 9 unit Toyota Avanza G M/T 1.3 cabang B & C dan 3 unit Toyota Avanza G M/T 1.3 cabang D.
9. Sesuai kontrak nomor TH.9.4-01/SS/2018 tanggal 4 September 2018 dan berakhir tanggal 8 Juli 2021. Tentang pekerjaan sewa 16 unit kendaraan untuk operasional kantor cabang PT PELNI (Persero) yaitu 16 unit Toyota Veloz 1,5 M/T Tahun 2015.
10. Sesuai kontrak nomor TH.6.7-01/SS/2017 tanggal 1 Juni 2017 dan berakhir tanggal 31 Mei 2020. Tentang pekerjaan sewa 16 unit kendaraan untuk operasional kantor cabang PT PELNI (Persero) yaitu 15 unit Toyota Avanza G M/T 1,3.
11. Pekerjaan sewa 15 unit Mitsubishi Expander 1.5 ke Bank BJB Cab Rasuna Said dengan pembaharuan PO setiap bulannya.

3. Kegiatan Usaha Jasa Maintenance & IT

a. Jasa Maintenance terdiri dari:

1. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan *Cargo Craine* di KM Kendhaga Nusantara 11 No. Kontrak : TH.09.01-03/SPK/2020.
2. Pengadaan Suku Cadang Separator No Kontrak: TH.09.18- /SS/2020.
3. Pengadaan barang dan Jasa Sofa Deck 5 & 6 KM Dobonsolo No. Kontrak: 09.16/04/ SPL/095/2020.
4. Pengadaan Barang dan Jasa *General Overhaul Motor* Induk Kanan di KM Papua Enam No. Kontrak: Th.09.14-01/SPK/2020.
5. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan FO Separator Kanan di KM Umsini No. Kontrak: TH.05.13-02/SPK/2020.
6. Pengadaan Sekrap Bawah Garis Kapal Penumpang yang beroperasi di bulan Juli dan Agustus Tahun 2020 No. Kontrak: TH.10.09-01/ SPK/2020.
7. Pengadaan Barang dan Jasa *General Overhaul Motor* Bantu No 2 & 3 KM Papua Enam No. Kontrak: TH.10.13-02/SPK/2020.
8. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Plafon, Lantai Granit dan *Awning* di KM Kelimutu No. Kontrak: TH.10.14-01/SPK/2020
9. Pengadaan Suku Cadang Mesin Separator No. Kontrak: TH.09.18-11/SS/2020.
10. Pengadaan Suku Cadang *Joint Ring Motor* Induk KM Ciremai No. Kontrak: 10.21/02/ SPL/095/2020.
11. Pelaksanaan 1 set Rumah *Blower* beserta *Blower AC* No. 10 KM Kelimutu No. Kontrak: 11.10/02/ SPL/095/2020.
12. Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan dan Jasa Pemasangan *Blower* Tekan Ruang Motor Bantu Kiri KM Kelimutu No. Kontrak: 11.13/03/ SPL/095/2020.
13. Pelaksanaan Pekerjaan Pembuatan dan Jasa Pemasangan *Blower E11 & Blower S2* KM Lawit No. Kontrak: 11.13/01/SPL/095/2020.
14. Pelaksanaan *Reefer Container* Daging KM Egon No. Kontrak: 11.10/04/SPL/095/2020.
15. Pelaksanaan *Reefer Container* Sayur KM Egon No. Kontrak 11.10/03/SPL/095/202
16. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan *Blower Exhaust Fan E-1, E-2, & E-7* KM Dorolonda No. Kontrak: TH.11.09-01/SPK/2020.
17. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Kamar Mandi *Deck 2, 3, 4 & 5* di KM Dobonsolo No. Kontrak: 11.09-02/SPK/2020.
18. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan *Condensor* dan *Evaporator* Mesin Es KM Lawit No. Kontrak: 11.10-02/SPK/2020,
19. Pengadaan Barang dan Jasa *General Overhaul Motor* Bantu Nomor 1 di KM Sabuk Nusantara 48 No. Kontrak: TH.11.10-01/SPK/2020.
20. Pelaksanaan Perbaikan Lantai Kamar Mandi

- No. 4205 & Irung-Irung Kamar Mandi 4204 KM Umsini No. Kontrak: 03.16/07/SPL/2020.
21. Pelaksanaan Perbaikan/Ganti Baru 15 pcs Lampu Kota LED 12 Watt & 45 pcs Lampu Kota 6 Watt KM Umsini No. Kontrak: 03.16/06/SPL/2020.
 22. Pelaksanaan Perbaikan Pipa WC dalam Dinding Kamar Serang & Dinding Salon Bintara KM Umsini No. Kontrak: 03.27/01/SPL/2020.
 23. Pelaksanaan Ganti Baru 1 unit AC Split 1 PK KFC Jetliner No. Kontrak: 02.28/02/SPL/095/2020
 24. Pelaksanaan Perbaikan Reefer Container Kanan KM Awu No. Kontrak: 02.28/01/SPL/095/2020.
 25. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Tutup Palka (McGregor) KM Lawit No. Kontrak: TH.05.27-01/SPK/2020.
 26. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Reefer Container di KM Tatamailau No. Kontrak: TH.06.08-01/SPK/2020.
 27. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Plat Tembaga Dudukan dan Rumah Fuse Consumer 380Volt (ECR) di KM Sirimau No. Kontrak: TH.04.02-01/SPK/2020.
 28. Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Kamar Mandi di KM Tatamailau No. Kontrak: TH.05.12-02/SPK/2020.
 29. Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Kamar Mandi di KM Tilongkabila No. Kontrak: TH.06.04-01/SPK/2020.
 30. Pengadaan Barang dan Jasa Pemasangan VynilTempat Tidur di KM Kelimutu No. Kontrak: TH.05.18-01/SPK/2020.
 31. Jasa Perbaikan Kamar Mandi di KM Lambelu No. Kontrak: TH.05.20-01/SS/2020.
 32. Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Blasting dan Coating Lantai Kayu di KM Kelimutu No. Kontrak: TH.05.06-1/SPK/2020.
 33. Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Blasting dan Coating Lantai Kayu di KM Lawit No. Kontrak: TH.05.07-2/SPK/2020.
 34. Pengadaan Barang dan Jasa Pemasangan Karpet Tile Kamar Kelas dan Salon di KM Lawit No. Kontrak: TH.05.08-01/SPK/2020.
 35. Pengadaan Barang dan Jasa Kamar Mandi KM Binaiya No. Kontrak: TH.07.06-01/SS/2020.
 36. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Lantai Kayu Deck 6 & 7 di KM Awu No. Kontrak: TH.07.15-01/SPK/2020.
 37. Perbaikan Kamar Mandi di KM Kelimutu No. Kontrak: TH.05.12-02/SS/2020.
 38. Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa General Overhaul Motor Induk Kiri dan Motor Induk Nomor 1 di KM Papua Enam No. Kontrak: TH.07.16-01/SPK/2020.
 39. Pengadaan Barang dan Jasa General Overhaul Motor Induk Kiri di KM Sabuk Nusantara 28 No. Kontrak: TH.07.17-01/SS/2020.
 40. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Lantai Kayu Deck 5, 6 dan 7 di KM. Tilongkabila No. Kontrak: TH.07.21-03/SPK/2020.
 41. Pelaksanaan Perbaikan Pintu Gandrum Ruang Ikan KM Lawit No. Kontrak: 08.25/02/SPL/095/2020.
 42. Pelaksanaan Perbaikan Body Luar Reefer Container Kiri & Kanan KM Tatamailau No. Kontrak: 08.25/01/SPL/095/2020.
 43. Pengadaan Barang dan Jasa General Overhaul Motor Bantu Nomor 1 dan Nomor 2 di KM Logistik Nusantara 3 No. Kontrak: TH.08.12-02/SS/2020.
 44. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Exhaust Blower AC & AHU di KM Binaiya No. Kontrak: TH.02.17-01/SPK/2020.
 45. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Kamar Mandi di KM Lawit No. Kontrak: TH.02.24-03/SS/2020.
 46. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Kamar Mandi di KM Kelud No. Kontrak: TH.02.18-01/SS/2020.
 47. Pekerjaan Perbaikan Exhaust Cam No 2 Motor Induk Kanan KM Tidar No. Kontrak: 02.17/10/SPL/095/2020.
 48. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Exhaust Blower & Blower AHU di Deck 7 di KM Bukit Raya No. Kontrak: TH.03.12-01/SPK/2020.
 49. Pengadaan Barang dan Jasa Pemasangan Karpet Tile Kamar Kelas dan Salon di KM Lawit No. Kontrak: TH.05.08-01/SPK/2020.
 50. Jasa Perbaikan Kamar Mandi di KM Kelimutu No. Kontrak: TH.05.12-02/SS/2020.
 51. Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Interior Deck 4 dan Area Pantry di KM Lawit No. Kontrak: TH.04.20-03/SPK/2020.
 52. Jasa Perbaikan Kamar Mandi di KM Nggapulu No. Kontrak: TH.1.8-02/SPK/2020.
 53. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Hot Water Boiler di KM Kelud No. Kontrak: TH.1.7-01/SPK/2020.
 54. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan AHU Nomor 1, 2, 3, 4, 6 dan 7 di KM Sirimau No. Kontrak: TH.1.22.-01/SPK/2020.
 55. Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Blasting dan Coating Lantai Kayu di KM Kelud No. Kontrak: TH.1.24-03/SPK/2020.
 56. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan AHU No 4 & 5 di KM Labobar No. Kontrak: TH.02.03-01/SPK/2020.
 57. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Mesin Es No 2 di KM Binaiya No. Kontrak: TH.02.06-01/SPK/2020.
 58. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan Ducting Isap, Tekan Blower AC dan AHU System di KM Leuser No. Kontrak: TH.1.16-01/SPK/2020
 59. Pengadaan Barang dan Jasa Perbaikan 2 Unit Reefer Container di KM Umsini No. Kontrak: TH.1.15-01/SPK/2020.
- b. Jasa IT terdiri dari:**
1. Sesuai kontrak nomor TH.05.04-03/SS/2020

tanggal 04 Mei 2020, kontrak berlaku terhitung sejak tanggal 21 Maret 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, tentang Penyediaan layanan sistem komunikasi kapal di 26 (dua puluh enam) kapal penumpang PT PELNI (Persero), yaitu menyediakan layanan sistem komunikasi di 26 kapal PT PELNI (Persero) untuk menunjang kegiatan operasional kapal dan melaksanakan pekerjaan instalasi, integrasi/Set Up perangkat dan jaringan yang mendukung pelaksanaan pekerjaan penyediaan sistem komunikasi diatas kapal.

2. Sesuai kontrak nomor: TH.09.02- /SPK/2020 tanggal 03 September 2019 dan berakhir pada tanggal 25 Oktober 2020. Tentang pengadaan dan instalasi perangkat cetak *Boarding Pass* mandiri di 5 (lima) cabang PT PELNI (Persero) yaitu Tanjung Priok, Surabaya, Makassar, Semarang dan Medan.

3. Pekerjaan Pemasangan *Outside Plant Fiber Optic (OSP-FO)* dengan PT Widjaya Globalindo No. Kontrak: TH.10.26/PKS/DIR/001/100/2020

4. Pengadaan Layanan Link BMKG dengan PT Nesmedia No. Kontrak: 05.29/SPK/DIR/001/2020.

4. Kegiatan Usaha Jasa Lain-Lain

- Tenaga kerja bongkar buat di gedung presmat Tanjung Priok dengan kontrak No:TH.1.10-01/SPK/2020.
- Penyedia jasa *driver* PT PELNI (Persero) dengan kontrak No: TH.10.24 -02/SS/2019.
- Usaha yang bergerak di bidang PerWismaan & *Outbond* yaitu Wisma Bahtera Tretes Jawa Timur dengan fasilitas 8 (delapan) bungalow dan 1 *meeting room*.



Di tahun 2020, di tengah volatilitas kondisi perekonomian global serta kondisi *new normal* pandemi COVID-19, PT PIDC tetap dapat menjaga kesinambungan bisnis dan manajemen pengelolaan Perseroan melalui penerapan protokol kesehatan yang tepat dan konsisten, sehingga performa profitabilitas PT PIDC tetap terjaga cukup baik.

“



Kinerja Bisnis PT PIDC Masih Terjaga Cukup Baik Meski Dalam Situasi Pandemi

Sepanjang tahun 2020, PT PIDC tetap mencatatkan pertumbuhan kinerja bisnis yang cukup baik, meski mengalami penurunan pada beberapa segmen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut terjadi karena Perseroan turut terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang berkepanjangan di 2020.

Capaian pertumbuhan kinerja bisnis yang tergolong masih cukup baik tidak terlepas dari upaya PT PIDC untuk terus fokus menjalankan bisnis utama Perseroan dan melakukan implementasi kebijakan strategis terkait pengelolaan biaya yang tepat dan efisien.

Analisis bisnis dan manajemen ini dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dari Laporan Keuangan PT PIDC untuk periode 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Di tahun 2020, di tengah volatilitas kondisi perekonomian global serta kondisi kenormalan baru pandemi COVID-19, PT PIDC tetap dapat menjaga kesinambungan bisnis dan manajemen pengelolaan Perseroan melalui penerapan protokol kesehatan yang tepat dan konsisten, sehingga performa profitabilitas PT PIDC tetap terjaga cukup baik.

Kondisi Ekonomi Global dan Nasional

Sebagaimana kita ketahui Bersama, pandemi COVID-19 adalah bencana yang bersifat global, yang mengakibatkan permasalahan besar tidak hanya dibidang kesehatan, namun juga menimbulkan permasalahan dibidang ekonomi, karena hampir diseluruh negara di dunia di sepanjang tahun 2020 ini mengalami kontraksi yang cukup dalam pada bidang ekonomi. Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap penurunan aktivitas perekonomian global secara drastis, sehingga menimbulkan resesi di hampir semua negara di dunia.

Pandemi COVID-19 menjadi tantangan sangat serius bagi prospek makro ekonomi global. Terlebih volatilitas pasar meningkat cukup tinggi, dikarenakan meningkatnya kekhawatiran investor.

Pandemi COVID-19 memang menimbulkan dampak luar biasa (*extraordinary*) terhadap perekonomian global. Berbagai indikator yang ada menunjukkan, bahwa aktivitas konsumsi, investasi, dan produksi di banyak negara tertekan tajam, sehingga mengakibatkan penurunan aktivitas perdagangan internasional.

Tekanan berat terjadi pada pasar keuangan, yang diakibatkan oleh ketidakpastian prospek ekonomi global. Apabila hal ini terus berlanjut, maka akan berisiko memberikan dampak rambatan pada stabilitas sistem keuangan.

Dilakukannya berbagai upaya pada sektor kesehatan dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 telah menyebabkan terbatasnya mobilitas dan kegiatan ekonomi, sehingga kemudian berdampak merugikan bagi pertumbuhan ekonomi maupun pasar keuangan global.

Dari sisi ekonomi global memang berkontraksi secara tajam, terutama pada semester I 2020. Kemudian, kondisi ekonomi perlahan mulai membaik pada semester II 2020. Hal ini didorong oleh kemajuan penanganan COVID-19, peningkatan mobilitas manusia, dan dampak stimulus kebijakan yang terintegrasi antar otoritas di berbagai negara.

Perbaikan ekonomi dunia memang didorong oleh peningkatan mobilitas dan dampak stimulus kebijakan yang berlanjut di berbagai negara, terutama Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.

Dengan perkembangan tersebut, perbaikan ekonomi global diperkirakan terus berlanjut dengan tumbuh di kisaran 5,0% pada tahun 2021, setelah berkontraksi 3,8% di tahun 2020.

Kecepatan perbaikan ekonomi global ke depan akan sangat dipengaruhi oleh implementasi vaksinasi, peningkatan mobilitas, dan berlanjutnya stimulus kebijakan fiskal dan moneter.

Perbaikan ekonomi global tersebut akan mendorong kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas dunia sesuai prakiraan sebelumnya.

Sementara itu, ketidakpastian pasar keuangan global diprakirakan menurun didorong oleh ekspektasi positif terhadap prospek perekonomian global seiring dengan ketersediaan vaksin, di tengah kondisi likuiditas global yang besar, suku bunga rendah dan tren pelemahan nilai tukar dolar Amerika Serikat.

Perkembangan ini kembali meningkatkan aliran modal ke negara berkembang dan mendorong penguatan mata uang berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sementara itu, ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (*c-to-c*) dibandingkan tahun 2019. Dari sisi

produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen.

Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen berkontraksi. Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang berkontraksi sebesar 14,71 persen.

Sesuai dengan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS), bahwa sepanjang tahun 2020 Indonesia mengalami Pertumbuhan Negatif sebesar Minus 2,07%. Pertumbuhan ekonomi yang negatif ini baru dialami Indonesia dalam 20 tahun terakhir sejak terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif tersebut, hampir seluruh dunia usaha di Indonesia mengalami penurunan.

Covid-19 memberikan tekanan kuat pada perekonomian Indonesia pada 2020, dengan sumber utamagejolak yang belum pernah dialami sebelumnya. Sebagaimana terjadi di global, gejala bersumber dari permasalahan kesehatan dan kemanusiaan, yang kemudian merambat ke permasalahan ekonomi.

Respon cepat Pemerintah untuk menahan penyebaran COVID-19 melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah berdampak pada penurunan kinerja perekonomian. Kebijakan tersebut telah mengurangi mobilitas manusia serta aktivitas barang dan jasa.

Konsumsi, investasi, transportasi, pariwisata, produksi, dan keyakinan pelaku ekonomi menurun signifikan. Itu pada akhirnya membuat pertumbuhan ekonomi turun dengan tajam.

Tinjauan Kinerja

Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap iklim bisnis di tanah air sebagaimana telah diurai diatas. Sama seperti entitas bisnis lainnya, PT PIDC juga sangat terdampak dari kondisi memburuknya situasi ekonomi nasional dikarenakan pandemi Covid-19.

Namun demikian, meski menghadapi situasi dampak ekonomi pandemi Covid-19 yang sangat tidak kondusif tersebut, PT PIDC ternyata tetap mampu menghasilkan kinerja bisnis yang masih relatif cukup baik di sepanjang tahun 2020.

Portofolio bisnis Perseroan secara umum di tahun 2020 tetap mampu bertumbuh dengan cukup baik, meskipun untuk beberapa segmen tidak berhasil melampaui target yang ditetapkan, dan terjadi

penurunan yang cukup signifikan, dibandingkan tahun sebelumnya 2019.

Kinerja Perusahaan pada tahun 2020 tercapai sebesar Rp22.468 juta atau 87,19% dari Anggarannya sebesar Rp25.769 Juta dan mengalami penurunan dibanding tahun 2019 sebesar 56,41%.

Penurunan terjadi baik dari sisi produksi, pendapatan dan laba bersih konsolidasi. Hal ini dampak dari kondisi Pandemi Covid-19 terutama di kuartal 1 di mana ada pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Larangan memasuki di beberapa Pelabuhan dan pengurangan kapasitas jumlah penumpang sampai 50%.

Posisi keuangan Konsolidasian PT PIDC dan Entitas anak tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp271.142 juta dan Laporan Arus Kas PTPIDC dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp14,642 juta.

Tinjauan Segmen Usaha

PT PIDC adalah Perusahaan yang kegiatan usahanya mendukung perusahaan Induk yaitu PELNISERVICES untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa PT PELNI dalam pelaksanaannya berdasarkan kontrak kerja dengan jangka waktu 1 (satu) tahun. Perusahaan menjalankan 4 segmen usaha dan memiliki 2 anak usaha. Segmen usaha yang dijalankan oleh Perusahaan adalah:

- 1. Usaha Jasa:**
 - *Cleaning Service*
 - Pengamanan
 - Janitor
 - Hiburan *Band*
 - *House Keeping*
 - *Manage Service/Frontliner*
- 2. Usaha Komersial:**
 - Bahan Baku Makanan, *Supplement Food, Air Mineral dan Mealbox*
 - Kendaraan Disewakan
 - Pinisi
 - Wisma Bahtera Tretes
- 3. Usaha Maintenance:**
 - Siskomkap
 - Bts Multi Operator
 - Maintenance Ahu, AC & *Chiler* Kapal
 - Renovasi & *Running Repair* Kamar Mandi
 - *Vending Machine*
- 4. Lainnya:**
 - *Driver Services*
 - Cover Kasur
 - Tenaga Kerja Bongkar Muat (Tkbm)

Laporan Laba (Rugi) Perusahaan per 31 Desember 2020

(Dalam Jutaan Rupiah)

NO.	URAIAN	TAHUN 2019 REALISASI AUDITED	RKAP	TAHUN 2020					TREND (%) 9=(6/3)
				PRAGNOSA	REALISASI AUDITED	CAPAIAN (%) 7=(6/4)	DEVIASI (%) 8=(6-5)/5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I PENDAPATAN USAHA									
A PENDAPATAN USAHA SENDIRI									
1	Usaha Jasa	112,263	92,822	89,813	100,149	107.89	11.51	89.21	
2	Usaha Komersial	285,412	220,161	207,953	186,614	84.76	(10.26)	65.38	
3	Usaha JMI	76,075	64,577	47,618	47,794	74.01	0.37	62.83	
4	Usaha Penunjang	6,978	40,794	27,559	29,981	73.49	8.79	429.65	
Jumlah Pendapatan Usaha Sendiri		480,727	418,354	372,942	364,539	87.14	(2.25)	75.83	
B PENDAPATAN USAHA ANAK									
1	PT PBN	4,127	3,968	3,278	3,215	81.01	(1.93)	77.89	
2	PT PANI	993	2,551	400	457	17.92	14.28	46.02	
Jumlah Pendapatan Usaha Anak		5,121	6,520	3,678	3,672	56.32	(0.17)	71.71	
JUMLAH PENDAPATAN USAHA		485,848	424,873	376,620	368,211	86.66	(2.23)	75.79	
II BIAYA USAHA									
A BIAYA USAHA SENDIRI									
1	Usaha Jasa	72,525	73,034	67,611	71,929	98.49	6.39	99.18	
2	Usaha Komersial	220,251	171,507	180,326	152,595	88.97	(15.38)	69.28	
3	Usaha JMI	65,823	54,838	41,628	44,659	81.44	7.28	67.85	
4	Usaha Penunjang	5,258	35,079	23,510	25,156	71.71	7.00	478.43	
Jumlah Biaya Usaha Sendiri		363,857	334,459	313,075	294,338	88.00	(5.99)	80.89	
B BIAYA USAHA ANAK									
1	PT PBN	3,627	2,963	1,479	1,297	43.78	(12.30)	35.77	
2	PT PANI	923	1,432	194	222	15.48	14.30	24.04	
Jumlah Biaya Usaha Anak		4,550	4,395	1,673	1,519	34.56	(9.21)	33.39	
JUMLAH BIAYA USAHA		368,406	338,854	314,749	295,857	87.31	(6.00)	80.31	
III LABA (RUGI) KOTOR USAHA		117,442	86,019	61,871	72,354	84.11	16.94	61.61	
IV BIAYA OVERHEAD		43,979	53,743	39,411	41,527	77.27	5.37	94.42	
V LABA (RUGI) BERSIH USAHA		73,462	32,276	22,460	30,827	95.51	37.25	41.96	
VI LABA (RUGI) DILUAR USAHA		(1,686)	(564)	(605)	(733)	129.97	21.07	43.49	
VII LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		71,777	31,712	21,854	30,093	94.90	37.70	41.93	
Bagian Kepemilikan Minoritas		(14)	(76)	10	44	(58.01)	323.58	(309.86)	
Estimasi Pajak Pph pasal 25		(20,220)	(5,867)	(4,808)	(7,669)	130.72	59.52	37.93	
VIII LABA (RUGI) KONSOLIDASI		51,542	25,769	17,056	22,468	87.19	31.73	43.59	

Pendapatan Usaha

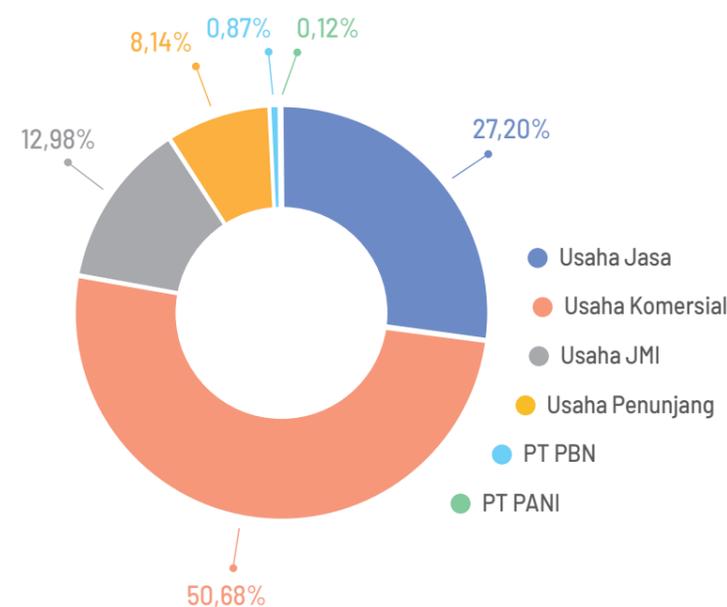
Pendapatan usaha tahun 2020 terealisasi sebesar Rp368.211 juta atau 86,66% dari anggaran sebesar Rp424.873 juta, dan menurun 24,21% dibandingkan dengan Pendapatan Usaha tahun 2019 sebesar Rp485.848 juta.

Pendapatan usaha tahun 2020 sebesar Rp368.211 juta terkontribusi dari:

1. Usaha Jasa sebesar 27,20 %.
2. Usaha Komersial 50,68 %.
3. Usaha JMI (Jasa Maintenance & IT) 12,98 %.
4. Usaha Penunjang 8,14 %.
5. Usaha Entitas Anak (PT PBN) sebesar 0,87 %.
6. Usaha Entitas Anak (PT PANI) sebesar 0,13 %.

Kontribusi pendapatan usaha tersebut tergambar dalam grafik sebagai berikut:

Kontribusi Pendapatan Usaha 31 Desember 2020



Biaya Usaha

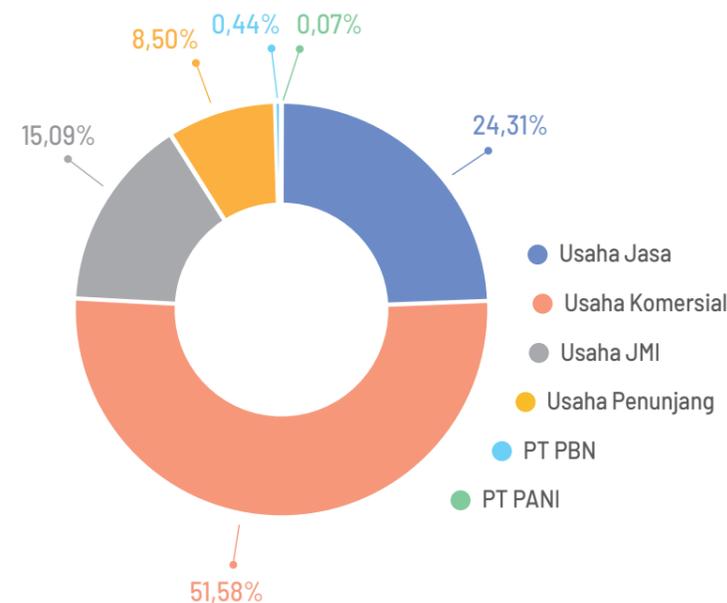
Biaya usaha tahun 2020 terealisasi sebesar Rp 295.857 juta atau 87,31% dari anggaran sebesar Rp 338.854 juta, dan hanya tercapai 80,31% dibandingkan dengan Biaya Usaha tahun 2019 sebesar Rp 368.406 juta.

Biaya usaha tahun 2020 sebesar Rp 295.857 juta terkontribusi dari:

1. Usaha Jasa sebesar 24,31 %.
2. Usaha Komersial 51,58 %.
3. Usaha JMI (Jasa Maintenance & IT) 15,09 %.
4. Usaha Penunjang 8,50 %.
5. Usaha Entitas Anak (PT PBN) sebesar 0,44 %.
6. Usaha Entitas Anak (PT PANI) sebesar 0,08 %.

Kontribusi Biaya usaha tersebut tergambar pada grafik di bawah ini:

Kontribusi Biaya Usaha 31 Desember 2020

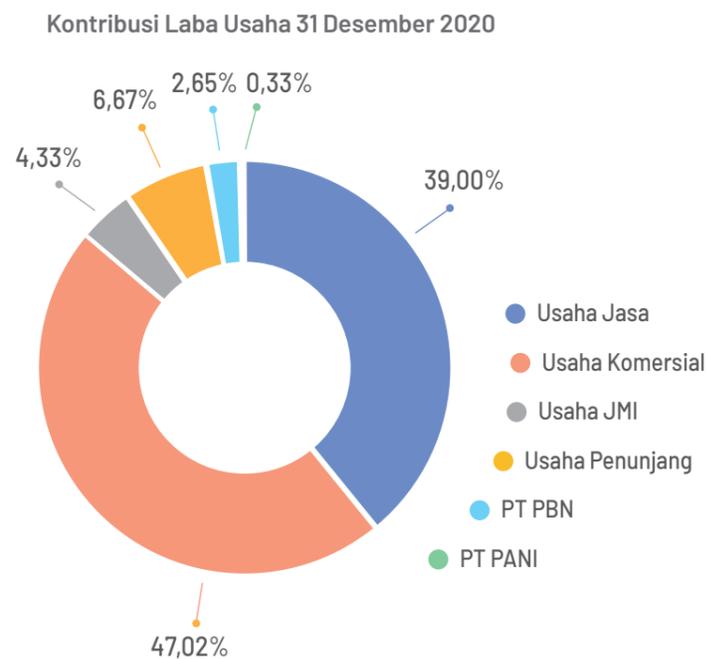


Laba Usaha

Laba usaha tahun 2020 terealisasi sebesar Rp72.354 juta atau 84,11 % dari anggaran sebesar Rp86.019 juta, dan hanya tercapai 61,61% dibandingkan dengan laba usaha tahun 2019 sebesar Rp117.442 juta.

Laba usaha tahun 2020 sebesar Rp72.354 juta berkontribusi dari:

1. Usaha Jasa sebesar 39,00 %
2. Usaha Komersial sebesar 47,02 %
3. Usaha Jasa *Maintenance & IT* sebesar 4,33 %
4. Usaha Penunjang sebesar 6,67 %
5. Usaha Entitas Anak (PT PBN) sebesar 2,65 %
6. Usaha Entitas Anak (PT PANI) sebesar 0,33 %



Berdasarkan data-data diatas, terlihat bahwa kontributor terbesar pendapatan usaha berasal dari segmen usaha komersial yang mengontribusi sebesar 50,68 % dari total pendapatan. Realisasi pendapatan usaha dari segmen usaha komersial ini adalah sebesar Rp186.614 juta atau 84,76 % dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp220.161 juta. Dan jika dibandingkan dengan tahun 2019 hanya tercapai 65,38 % dari pendapatan usaha jasa komersial di tahun 2019 sebesar Rp285.412 juta.

Sedangkan laba usaha dari segmen usaha komersial ini terealisasi sebesar Rp34.019 juta atau 69,92% dari anggaran sebesar Rp48.654 juta, dan tercapai 52,21% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp65.161 juta. Tahun 2020 laba usaha komersial memberikan kontribusi laba usaha sebesar 47,02% dari total laba usaha.

Sementara itu, kontributor pendapatan usaha terbesar kedua berasal dari segmen usaha jasa *outsourcing*, yang mengontribusi sebesar 27,20% dari total pendapatan. Realisasi pendapatan usaha dari segmen usaha jasa *outsourcing* tahun 2020 terealisasi sebesar Rp100.149 juta atau 107,89% dari anggaran sebesar Rp92.822 juta dan dibandingkan dengan tahun 2019 hanya tercapai 89,21% dari pendapatan usaha jasa *outsourcing* tahun 2019 sebesar Rp112.263 juta.

Sedangkan laba usaha dari segmen usaha jasa *outsourcing*, tahun 2020 terealisasi sebesar Rp28.220 juta atau 142,61% dari anggaran sebesar Rp19.788 juta, dan tercapai 71,02% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp39.738 juta. Tahun 2020 laba usaha jasa memberikan kontribusi laba usaha sebesar 39,00 % dari total laba usaha.

Berikutnya, kontributor pendapatan usaha terbesar ketiga adalah usaha jasa *maintenance & IT* yang mengontribusi sebesar 12,98% dari total pendapatan. Pendapatan usaha dari segmen jasa *maintenance & IT* pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp47.794 juta atau 74,01% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp64.577 juta dan jika dibandingkan dengan pendapatan tahun 2019 hanya tercapai 62,83% dari total pendapatan usaha jasa *maintenance & IT* tahun 2019 sebesar Rp76.075 juta.

Sedangkan laba usaha dari segmen usaha jasa *Maintenance & IT* tahun 2020 terealisasi sebesar Rp3.135 juta atau 32,19% dari anggaran sebesar Rp9.739 juta, dan tercapai 30,58% dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp10.252 juta. Tahun 2020 laba usaha Jasa *Maintenance & IT* memberikan kontribusi laba usaha sebesar 4,33 % dari total laba usaha.

Selanjutnya, kontributor pendapatan usaha terbesar yang keempat adalah usaha jasa penunjang yang memberikan kontribusi sebesar 8,14 % dari total pendapatan. Pendapatan usaha jasa penunjang tahun 2020 terealisasi sebesar Rp29.891 juta atau 73,49 % dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp40.794 juta dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 tercapai 429,65 % dari realisasi tahun 2019 sebesar Rp6.978 juta.

Sedangkan laba usaha dari segmen usaha jasa penunjang tahun 2020 terealisasi sebesar Rp4.825 juta atau 84,43% dari anggaran sebesar Rp5.715 juta, dan *trend* naik naik 180,52%, dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp1.720 juta. Tahun 2020 laba usaha penunjang memberikan kontribusi laba usaha sebesar 6,67% dari total laba usaha.

Kontributor pendapatan usaha selanjutnya adalah usaha entitas anak (PT PBN) yang memberikan kontribusi 0,87% dari total pendapatan. Pendapatan usaha entitas anak PT PBN tahun 2020 terealisasi sebesar Rp3.215 juta atau 81,01% dari anggaran sebesar Rp3.968 juta, dan jika dibandingkan dengan pendapatan usaha tahun 2019 hanya tercapai 77,89 % dari total pendapatan tahun 2019 sebesar Rp4.127 juta.

Untuk laba usaha Entitas anak PT PBN tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1.918 juta atau 190,85% dari anggaran sebesar Rp1.005 juta, dan naik 283,60% dibandingkan dengan laba usaha Entitas anak (PT PBN) tahun 2019 sebesar Rp500 juta. Tahun 2020 Entitas anak (PT PBN) memberikan kontribusi laba usaha sebesar 2.65 % dari total laba usaha.

Sementara itu, kontributor pendapatan usaha yang paling kecil adalah dari usaha entitas anak (PT PANI) yang memberikan kontribusi sebesar 0,13% dari total

pendapatan. Pendapatan usaha entitas anak PT PANI pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp457 juta atau 17,92% dari anggaran sebesar Rp2.551 juta, dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 Rp993 juta hanya tercapai 46,02 %.

Sedangkan laba usaha Entitas anak PT PANI tahun 2020 Rp235 juta atau 21,00% dari anggaran sebesar Rp1.119 juta dan tercapai 335,71% dibandingkan dengan laba usaha entitas anak (PT PANI) tahun 2019 sebesar Rp70. Tahun 2020 entitas anak (PT PANI) memberikan kontribusi laba usaha sebesar 0,33% dari total laba usaha.

Capaian Posisi Keuangan

Jumlah Aset

Jumlah Aset PT PIDC per 31 Desember 2020 menjadi sebesar Rp271.142 juta, atau 88,70% dari anggaran sebesar Rp305.683 juta, dan apabila dibandingkan dengan per 31 Desember 2019 sebesar Rp270.581 juta, maka *trend*-nya naik sebesar 0,21%.

Adapun rincian Posisi Keuangan Entitas sebagai berikut:

PERKIRAAN	AUDITED 31/12/2019	PROYEKSI 31/12/2020	AUDITED 31/12/2020	PROSENTASE	
				4 : 3	4 : 2
1	2	3	4	5	6
ASSET					
Asset Lancar	229.825	250.543	219.441	87,59%	95,48%
Asset Tetap	26.636	33.571	26.001	77,45%	97,62%
Asset Sewa Guna Usaha	10.859	17.496	15.355	87,76%	141,41%
Asset Tak Berwujud	928	1.720	960	55,82%	103,48%
Asset Dalam Penyelesaian	263	263	5.895	2241,42%	2242,28%
Asset Hak Guna Usaha	-	-	1.358	0,00%	0,00%
Asset Pajak Tangguhan	2.070	2.090	2.131	101,97%	102,93%
JUMLAH ASSET	270.581	305.683	271.142	88,70%	100,21%
LIABILITAS MODAL					
Liabilitas Lancar	93.718	101.123	88.316	87,34%	94,24%
Liabilitas Jangka Panjang	31.968	22.138	22.364	101,02%	69,96%
Liabilitas Sewa Jangka Panjang	-	-	1.365	0,00%	0,00%
Hak Minoritas	269	193	223	115,33%	82,67%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	5.040	6.950	5.771	83,04%	114,50%
Modal dan Cadangan	83.743	145.208	133.985	92,27%	160,00%
Saldo Laba (Rugi)	57.279	31.507	20.525	65,15%	35,83%
Komponen Ekuitas Lainnya	(1.436)	(1.436)	(1.407)	97,98%	97,95%
Ekuitas	139.586	175.279	153.326	87,48%	109,84%
JUMLAH LIABILITAS DAN MODAL	270.581	305.683	271.142	88,70%	100,21%

Laba Bersih Konsolidasian

Laba bersih Konsolidasi setelah pajak tahun 2020 adalah sebesar Rp22.468 juta, atau 87,19% dari anggaran sebesar Rp25.769 juta. Laba bersih konsolidasi ini hanya tercapai 43,59 % jika dibandingkan tahun 2019 yang nilainya sebesar Rp51.542 juta.

Capaian Penerimaan Dan Pengeluaran Kas (Cash Flow)

URAIAN	TAHUN	TAHUN 2020		PROSENTASE	
	2019	RKAP	REALISASI	CAPAIAN	TREND
1	2	3	4	5	6
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan Kas dari Pelanggan	438,130	327,768	354,158	108.05	80.83
Pembayaran Kepada Pemasok	(269,165)	(156,951)	(239,974)	152.90	89.16
Pembayaran Biaya Operasional	(109,105)	(145,168)	(103,600)	71.37	94.95
Pengeluaran Lain-lain	(3,093)	(166,51)	(2,099)	1,260.63	67.86
Pembayaran Pajak	(22,206)	(24,994)	(13,297)	53.20	59.88
Penerimaan Lain-lain	867	746	(213)	(28,55)	(24,55)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	35,428	1,234	(5,026)	(407.15)	(14,19)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Penambahan Deposito	-	-	-	-	-
Penambahan Aset Tetap	(18,642)	(17,731)	(14,421)	81.33	77.36
Pemasangan IT	-	(1,020)	(248)	-	-
Penambahan Aset Tak Berwujud	(313)	-	-	-	-
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(18,955)	(18,751)	(14,669)	78.23	77.39
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan Pinjaman Bank	-	-	5,000	-	-
Penerimaan dari Pemegang Saham	26,692	-	-	-	-
Pembentukan Cadangan	(29,117)	-	-	-	-
Penerimaan/Pembayaran Hutang Bank/Pihak III	-	5,000	(804)	-	-
Pembayaran Dividen	(202)	-	(8,867)	-	4,398.69
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(2,627)	5,000	(4,671)	- 93.43	177.81
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN SETARA KAS	13,846	(12,517)	(24,367)	194.67	- 175.99
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	27,221	41,013	41,067	100.13	150.86
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	41,067	28,496	16,700	58.60	40.66

Realisasi kas bersih sampai dengan akhir tahun 2020 yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp(5.026) juta atau sebesar (407,15)% dari RKAP tahun 2020 sebesar Rp1.234 juta, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp35.428 juta turun sebesar (14,19) %.

Sepanjang tahun 2020 dalam penggunaan dana, Entitas sangat selektif agar tepat sasaran, sehingga saldo akhir kas dan setara kas menjadi Rp16.700 juta atau 58,60 % dari RKAP tahun 2020 sebesar Rp28.496 juta dan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp41.067 juta, maka *trend*nya naik 40,66 %. Penggunaan dana sampai dengan akhir tahun 2020 dipergunakan untuk pembiayaan operasional dan investasi baik alat produksi dan alat penunjang.

Capaian Investasi

Realisasi investasi sampai akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp11.073 juta, atau 40,57 % dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp27.294 juta. Investasi terdiri dari alat penunjang produksi sebesar Rp7.835 juta, sarana penunjang sebesar Rp3.238 juta.

Anggaran investasi hanya terserap Rp11.073 juta diantaranya:

- Pengadaan mobil Dinas untuk kegiatan usaha sewa kendaraan terealisasi 1 unit toyota camry, 6 unit innova dan 15 unit expander.
- Perabot Kantor 18 unit.
- Penghancur sampah 4 unit.
- Pengadaan Gudang 1 Unit.

Adapun rincian investasi sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI 2019		RKAP 2020		REALISASI 2020		PROSENTASE	
	UNIT	JUMLAH	UNIT	JUMLAH	UNIT	JUMLAH	7:5	7:3
1	2	3	4	5	6	7	6	7
Alat Produksi								
Mobil Dinas:								
- Avanza Veloz	-	-	-	-	-	-	-	-
- Avanza	-	-	-	-	-	-	-	-
- Camry	6	5.641	1	958	1	958	100,00	16,98
- Alphard	-	-	-	-	-	-	-	-
- Innova	-	-	6	2.813	6	2.813	100,00	-
- Toyota Attis	-	-	23	11.684	-	-	-	-
- Truck Hino	-	-	-	-	-	-	-	-
- Expander	-	-	15	4.440	15	4.064	91,53	-
- Kapal Phinisi	1	7.298	-	-	-	-	-	-
Pelni TV	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Alat Produksi	7	12.939	45	19.895	22	7.835	39,38	60,55
Sarana Penunjang								
- Gedung Kantor	-	557	-	-	-	-	-	-
- Gudang	1	3.408	1	5.000	1	3.000	60,00	88,03
- Perawatan Hotel Tretes	1	263	-	-	-	-	-	-
- Komputer & Printer	28	150	-	-	-	-	-	-
- Perabotan Kantor	56	731	44	668	18	162	24,25	22,16
- Alat Band (3 Kapal)	3	460	-	-	-	-	-	-
- Penghancur Sampah	-	-	-	-	4	76	-	-
- Vacuum Cleaner	9	85	-	-	-	-	-	-
- Polisher	1	144	-	-	-	-	-	-
- Motor Honda	-	-	1	25	-	-	-	-
- Mobil Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-
- Forklip	-	-	1	336	-	-	-	-
- Mobil Box	1	327	1	350	-	-	-	-
- Speedboat	1	150	-	-	-	-	-	-
- Kendaraan Dinas Pajero	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Alat Penunjang	101	6.275	48	6.379	23	3.238	50,76	51,60
Software	1	313	1	1.020	-	-	-	-
Jumlah Investasi	109	19.527	94	27.294	45	11.073	40,57	56,71

Kinerja Entitas

Dengan upaya-upaya yang telah dilakukan sepanjang tahun 2020, secara umum Kinerja Entitas adalah sebagai berikut:

- Laporan Keuangan Entitas telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO" sesuai dengan laporannya Nomor: LAI: 00030/2.0768/AU.I/05/0486-I/IV/2020, 10 Mei 2021 dengan Pendapat "Wajar dalam semua hal yang material".
 - Laba bersih Konsolidasi setelah pajak tahun 2020 sebesar Rp22.468 juta atau 87,19% dari anggaran sebesar Rp25.769 juta dan hanya tercapai 43,59 % dibanding tahun 2019 sebesar Rp51.542 juta.
 - Total Asset per 31 Desember 2020 sebesar Rp271.142 juta atau naik 0,21 % dari total Asset per 31 Desember 2019 sebesar Rp270.581 juta.
- Tingkat Kesehatan Entitas yang dinilai berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 yang meliputi Aspek Keuangan, Aspek Operasional, dan Aspek Administrasi. Sesuai Laporan Kantor Akuntan Publik "HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO" Nomor: AU115/01/ISS/I/21 tanggal 10 Mei 2021 mencatat dengan kriteria SEHAT kategori AA dengan nilai skor 90.00.
- Capaian kinerja Entitas berbasis *Key Performance Indicator (KPI)* untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sesuai Laporan Kantor Akuntan Publik "HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO" Nomor: AU115/01/ISS/I/21 tanggal 10 Mei 2021, Capaian Nilai Skor 84,96 Nilai Maksimal Skor 100,00.
- Untuk *Market Share Growth* realisasi tahun 2020 adalah sebesar 75,81%.
 - Rasio Entitas sebagai berikut:
 - Rasio Likuiditas:
 - Current Rasio* tahun 2020 sebesar 228,02% dan ditahun 2019 sebesar 245,23%.
 - Cash Ratio* tahun 2020 sebesar Rp 15,36% dan ditahun 2019 sebesar 43,76%.
 - Rasio Aktivitas:
 - Collection Period* tahun 2020 103 hari dan ditahun 2019 *Collection* Periode 56 hari.
 - Total Asset Turn Over* tahun 2020 sebesar 139,04% dan ditahun 2019 179,99%.

c. Rasio Rentabilitas:

- Gross Profit Margin* tahun 2020 sebesar 19,62% dan ditahun 2019 sebesar 24,14%.
- EBITDA Margin tahun 2020 sebesar 8,83 % dan tahun 2019 sebesar 15,23 %.

6. Realisasi investasi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp11.073 juta atau 40,57% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp27.294 juta.

7. Pembuatan Aplikasi ERP, absensi menggunakan *mobile simpeg*, portal PIDC, pembayaran gaji karyawan produksi menggunakan aplikasi simpeg, aplikasi *dashboard invoice* dan aplikasi WMS (*Warehouse Management System*).

Kelangsungan Usaha

Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 mempengaruhi kinerja seluruh sektor industri di tanah air. PT PIDC pun turut terkena dampak langsung dari kondisi memburuknya situasi perekonomian nasional dikarenakan pandemi Covid-19 tersebut.

Namun demikian, Manajemen Perusahaan merasa optimis, bahwa pandemi COVID-19 tidak berpengaruh signifikan pada fundamental perusahaan dan tidak mempengaruhi kelangsungan bisnis perusahaan dalam jangka panjang.

Karena berdasarkan Analisa Perusahaan, tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan. Perusahaan meyakini hal ini berdasarkan:

1. Tingkat Kesehatan Entitas yang dinilai berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 yang meliputi Aspek Keuangan, Aspek Operasional, dan Aspek Administrasi. Sesuai Laporan Kantor Akuntan Publik " HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO" Nomor: AU114/01/ISS/I/21 tanggal 10 Mei 2021 mencatat dengan kriteria SEHAT kategori AA dengan nilai skor 90.00.

2. Perusahaan tetap berhasil membukukan pendapatan usaha yang cukup baik di tahun 2020 yaitu sebesar Rp368.211 juta, atau 86,66% dari anggaran sebesar Rp424.873 juta, meskipun mengalami penurunan sebesar 24,21% dari tahun 2019.

3. Rasio-rasio keuangan sebagaimana disajikan dalam ikhtisar kinerja keuangan menunjukkan,

bahwa Perusahaan tetap dalam kondisi likuid, *solvable*, dan *profitable*.

4. Tidak terdapat gugatan hukum yang menuntut pailit terhadap Perusahaan.

Prospek Usaha Ke Depan

Berbagai upaya Pemerintah R.I. untuk menjaga stabilitas perekonomian diharapkan menjadi faktor pendukung dan basis fundamental bagi proses pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi Covid-19.

Sepanjang 2020, Bank Indonesia menurunkan suku bunga kebijakan sebanyak 5 (lima) kali sebesar 125 bps menjadi 3,75% pada akhir 2020, level terendah sepanjang sejarah. Penurunan dilakukan pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Februari, Maret, Juni, Juli, dan November 2020 masing-masing sebesar 25 bps. Keputusan penurunan suku bunga dilakukan secara terukur dan bertahap dengan mempertimbangkan inflasi dan menjaga daya saing aset keuangan domestik serta stabilitas eksternal, serta sebagai upaya untuk mendorong pemulihan ekonomi.

Bank Indonesia juga telah melakukan injeksi likuiditas Rupiah sekitar Rp726,57 triliun (sekitar 4,7% dari PDB), terutama penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) sekitar Rp155 triliun dan ekspansi moneter sekitar Rp555,77 triliun hingga 31 Desember 2020.

Proses pemulihan didukung langkah mitigasi pandemi yang diambil Pemerintah, bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah-langkah akselerasi penanganan pandemi dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan.

Langkah yang dilakukan Pemerintah antara lain kebijakan refocusing dan realokasi anggaran kegiatan nonprioritas, serta pemberian stimulus untuk penanganan dampak pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Stimulus tersebut diberikan antara lain melalui insentif pajak, tambahan

belanja negara, serta pembiayaan anggaran untuk menangani masalah kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan kepada dunia usaha dan pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 juga telah dirancang menjadi *instrumen countercyclical* untuk menangani pandemi Covid-19 dan menolong rakyat dan dunia usaha khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar segera bangkit. Belanja negara menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan belanja untuk penanganan Covid-19 di bidang kesehatan, perlindungan sosial, serta pemulihan ekonomi.

Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan berbagai strategi dan upaya yang dilakukan, Pemerintah sangat optimis, bahwa pertumbuhan ekonomi nasional akan kembali menggeliat di tahun 2021.

Ke depan, prospek perekonomian Indonesia diprakirakan akan kembali menguat. Kemajuan penanganan *pandemic* Covid-19, termasuk penggunaan vaksin, performa ekonomi global yang menguat, stimulus kebijakan makroekonomi, serta berbagai upaya penajaman strategi kebijakan akan mendukung optimisme dalam penguatan ekonomi.

Vaksinasi dan disiplin penerapan protokol COVID-19 menjadi prasyarat bagi proses pemulihan ekonomi nasional. Dengan dukungan berbagai faktor tersebut, proyeksi ekonomi Indonesia tumbuh pada kisaran 3,5%-5,1% pada 2021. Inflasi juga diprakirakan tetap terkendali di 2,7%

Seiring dengan langkah penanganan COVID-19 yang terus ditingkatkan Pemerintah sebagaimana telah diurai di atas, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun diyakini akan semakin membaik, mulai tahun 2021 dan seterusnya.

Karena itu, Perusahaan merasa optimis bahwa di tahun 2021 dan di tahun-tahun selanjutnya, bisnis Perusahaan akan kembali membaik dan akan kembali bertumbuh dan berkembang dengan pesat, sebagaimana pada tahun-tahun sebelum pandemi.

Program Kepemilikan Saham oleh karyawan dan/atau Manajemen yang dilaksanakan Perusahaan (ESOP/MSOP)

Sampai dengan tahun 2020, Saham Perusahaan dimiliki oleh PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar 99,50% dan Yayasan Kesejahteraan Pensiunan Pelni sebesar 0,50%. Oleh karena itu tidak terdapat program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP).

Informasi Transaksi Material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan kepemilikan dalam kegiatan usahanya:

NO.	PIHAK-PIHAK BERELASI	SIFAT HUBUNGAN PIHAK-PIHAK BERELASI	TRANSAKSI
1.	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Entitas induk	Hutang piutang
2.	PT Pelita Bandar Nasional	Entitas anak	Penyertaan, hutang-piutang
3.	PT PANI	Entitas anak	Penyertaan, hutang piutang



Perusahaan berupaya untuk memberikan kontribusi positif kepada seluruh pemangku kepentingan dengan menjalankan pengembangan usaha yang selaras dengan pengembangan masyarakat dan lingkungan.

“



Berkomitmen Turut Mengangkat Kemandirian Lingkungan Masyarakat Sekitar Perusahaan



PT PIDC mempunyai komitmen yang kuat untuk melakukan *Corporate Social Responsibility (CSR)* terhadap warga masyarakat di lingkungan sekitar perusahaan beroperasi, maupun lingkungan masyarakat pada umumnya.

Perusahaan berprinsip, tidak hanya beroperasi dengan membangun kinerja bisnis terbaik, namun Perusahaan juga turut memikirkan lingkungan dan masyarakat di sekitar lingkup usahanya. *CSR* dari PT PIDC merupakan wujud dari komitmen berkesinambungan perusahaan ini untuk memberikan kontribusi yang positif dan bermanfaat bagi lingkungan masyarakat di sekitar perusahaan, maupun lingkungan masyarakat pada umumnya.

Karena itu PT PIDC memberikan perhatian yang besar terhadap implementasi program *CSR* Perusahaan, khususnya untuk memastikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam bisnis telah dilaksanakan dengan baik.

Perusahaan berupaya mengelola program-program *CSR* secara profesional, memiliki target terukur dan berkelanjutan, agar dapat memberikan dampak bermakna bagi lingkungan dan masyarakat sekitar

Perusahaan memahami, bahwa kesuksesan bisnis tidak hanya diukur dari pencapaian keuntungan, melainkan juga ditinjau dari kemampuan perusahaan mengusahakan kepentingan *stakeholders*-nya.

Memandang kelangsungan atau keberlanjutan usaha merupakan prioritas utama bisnis. Hal ini dapat dicapai jika Perusahaan mampu membangun keseimbangan yang harmonis antara kepentingan komersial/profit, sosial dan lingkungan hidup.

Perwujudan *CSR* dari Perusahaan pada setiap tahunnya terus berusaha untuk ditingkatkan, baik dari sisi kualitasnya, maupun kuantitasnya.

Seluruh program *CSR* yang dijalankan Perusahaan didasari oleh ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas.

Tujuan Implementasi *CSR*

Kami memandang *CSR* sebagai kontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, membantu meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat serta memberi perhatian terhadap lingkungan sekitar sesuai etika bisnis yang dijalankan. Kami menyakini

implementasi *CSR* akan memberikan banyak manfaat bagi Perusahaan. Keberhasilan implementasi *CSR* dalam jangka panjang diyakini berpengaruh terutama pada aspek tumbuhnya kepercayaan, terciptanya keharmonisan dan meningkatkan reputasi yang pada gilirannya memiliki implikasi pada penciptaan nilai tambah yang mendorong kelancaran kestabilan dan pertumbuhan usaha Perusahaan.

Metode Program *CSR*

Kami merancang dan melaksanakan program *CSR* secara sistematis dan terpadu. Pelaksanaan *CSR* dilakukan dengan metode partisipatif, yaitu dengan memberdayakan potensi daerah yang ada agar dapat meningkatkan kemampuan, penghasilan dan kemakmuran secara berkelanjutan. Kami melakukan evaluasi dan monitoring atas program-program *CSR* yang dilakukan agar program-program *CSR* tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Program *CSR*

Pelaksanaan *CSR* Perseroan terbagi menjadi 4 (empat) program utama, yaitu:

- 1  **Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan**
- 2  **Tanggung Jawab Sosial Terhadap Karyawan**
- 3  **Tanggung Jawab Sosial Terhadap Masyarakat**
- 4  **Tanggung Jawab Sosial Terhadap Konsumen**

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan Hidup

Implementasi tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup serta untuk mengeliminasi konflik lingkungan dan sosial disekitar perusahaan diwujudkan dalam program yang mengacu kepada perundangan dan peraturan terkait serta dari *best practice* yang ada dengan kegiatan strategi sebagai berikut:

- Program *Green Office* yaitu dengan menerapkan berbagai penghematan, seperti hemat kertas dengan memaksimalkan penggunaan *e-mail (softcopy)*, penggunaan kertas bekas ataupun *print* bolak-balik, penghematan listrik serta hemat air melalui sosialisasi dan anjuran. Program tersebut dapat memberikan manfaat nyata seperti pengurangan biaya operasional, peningkatan efisiensi, dan juga peningkatan citra perusahaan.

Dampak Dari Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Hidup

Selama tahun 2020 aktivitas dari pelaksanaan CSR bidang lingkungan hidup, memberikan dampak positif yaitu terjaganya kelestarian lingkungan, meningkatnya citra perusahaan dan terjaganya proses bisnis perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Karyawan

Perusahaan memiliki komitmen untuk melaksanakan Tanggung jawab terhadap karyawan. Pelaksanaan komitmen tersebut mencakup antara lain mencakup aspek-aspek kesetaraan dan kesempatan kerja yang sama, pelatihan dan pengembangan karyawan, serta upaya peningkatan pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja dalam menjalankan setiap kegiatan.

Dampak Dari Tanggung Jawab Sosial Terhadap Karyawan

Perusahaan menyakini sepenuhnya bahwa dengan berkontribusi terhadap pegawai yang semakin tinggi manfaatnya akan dirasakan kembali oleh perusahaan dengan meningkatnya profitabilitas Perusahaan di tahun 2020.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Masyarakat

Tanggung Jawab Sosial terhadap masyarakat yaitu dengan menerapkan pemberdayaan komunitas serta mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDG's)*.

Program Kerja

Tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat diimplementasikan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Bantuan Pendidikan
Memberikan bantuan sponsorship untuk kegiatan dalam menunjang pendidikan dalam kegiatan seminar.
2. Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan Kesehatan
Berpartisipasi dalam kegiatan donor darah, memberikan sumbangan ke panti asuhan dan bantuan kepada korban bencana alam.
3. Bantuan Keagamaan
Memberikan bantuan sumbangan ke tempat ibadah dan membantu perbaikan/renovasi rumah ibadah.

Dampak Dari Tanggung Jawab Sosial Kepada Masyarakat

Perusahaan menyakini kegiatan Tanggung Jawab kepada masyarakat akan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan Perusahaan. Disadari bahwa dalam jangka pendek kegiatan CSR belum dapat dirasakan, namun dipastikan secara tidak langsung akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja Perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial Terhadap Konsumen

Sesuai visi Perusahaan, PT PIDC berkomitmen untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Konsumen dalam rangka menjaga kepercayaan. Adapun program kerja terkait tanggung jawab sosial terhadap Konsumen, PT PIDC melakukan kegiatan berupa Program Penanganan Keluhan Konsumen.

Dalam menyelesaikan keluhan Konsumen secara efektif dan cepat, melakukan koordinasi dengan tahapan:

- Penerimaan keluhan dari Konsumen;
- Analisa permasalahan yang dikeluhkan oleh Konsumen dan ditindak lanjut oleh bagian terkait ada kemungkinan harus bekerjasama dengan Mitra;
- Identifikasi alternatif solusi;
- Penentuan solusi;
- Implementasi solusi;
- Penyampaian penyelesaian keluhan kepada Konsumen;
- Dokumentasi & evaluasi seluruh keluhan yang masuk untuk kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan dan inovasi proses kerja, sehingga mampu menghasilkan produk dan layanan yang memenuhi tuntutan bisnis dan harapan Konsumen.



PT PIDC sangat menyadari, teknologi informasi dalam bisnis adalah untuk memberikan dukungan yang efektif atas strategi bisnis Perusahaan, agar dapat memperoleh keunggulan yang kompetitif.

“





Perkembangan teknologi dari pengaruh era globalisasi sekarang ini begitu pesat, yang diiringi dengan perkembangan sistem informasi yang berbasis teknologi. Hal ini telah menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang begitu cepat dalam berbagai bidang.

Teknologi informasi (TI) dalam hal ini merupakan salah satu tiang penopang keberhasilan dalam era globalisasi. Pentingnya teknologi informasi dalam bisnis adalah untuk memberikan dukungan yang efektif atas strategi bisnis perusahaan, agar dapat memperoleh keunggulan yang kompetitif.

Teknologi informasi dapat mengembangkan berbagai produk, layanan, dan kemampuan yang memberikan keunggulan besar atas tekanan kompetitif dalam pasar global.

Teknologi informasi dapat mengembangkan berbagai produk, layanan, dan kemampuan yang memberikan keunggulan besar atas tekanan kompetitif dalam pasar global. Karena itulah, salah satu cara agar Perseroan dapat bersaing adalah dengan menggunakan sistem teknologi informasi yang handal.

Tersedianya sistem teknologi informasi yang memadai, tentunya sudah merupakan tuntutan atau kebutuhan dari perusahaan, tak terkecuali PT PIDC. Secara strategis, sistem teknologi informasi juga dapat berperan membantu kelancaran berbagai proses administrasi dan pengelolaan perusahaan.

Perkembangan teknologi informasi semakin berkembang pesat dan persaingan bisnis yang semakin kompetitif mengharuskan Perusahaan untuk menata dan membenahi kualitas layanan yang

berbasis teknologi informasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dan masyarakat.

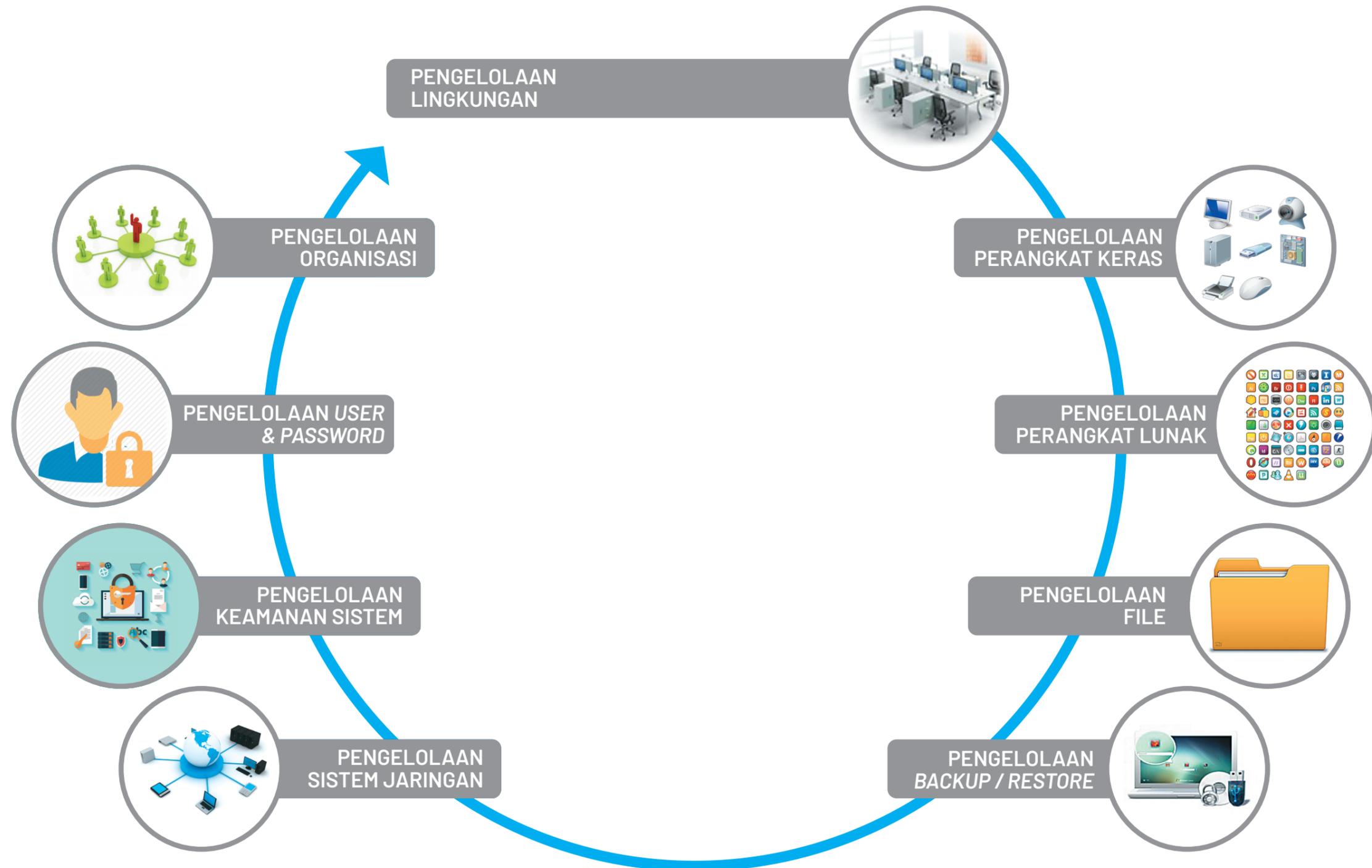
Karena itu, PT PIDC sangat memandang penting peran sistem Teknologi Informasi dalam keberlangsungan usahanya selama ini. Karena itu, Perusahaan secara berkala terus berusaha menyempurnakan sistem teknologi informasi yang dipergunakannya selama ini.

PT PIDC juga selalu terus mengamati perkembangan terbaru (*up date*) dari sistem teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan untuk membantu kelancaran proses administasi, maupun membantu mengoptimalkan program-program bisnis dari Perseroan.

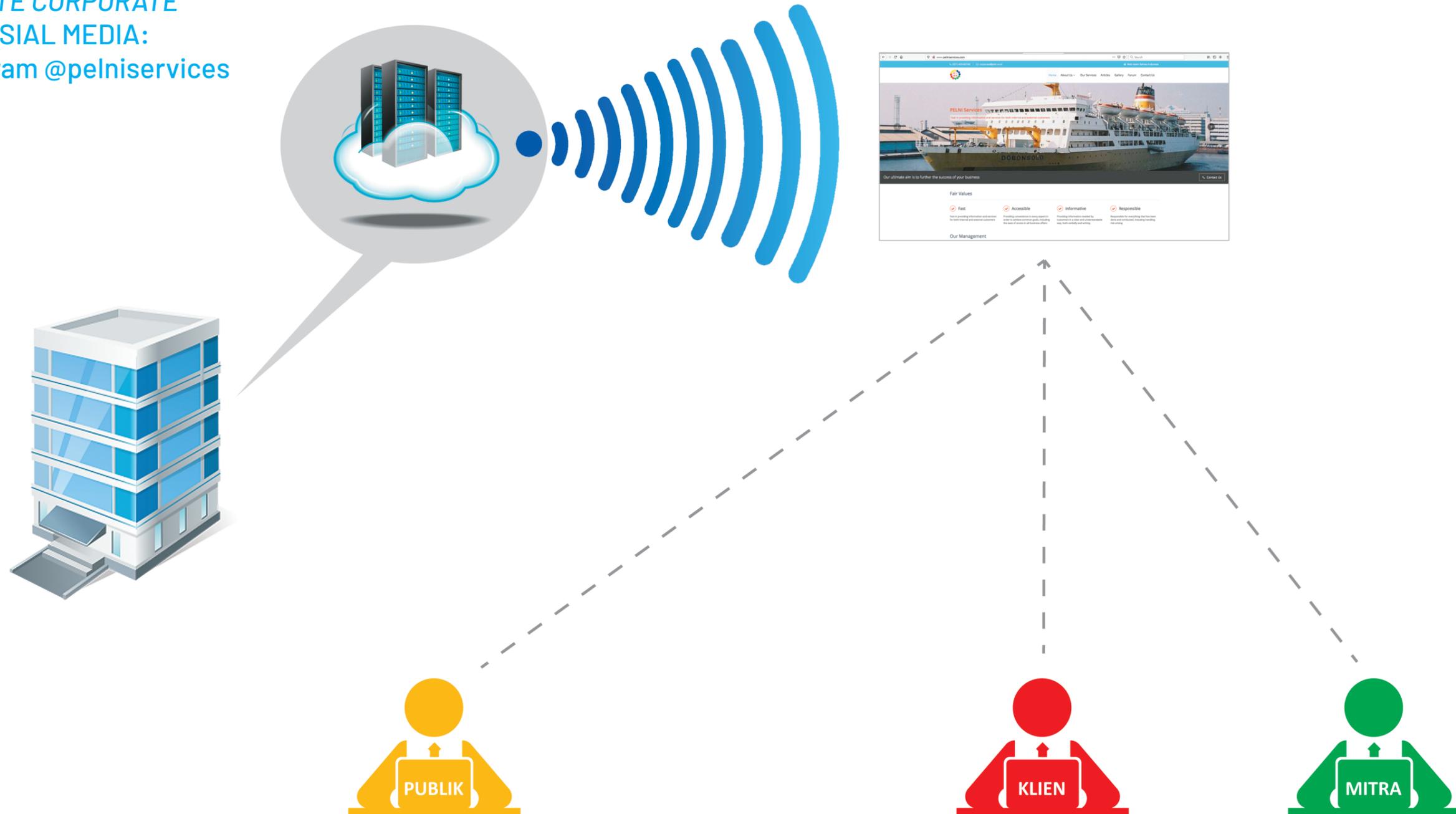
Dan apabila sistem teknologi informasi terbaru tersebut dipandang layak untuk diaplikasikan di Perusahaan, PT PIDC tidak akan ragu untuk bisa menerapkan sistem baru tersebut, guna mengejar pertumbuhan bisnis Perusahaan yang lebih baik untuk ke depannya.

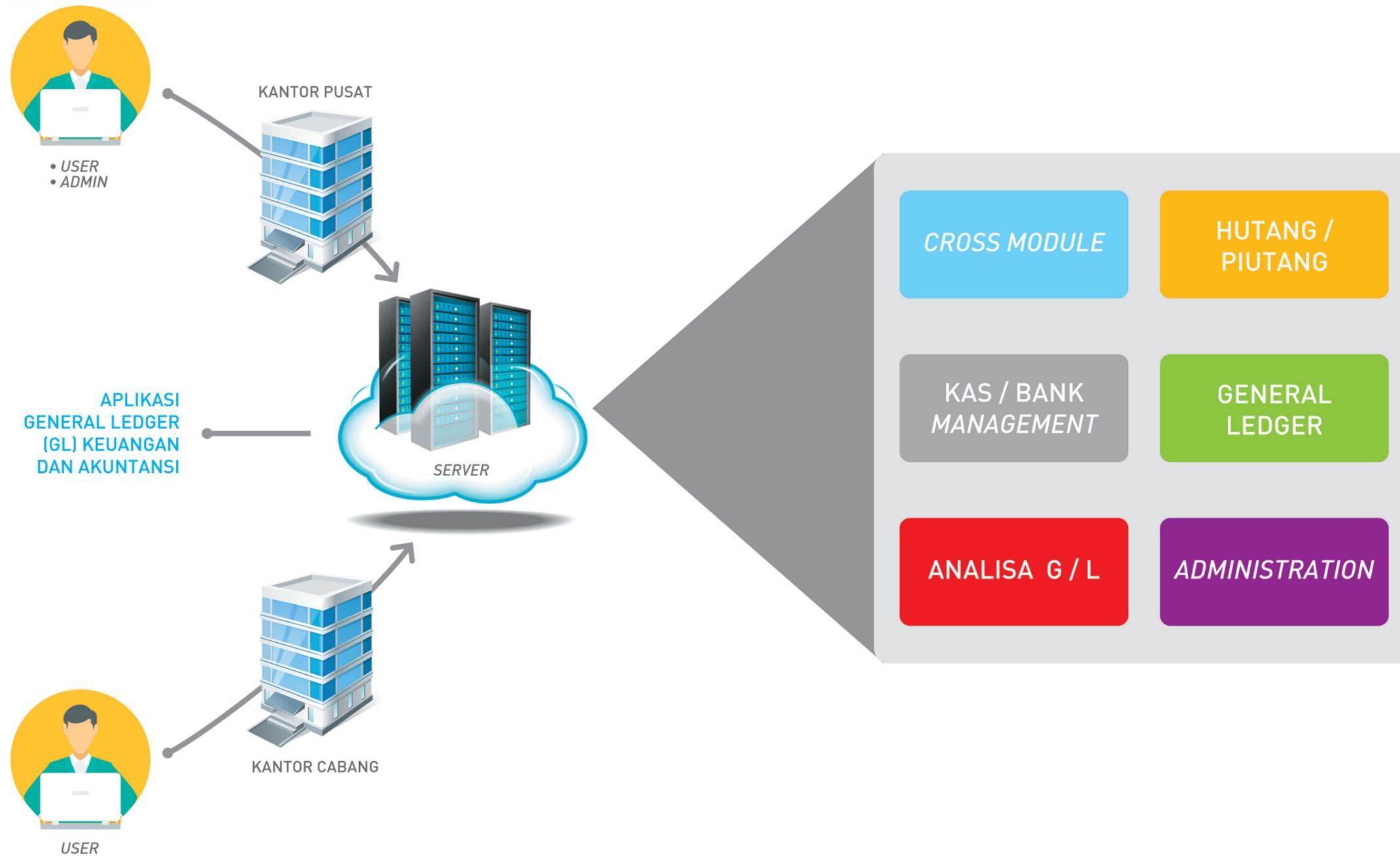
Teknologi merupakan kunci utama yang memungkinkan PT PIDC menyediakan produk dan jasa kepada konsumen, mengukur dan menelusuri kinerja bisnis, serta mengambil keputusan-keputusan manajemen yang tepat untuk kelangsungan usahanya.

Pada tahun 2020 PIDC terus melakukan pengembangan dan penyempurnaan teknologi informasi di perusahaan.



WEBSITE CORPORATE
dan SOSIAL MEDIA:
Instagram @pelniservices



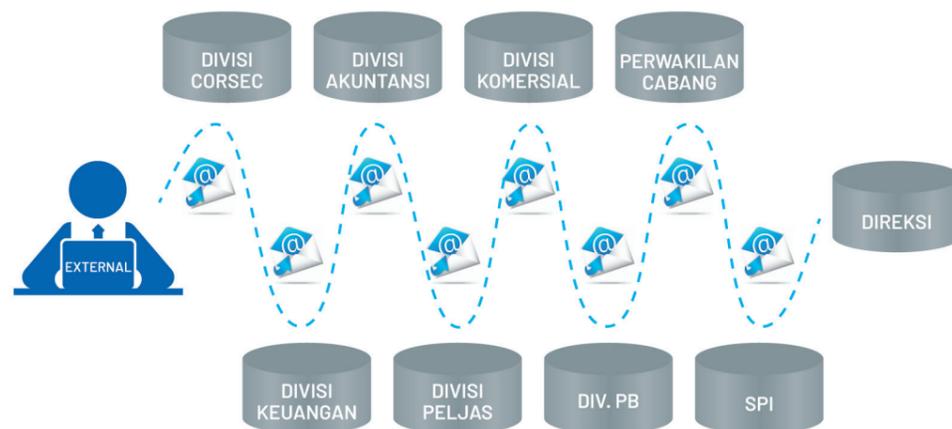


Teknis Tata Kelola Surat Elektronik (E-Mail)

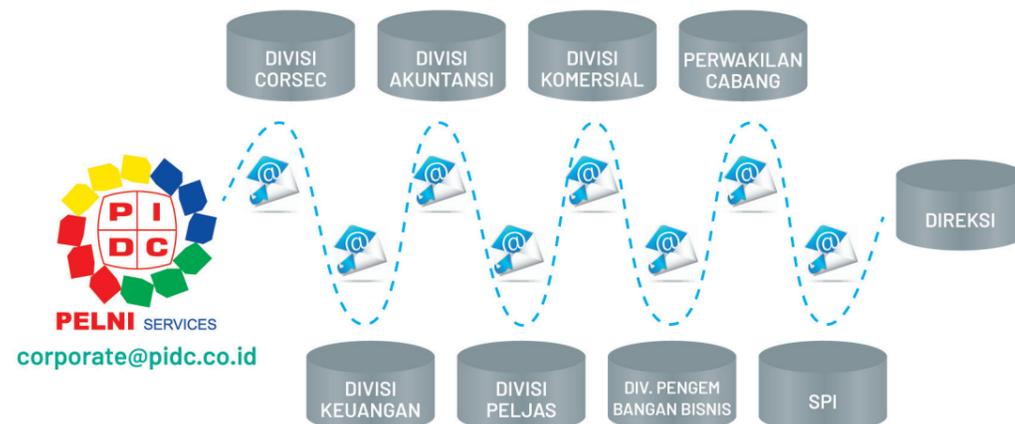
1. User external kirim email ke alamat corporate@pidc.co.id sebagai main email PT PIDC



Atau User external kirim email langsung ke account email divisi unit kerja/account email Direksi.



2. PIC email corporate @ PT PIDC.co.id share email ke masing-masing email divisi unit kerja dan email Direksi.

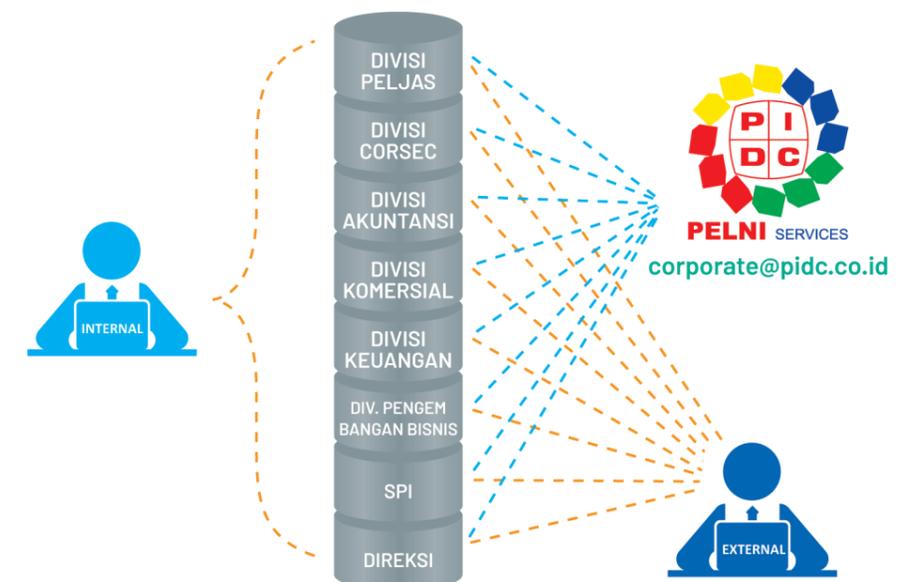


Catatan:

PIC back Up berkala attachment email masuk (24 hour x 1), dan di kelola rapih sebagai database/dokumentasi dengan media external HDD (hardisk). PIC diberikan hak akses pada account email direksi (direktur Utama dan Direktur Operasi).

System Response

3. Pada saat merespon email pihak user external tersebut tiap Divisi unit kerja atau Direksi diperkenankan merespon langsung melalui account email Divisi / Direksi masing-masing di cc: ke email corporate@pidc.co.id (main email).



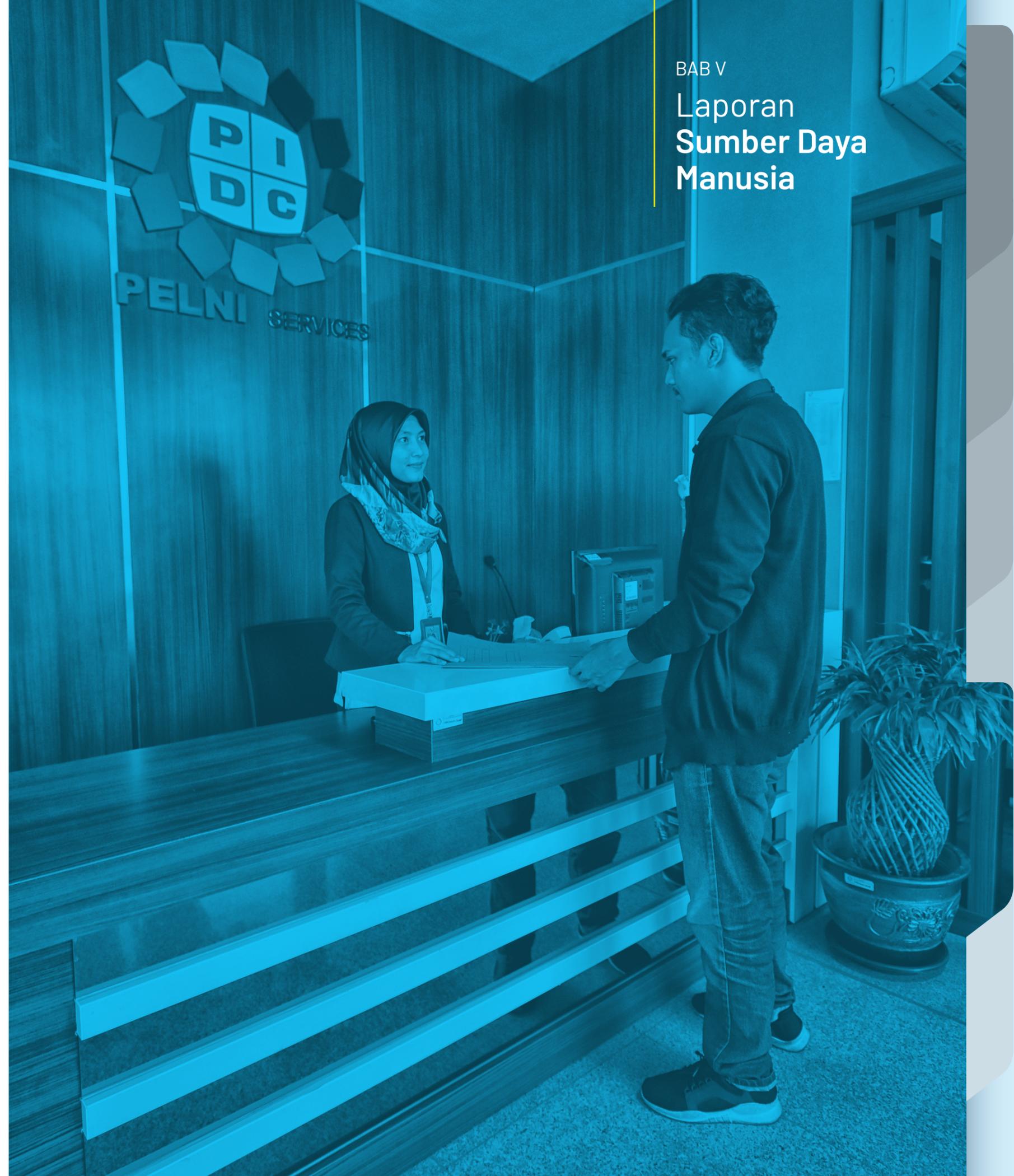
Dari account Gmail ptpidc@gmail.com ke account email corporate@pidc.co.id

1. Jika pihak user external kirim email ke account Gmail pada saat merespon harus via email corporate@pidc.co.id.
2. Tidak diperkenankan merespon email pihak ke-3 melalui account Gmail.
3. Selama masa peralihan tersebut, account Gmail hanya untuk menerima email pihak ke-3.
4. Account Gmail dapat digunakan untuk merespon apabila terjadi kendala, dan proses maintenance pada account corporate.
5. Account Gmail tetap dapat di akses oleh masing-masing divisi unit kerja.
6. Account personal domain @pidc.co.id digunakan untuk pekerjaan yang bersifat teknis operasional.
7. Hubungi dan laporkan bila ada kendala pada saat pelaksanaannya ke Staff IT.



Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu yang memegang peranan penting dalam kelangsungan bisnis perusahaan. Dengan manajemen yang bagus dan terarah terkait pengelolaan SDM, akan menghasilkan sebuah kinerja yang positif bagi kelangsungan usaha, dan unggul di tengah persaingan yang semakin ketat.

“



Peningkatan Kapasitas SDM PT PIDC Agar Menjadi Handal, Tangguh dan Up Date Sesuai Kebutuhan Zaman

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu yang memegang peranan penting dalam kelangsungan bisnis perusahaan. Dengan manajemen yang bagus dan terarah terkait pengelolaan SDM, akan menghasilkan sebuah kinerja yang positif bagi kelangsungan usaha, dan unggul di tengah persaingan yang semakin ketat.

PT PIDC sebagai perusahaan yang terus bertumbuh dan berkembang dengan sangat pesat, seiring dengan perkembangan bisnis Perusahaan yang semakin membesar, maka untuk bisa menjalankan dengan optimal pertumbuhan tersebut, hal itu membutuhkan peran serta menyeluruh dari segenap komponen sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki perusahaan.

Bagi PT PIDC perkembangan signifikan bisnis yang dijalankannya memunculkan tuntutan terhadap kecukupan SDM, baik dari segi jumlah (kuantitas) maupun dari segi kompetensi (kualitas).

Karena itu, Perusahaan sangat menganggap penting tentang SDM ini. Karena Perusahaan menyadari bahwa SDM sangat berpengaruh terhadap kesuksesan perusahaan ini ke depannya.

Dalam pencapaian tujuannya, SDM mempunyai fungsi mengelola input yang dimiliki Perusahaan secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang diharapkan.

Pengembangan SDM di lingkungan Perusahaan didasari pada sebuah filosofi yaitu membentuk SDM yang disiplin, profesional, dan *visioner*. Pengembangan SDM tersebut dititikberatkan pada peningkatan *skill*, *knowledge*, dan *attitude* yang implementasinya dilakukan melalui pelaksanaan program pelatihan yang bersifat teknis, manajerial, dan kepemimpinan, *on job training*, penugasan (mutasi dan rotasi), dan promosi jabatan.

PT PIDC sangat menyadari, mengelola SDM sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan menjadi sangat penting. Sebab seiring dengan perkembangan teknologi yang terus berubah mengakibatkan persaingan usaha menjadi semakin ketat. Untuk itu

dibutuhkan sebuah organisasi yang solid dan siap dalam menghadapi setiap perubahan yang terus terjadi dalam dunia bisnis.

Mengingat sangat pentingnya keberadaan SDM bagi Perusahaan, karena itu Perusahaan selama ini secara rutin dan kontinyu terus melakukan berbagai kegiatan pembinaan bagi para SDM, guna meningkatkan kapabilitas, dan profesionalisme. SDM PT PIDC secara berkala dikirim guna mengikuti pelatihan-pelatihan dari berbagai bidang atau disiplin ilmu yang terkait dengan bisnis perusahaan maupun manajemen pengelolaan perusahaan.

Pembinaan SDM secara internal memang selalu dilakukan untuk semakin menghasilkan output kerja yang optimal. Di sisi lain, Perusahaan juga berusaha untuk membuat para SDM-nya didalam melaksanakan pekerjaannya dalam keadaan yang tenang dan nyaman. Guna mengejar hal tersebut, Perusahaan menerapkan remunerasi yang pantas dengan memperhitungkan *skill*, maupun masa kerja dari SDM tersebut. Karena Perusahaan meyakini dengan suasana kerja atau lingkungan kerja yang menyenangkan akan membuat karyawan bekerja secara lebih optimal

PT PIDC menyadari SDM merupakan aset strategis paling berharga guna mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Dalam pengelolaan SDM, agar terbentuk hubungan kerja yang harmonis antara manajemen dengan karyawan maupun antar sesama karyawan, kami bersama dengan wakil karyawan semua satuan kerja telah memiliki Peraturan Perusahaan yang mengacu pada Induk Perusahaan.

Perusahaan memperlakukan SDM sebagai aset yang paling berharga secara adil dan menghargai setiap kontribusi yang diberikan tanpa memandang unsur *gender* maupun ras. Perusahaan menjamin hak dan kewajiban setiap Karyawan dengan mematuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Kegiatan Sumber Daya Manusia di Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Perusahaan telah melakukan beragam kegiatan terkait dengan fokus Manajemen SDM sebagai berikut:

Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sesuai Perkembangan Perusahaan.

Dengan bertambahnya kegiatan perusahaan, telah diadakan penyesuaian dan perubahan organisasi menuju efektifitas dan efisiensi pengelolaan organisasi yang optimal, perubahan Struktur Organisasi PT Pelita Indonesia Djaya (PT PIDC) sesuai Surat Keputusan Direksi PT Pelita Indonesia Djaya Nomor: 09.30/DIR/SK/001/100/2020 tanggal 30 September 2020 Tentang Struktur Organisasi dan *Job Description* PT Pelita Indonesia Djaya adalah sebagai berikut:

1) Organisasi Kantor Pusat

Unsur Pimpinan adalah Dewan Direksi yang bekerja secara kolektif dan beranggotakan:

- a. Direktur Utama
Menentukan, memutuskan dan menetapkan strategi perencanaan serta pelaksanaan seluruh kegiatan Perusahaan di antaranya internal audit, *legal and contract*, *corporate secretary* di mana seluruh kegiatan tersebut dikaitkan dengan usaha pencapaian visi dan misi Perusahaan.
- b. Direktur Operasi
Direktur Operasi membawahi Divisi Pelayanan Jasa, Komersial, dan JMI.
- c. Direktur Keuangan
Membawahi Divisi Keuangan dan Divisi SDM & Umum.

2) Unsur Jabatan fungsional terdiri dari:

Satuan Pengawas Intern (SPI), merupakan unit kerja yang secara teknis dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama.

3) Unsur Jabatan struktural terdiri dari:

- a. Divisi Pelayanan dan Jasa, merupakan unit kerja yang secara teknis dipimpin oleh seorang Senior Manager Pelayanan dan Jasa terdiri atas unit kerja:
 - Manager Pelayanan (Laut)
 - Manager Pelayanan (Darat)
- b. Divisi Komersial, merupakan unit kerja yang secara teknis dipimpin oleh seorang Senior

Manager Komersial dan terdiri atas unit kerja:

- Manager pengelolaan aset dan Pengelolaan Usaha
- *Manager Supplement Food*
- Manager Bahan Makanan

c. Divisi JMI, merupakan unit kerja yang secara teknis dipimpin oleh seorang Senior Manager JMI, terdiri atas unit kerja:

- *Manager Maintenance*
- *Manager IT*

d. Divisi Keuangan, merupakan unit kerja yang secara teknis dipimpin oleh seorang Senior Manager Keuangan dan terdiri atas unit kerja:

- Manager Akuntansi
- Manager Keuangan

e. Divisi SDM dan Umum merupakan unit kerja yang secara teknis dipimpin oleh seorang Senior Manager SDM dan Umum dan terdiri atas unit kerja:

- Manager SDM & Umum
- Manager Kesekretariatan dan Hukum

f. Divisi Pengadaan barang dan/atau jasa Perusahaan adalah kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Perusahaan yang pembiayaannya berasal dari anggaran internal Perusahaan atau anggaran eksternal Perusahaan yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa. Secara teknis dipimpin oleh seorang Senior Manager Pengadaan yang terdiri dari:

- Manager Pergudangan

4) Organisasi Entitas Anak Perusahaan

Cabang2 berfungsi sebagai representative kantor pusat, bukan sebagai anak perusahaan.

Ada 9 kantor operasional:

Belawan, Tg. Priok, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, Baubau, Ambon, Kupang.

5) Organisasi Entitas Anak Perusahaan

a. PT. PELITA BANDAR NASIONAL (PT. PBN) adalah anak perusahaan PT PIDC yang didirikan pada tanggal 28 Juni 1989 dengan Akta Pendirian nomor 19 tertanggal 28 Juni 1989 Notaris Atmadji, SH dan dirubah dengan Akta nomor: 05 tanggal 21 November 2017 Zahrullah Amrozi Johar, SH. Organisasi PT Pelita Bandar Nasional (PT PBN) dipimpin oleh seorang Direktur sebagai penanggungjawab pengelolaan perusahaan dan membawahi atas unit kerja:

- Bagian Terminal
- Bagian Keuangan

- b. Sebagai tindak lanjut program kerja tahun 2020 sebagai pengembangan usaha di bidang asuransi, maka didirikan entitas anak perusahaan di bidang pialang asuransi dan diberi nama PT Pialang Asuransi Nasional Indonesia Jaya disingkat PT PANI dengan Akta Pendirian:
- Surat Keputusan MenkumHam RI Nomor: AHU-0040074.AH.01.01 tahun 2019
 - Ijin usaha operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: KEP-29/NB/2019 tentang pemberian ijin usaha di bidang pialang asuransi kepada PT Pialang Asuransi

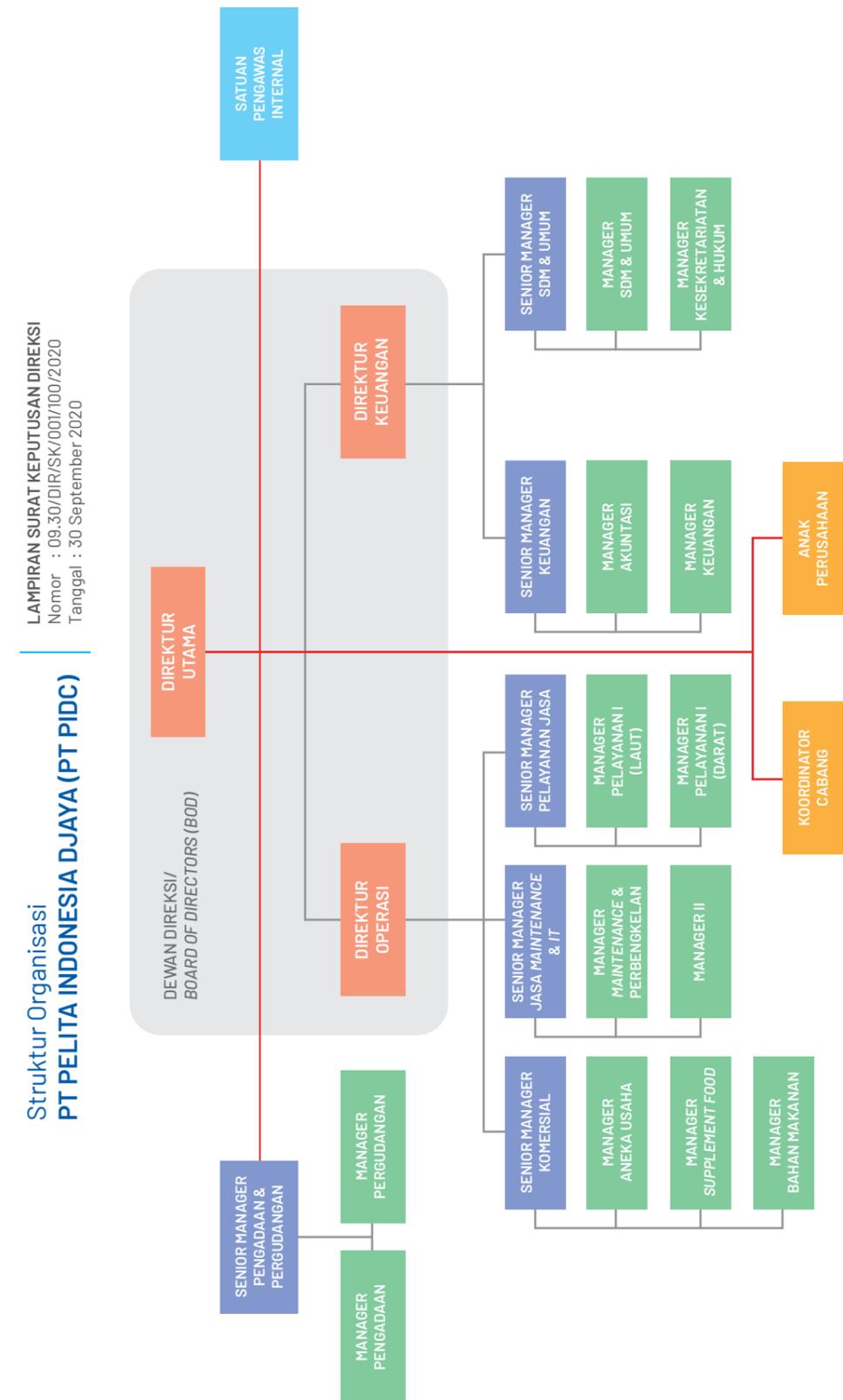
Nasional Indonesia Djaya tanggal 21 Agustus 2019.

- Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-1350/NB/122/2019 tanggal 11 September 2019 perihal Penyampaian Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pemberian ijin usaha di bidang pialang asuransi kepada PT Pialang Asuransi Nasional Indonesia Jaya. Apparindo member No: 254-2019/Apparindo/2019.
- Alamat kantor Perkantoran Pulomas satu gedung 1, lantai 2 ruang 12. Jl Ahmad Yani No.2 Pulomas Jakarta Timur, Phone +62 (021) 22478889 email mail@pani.co.id



Bagan Organisasi

Struktur organisasi yang digunakan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pelita Indonesia Djaya Nomor: 09.30/DIR/SK/001/100/2020 tanggal 30 September 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Job Description PT Pelita Indonesia Djaya sebagai berikut:



Sumber Daya Manusia

1. Jumlah dan Komposisi Pegawai

Hingga akhir tahun 2020, total pegawai Perusahaan dan anak Perusahaan tercatat mencapai 1409 orang yang terdiri dari 1398 pegawai Perseroan dan 11 orang ditempatkan di Anak Perusahaan, rincian pegawai berdasarkan jenjang jabatan, unit kerja, status kepegawaian dan pendidikan adalah sebagai berikut:

Komposisi Pegawai berdasarkan Jenjang Jabatan

JENJANG JABATAN	JUMLAH
Direktur	1 Orang
Kepala SPI	1 Orang
Senior Manager & Plt. Senior Manager	6 Orang
Manager & Plt. Manager	7 Orang
Asisten Manager	11 Orang
Staf (Kantor Pusat)	107 Orang
Karyawan Produksi	1.265 Orang
Anak Perusahaan	11 Orang
Total	1.409 Orang

STATUS KEPEGAWAIAN	JUMLAH
Kontrak	1357 Orang
Tetap	52 Orang
Total	1.409 Orang

Komposisi Pegawai berdasarkan Unit Kerja

UNIT KERJA	JUMLAH
Kantor Pusat	133 Orang
Security Gedung & Kapal	376 Orang
Cleaning Service Gedung & Kapal	498 Orang
Janitor/Presmat/Teknisi	56 Orang
Departure Control System	98 Orang
Manage Service	19 Orang
Frontliner	6 Orang
Crew Kapal Pinisi	4 Orang
Driver	13 Orang
Call Center/Operating Room/Entry Data	20 Orang
E-Ticketing/Loket	110 Orang
Petugas Kantor	8 Orang
Embarkasi Debarkasi	57 Orang
Anak Perusahaan	11 Orang
Total	1.409 Orang

Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Perseroan secara berkelanjutan berusaha mempertahankan komposisi tingkat pendidikan pegawai dalam rangka menyesuaikan dengan tuntutan perubahan bisnis. Komposisi pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan secara lengkap tersaji di bawah sebagai berikut:

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH
Strata 2 (S.2)	9 Orang
Strata 1 (S.1)	233 Orang
Diploma	37 Orang
≤ SMA	1130 Orang
Total	1.409 Orang

2. Kebutuhan Pegawai

Dengan bertambahnya unit usaha dan meningkatnya kegiatan perusahaan, maka Manajemen mengadakan Restrukturisasi Organisasi Perusahaan sesuai Surat Keputusan Direksi PT Pelita Indonesia Djaya Nomor:09.30/DIR/SK/001/100/2020 tanggal 30 September 2020 Tentang Struktur Organisasi dan *Job Description* PT Pelita Indonesia Djaya.

Berkenaan dengan perubahan struktur Organisasi Perusahaan dengan merampingkan Struktur Organisasi sebelumnya yang mana masih terdapat Unit Pengembangan Bisnis kemudian dihapuskan dan digantikan dengan unit Pengadaan dan Pergudangan. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memisahkan pengadaan dan pergudangan dari unit yang lain agar dapat memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan.

3. Remunerasi Pegawai

Penentuan dan pemberian remunerasi pegawai tunduk pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk batas Upah Minimum Provinsi (UMR), Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan terkait lainnya.

- Tunjangan Hari Raya Gaji Ke-13 SK Direksi Nomor 05.18/DIR/SK/001/100/2020.
- Pemberian Jasa Produksi Tahun 2019 1 (satu) bulan gaji ke-16 SK Direksi Nomor: 08.27/DIR/SK/001/100/2020.
- Pemberian Tunjangan Pendidikan gaji ke-14 SK Direksi Nomor:10.01/DIR/SK/001/100/2020.
- Pemberian gaji ke-15 akhir tahun 2020 SK Direksi Nomor:12.22/DIR/SK/001/100/2020.

4. Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Pemberian jaminan kesehatan kepada pegawai, perusahaan mengikutsertakan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada BPJS Kesehatan, dan untuk kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan selain program yang telah diikuti yaitu JK, JKK dan JHT pada pegawai juga telah diikutsertakan pada program baru yaitu Program Jaminan Pensiun.

5. Program Peningkatan/Pengembangan Kompetensi

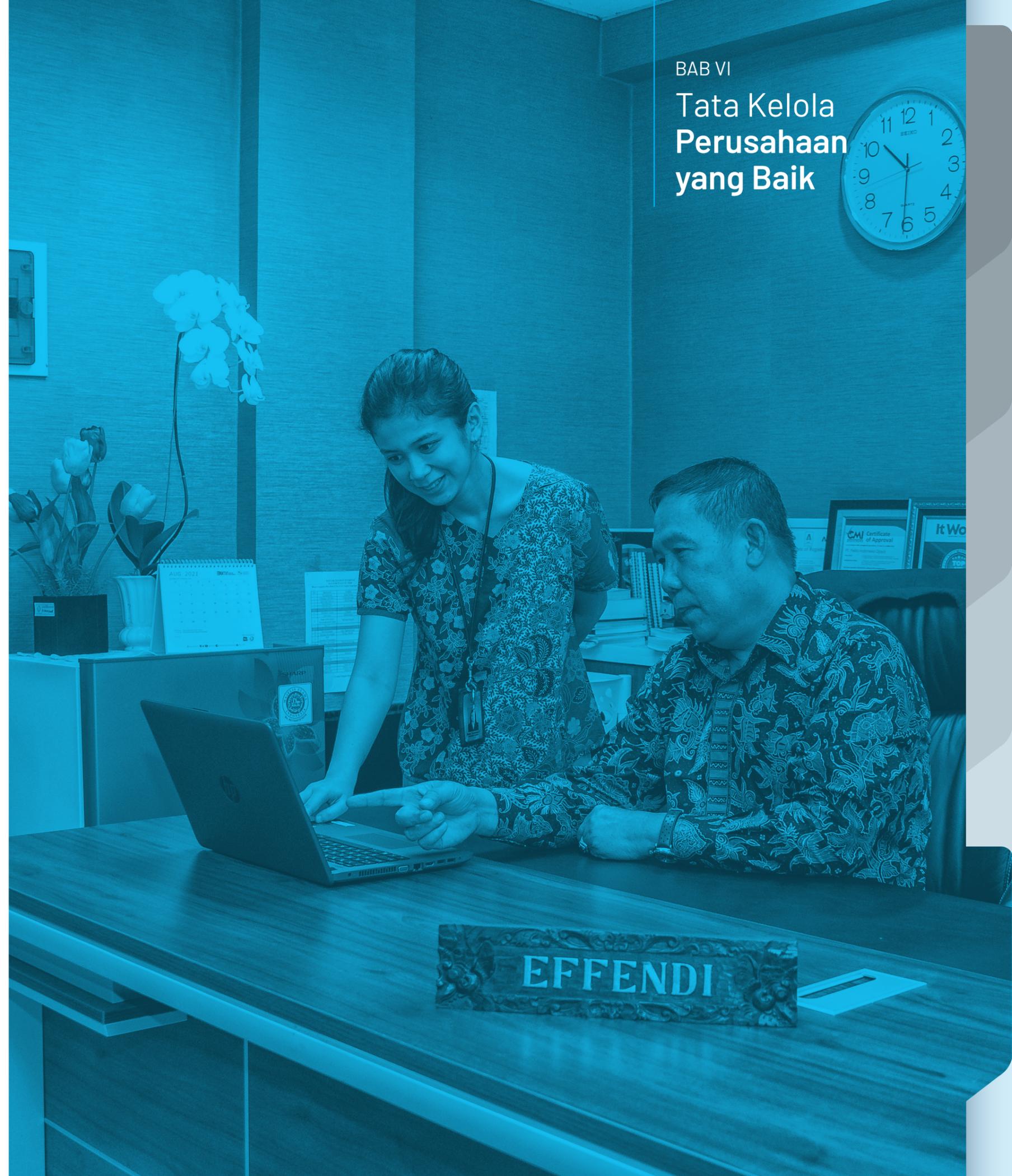
Dalam tahun 2020, perusahaan berusaha meningkatkan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan latihan, *workshop*, dan *coaching* sebanyak 114 orang yang diselenggarakan oleh pihak eksternal guna mendapatkan pengetahuan - pengetahuan dan kemampuan khusus sebagai berikut:

- *Workshop* Perpajakan BUMN 2020 diikuti 2 orang,
- Pelatihan *Webinar Tax Forum* BUMN 2020 diikuti 2 orang,
- *Workshop* ISO 37001: 2016 diikuti 19 orang.



Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan Perusahaan. Karena itu, PT PIDC memiliki komitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara benar dan konsisten, serta terus berusaha untuk menyempurnakan tatanan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dimilikinya.

“



Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Meningkatkan Keberhasilan Usaha dan Akuntabilitas Perseroan

Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ Perusahaan guna meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas Perusahaan.

Bagi PT PIDC, Tata Kelola Perusahaan yang Baik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan Perusahaan. Karena itu, PT PIDC memiliki komitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara benar dan konsisten, serta terus berusaha untuk menyempurnakan tatanan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yang dimilikinya.

Demi memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan usaha antara lain dengan pelaksanaan perusahaan yang sehat dan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. PIDC mempunyai komitmen yang tinggi dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.

Untuk dapat mewujudkan tujuan menjadi perusahaan yang dipercaya pemangku kepentingan, berkinerja unggul, serta tumbuh secara berkelanjutan, PT PIDC berkomitmen untuk menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam setiap kegiatan usaha. Dengan berpegang teguh pada komitmen tersebut, Perusahaan senantiasa mengikuti perkembangan praktik tata kelola terbaik yang berlaku, yang relevan dan sesuai dengan kebutuhannya.

Setiap tahunnya, Perusahaan terus berkomitmen penuh menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, melalui cara kerja yang baik, etis, bertanggung jawab, transparan, serta berlandaskan azas saling percaya, guna memberikan hasil kerja yang positif dan optimal.

Perusahaan telah menerapkan prinsip dan praktik *GCG* dalam manajemen dan pengelolaan bisnis usahanya, sehingga dapat melindungi Para Pemangku Kepentingan dengan efektif.

Dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, maka kebijakan-kebijakan Perusahaan diharapkan akan bisa memenuhi prinsip-prinsip: transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan keadilan.

Penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik di atas merupakan upaya strategis dari Perusahaan di dalam mengupayakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui komitmen yang tinggi dan konsistensi

terhadap penerapan tata Kelola perusahaan yang baik, Perseroan meyakini akan dapat mencegah praktik-praktik Suap, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan fungsi pengawasan dalam mengelola Perusahaan.

PT PIDC meyakini penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik dapat menciptakan nilai tambah untuk seluruh pemangku kepentingan, termasuk kepada Pemegang Saham, karena Tata Kelola Perusahaan yang Baik dipercaya mampu memberikan fondasi atas pengelolaan entitas usaha yang akuntabel.

PT PIDC menyadari peran penting penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah landasan dan sarana dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan Perusahaan, agar mampu menjaga kesinambungan kegiatan usaha. Selain itu, Perusahaan juga berkeyakinan bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik akan mendorong terciptanya persaingan yang sehat dan iklim usaha yang kondusif.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di tahun 2020

Selama tahun 2020, manajemen memastikan bahwa perusahaan telah dikelola berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Perusahaan telah memiliki *Code of Conduct* yang dijadikan sebagai dasar rujukan bagi setiap personil dalam bertindak di dalam relasinya dengan pelaksanaan tugas.

Seluruh personil berkomitmen untuk tidak menerima gratifikasi serta tidak melaksanakan praktik-praktik KKN melalui penandatanganan pakta integritas.

Dalam rangka menilai komitmen perusahaan dalam melaksanakan praktik *GCG*, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN NOMOR: PER 01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Perusahaan menerapkan sistem Manajemen Mutu ISO 9001 ditandai dengan melakukan kegiatan dengan pihak ketiga (Diklat ISO).

Perusahaan telah melakukan *assesment* kriteria penilaian kinerja unggul berbasis *Malcolm Baldrige*.

Perusahaan mengevaluasi Standard Operasional Perusahaan (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa.

Perusahaan membuat SOP Pengadaan Barang dan Jasa bidang Permakanan dan Jasa *Maintenance* secara swakelola.

Perusahaan menerbitkan kebijakan akuntansi dan keuangan tentang mekanisme perlakuan dan pencatatan uang muka dan pertanggungjawaban kegiatan swakelola.

Dasar dan Tujuan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Semangat yang terkandung dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PIDC adalah niat dan tekad manajemen PIDC untuk menjadikan PIDC sebuah perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang dengan kualitas Produk dan Proses Kerja yang baik, serta memiliki *Code of Conduct*, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungannya.

Tujuan Penerapan *GCG* di PIDC adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan dan mengarahkan hubungan antara Organ Perseroan (Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi), karyawan, pelanggan, mitra kerja, serta masyarakat dan lingkungan berjalan secara baik dan kepentingan semua pihak terpenuhi.
2. Mendorong dan mendukung pengembangan PIDC.
3. Mengelola sumber daya secara lebih amanah.
4. Mengelola risiko secara lebih baik.
5. Meningkatkan pertanggungjawaban kepada *stakeholders*.
6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan PIDC.
7. Memperbaiki budaya kerja PIDC.
8. Meningkatkan citra PIDC (*image*) menjadi semakin baik.

Untuk mewujudkan hal tersebut, PIDC memiliki komitmen penuh dan secara konsisten menegakkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), dengan mengacu kepada beberapa aturan formal yang menjadi landasan bagi PIDC dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik yaitu:

1. Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN (Pasal 5 ayat 3).
2. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan perubahannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/2012 tanggal 06 Juli 2012.
3. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK16/S.MBU/2012 tanggal 06 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

4. Undang Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diperbaharui oleh Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007.
5. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT PIDC.

Komitmen Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik

PIDC berkomitmen melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi untuk memaksimalkan nilai Perusahaan bagi pemegang saham, dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, bertanggung jawab, adil dan independen agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PIDC selalu mengacu kepada implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Hal ini menjadi bukti komitmen PIDC untuk memenuhi semua kepentingan *stakeholders* dengan sebaik-baiknya.

Pentingnya penerapan dari prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik diharapkan dapat membawa PT PIDC kepada kemajuan yang signifikan dan berkelanjutan.

PT PIDC menerapkan prinsip-prinsip dasar Tata Kelola Perusahaan yang Baik, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, kemandirian dan kewajaran.

Transparansi

Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan. Pengungkapan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.

Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggung jawaban sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas merujuk kepada kewajiban seseorang atau Satuan Kerja Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan/atau pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan oleh Perusahaan kepadanya. Oleh karenanya, Perusahaan menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ

Perusahaan yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi Perusahaan.

Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban yaitu Kesesuaian didalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Prinsip pertanggung jawaban mencerminkan adanya kesesuaian dan kepatuhan pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Kemandirian

Kemandirian yaitu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa Benturan Kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Oleh karena itu, Perusahaan dalam mengambil keputusan bertindak obyektif dan bebas dari segala tekanan, menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*Conflict of Interest*).

Kewajaran

Kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip kewajaran mengharuskan adanya perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak Pemegang Saham dan *stakeholders*. Perusahaan akan selalu memastikan agar pihak yang berkepentingan dapat mengeksekusi hak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan juga akan selalu memastikan agar Perusahaan dapat mengeksekusi haknya terhadap pihak yang berkepentingan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Assessment Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Untuk melakukan pemantauan terhadap implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PIDC, Perusahaan berencana melakukan *Assessment* Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk mengukur tingkat kepatuhan PIDC didalam penerapannya.

Struktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Sesuai dengan Perundang-undangan, struktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik di PT PIDC adalah sebagai berikut:

1. Pemegang Saham, dalam hal ini adalah negara yang dikuasakan kepada Kuasa Pemegang Saham.
2. Organ Perusahaan yaitu RUPS, Dewan Komisaris, dan Direksi.
3. Satuan Pengawasan Intern.

Untuk menjunjung tinggi integritas dalam membuat keputusan dan menjalankan tugas, Organ Perusahaan bersama dengan seluruh karyawan Perseroan harus senantiasa bertindak sesuai tugas pokok, fungsi dan kedudukan masing-masing berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Perseroan telah menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing Organ Perusahaan dalam pencapaian visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha dan strategi Perusahaan. Seluruh Organ Perusahaan dituntut untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan.

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik antara lain meliputi pemisahan tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara Direksi dan Dewan Komisaris, *check and balances*, strategi Perseroan yang jelas, etika bisnis, hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan, dan pengawasan operasional.

Beberapa pedoman-pedoman dan kebijakan Perseroan dalam pelaksanaan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik meliputi:

Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*),

- a. Pedoman Kebijakan Perseroan (*Code of Corporate Governance*),
- b. *Board Manual*,
- c. Piagam Komite Audit
- d. Piagam Satuan Pengawasan Intern,
- e. Kebijakan Pengelolaan Risiko,
- f. Peraturan Perusahaan
- g. Kebijakan lainnya yang berhubungan dengan *stakeholders* yang mengatur hak dan kewajiban karyawan, pelanggan, dan pemasok.



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur kepengurusan memiliki wewenang yang tidak dimiliki Dewan Komisaris atau Direksi. Wewenang meliputi pengambilan keputusan tentang perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan, dan pembubaran Perusahaan. Pada dasarnya wewenang tersebut diatur dan dibatasi oleh Undang-Undang Perusahaan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan.

Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Keputusan RUPS:

- 1) Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2020 dan Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perusahaan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perusahaan selama Tahun Buku 2020;
- 2) Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan untuk Tahun Buku 2020;
- 3) Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris;
- 4) Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2020.

Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris diangkat melalui

RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Independensi Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Dewan Komisaris bersifat independen, tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pihak manapun.

Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, atau setiap saat apabila dianggap perlu. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan setiap waktu, bilamana dianggap perlu oleh Komisaris.

Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi Dewan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya (PT PIDC) ditetapkan berdasarkan Surat Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelita Indonesia Djaya Nomor: 08.31/03/S-R/090/2020 tanggal 31 Agustus 2020 sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014, sebagaimana perubahan terakhir peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Susunan Dewan Komisaris

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pelita Indonesia Djaya tertanggal 13 Desember 2019 Nomor: 5 tentang Penunjukkan Plt Komisaris Utama PT Pelita Indonesia

Djaya Notaris IDA ADININGSIH, SH. Dengan nomor SK Kemenkumham AH 0242605.AH01.11. Tahun 2019 tanggal 16 Desember 2019. Susunan Dewan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya, adalah sebagai berikut:

- a. Sdr. MUHAMMAD TUKUL HARSONO sebagai Plt KOMISARIS UTAMA.
- b. Sdr. MUHAMMAD TUKUL HARSONO sebagai KOMISARIS.

Kegiatan Dewan Komisaris pada Tahun 2020

Dewan Komisaris telah melakukan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020 yang telah disahkan oleh RUPS, sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan tindak lanjut dari hasil keputusan RUPS atas laporan tahunan tahun buku 2020 dan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2021;
2. Memberikan pendapat dan saran serta tanggapan atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian Direksi atas hasil kinerja tahun buku 2020 yang telah disahkan oleh Pemegang Saham pada tahun 2021;
3. Melakukan penelaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja bulanan perusahaan dan memberikan saran dan pendapat dalam rangka pencapaian target kinerja Perusahaan;
4. Memberikan saran terkait dengan hal-hal yang harus segera diselesaikan di tahun 2020;
5. Memperoleh akses informasi Perusahaan yang diberikan manajemen secara tepat waktu dan lengkap;
6. Tidak melakukan transaksi yang berpotensi menciptakan benturan kepentingan dan keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan;
7. Menelaah draft Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tahun 2020 yang diajukan oleh Direksi dan menyampaikan pendapat/saran kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan;
8. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris tahun 2020 untuk mendapat persetujuan oleh RUPS yang merupakan bagian dari pengesahan RKAP tahun 2019;
9. Memberikan arahan, saran dan pendapat terkait dengan pengelolaan Perusahaan;
10. Kunjungan Kerja Direksi dan Organ Dewan Komisaris ke Gudang;

Komite Audit pada Dewan Komisaris

Pembentukan Komite Audit pada Dewan Komisaris

ditetapkan berdasarkan Surat Dewan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya Nomor: 11.16/01/SK/DK/PID/2020 tanggal 16 November 2020 sesuai peraturan Menteri BUMN No: PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-09/mbu/2012 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

Komite Kebijakan Risiko Pada Dewan Komisaris

Pembentukan Komite Kebijakan Risiko Pada Dewan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya berdasarkan Surat Dewan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya Nomor: 11.16/02/SK/DK/PID/2020 tanggal 16 November 2020 sesuai peraturan Menteri BUMN No: PER-01/MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per-09/mbu/2012 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;

Direksi

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan, serta mewakili Perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Anggota Direksi diangkat melalui RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.

Independensi Direksi

Dalam fungsi dan tugasnya, anggota Direksi bertindak secara mandiri, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi pihak mana pun.

Tanggung Jawab Direksi dan Pembagian Tugas Direksi

1. Direktur Utama menentukan, memutuskan dan menetapkan strategi perencanaan serta pelaksanaan seluruh kegiatan Perusahaan di antaranya internal audit, *legal and contract*, dan corporate secretary di mana seluruh kegiatan tersebut dikaitkan dengan usaha pencapaian visi dan misi Perusahaan.
2. Direktur Operasi menentukan, memutuskan, menetapkan dan mengendalikan pembuatan kebijakan operasi Perusahaan meliputi Divisi Pengembangan Usaha, Divisi Pelayanan dan Jasa dan Divisi Komersial, Divisi Keuangan, Divisi Pengadaan, Divisi Jasa *Maintenance dan IT* (JMI), dan Divisi SDM & Umum.

Rapat Direksi

Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu. Pembahasan yang dilakukan antara lain mengenai kinerja perusahaan, namun tidak terbatas pada pengukuran kinerja Perusahaan menyangkut kegiatan operasional, kondisi keuangan, dan juga dalam rangka pemenuhan target yang telah ditetapkan. Selain itu, rapat ini juga bertindak sebagai sebuah forum *sharing* (saling berbagi) antara anggota Direksi mengenai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Remunerasi Direksi

Remunerasi Direksi PT Pelita Indonesia Djaya (PT PIDC) ditetapkan berdasarkan Surat Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelita Indonesia Djaya Nomor: 08.3/03/S-R/090/2020 tanggal 31 Agustus 2020 sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014, sebagaimana perubahan terakhir peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/05/2019 tanggal 31 Mei 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.

Susunan Direksi

Susunan Anggota Direksi: Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya (PT PIDC) tanggal 10 Mei 2019 Nomor: 05.10/01/SK/DK.PIDC/2019 tentang Pelaksanaan Tugas Direksi PT Pelita Indonesia Djaya (PIDC)

- a. DIREKTUR UTAMA : Tuan EFFENDI
- b. DIREKTUR OPERASI : Plt. Tuan EFFENDI

Kegiatan Direksi pada Tahun 2020

1. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi PT Pelita Indonesia Djaya. Beberapa perubahan strategis dari sisi perencanaan maupun sistem manajemen perusahaan dilakukan di sepanjang tahun 2020, selanjutnya tahun 2020 melakukan perubahan dan revisi terhadap RKAP 2020 dalam rangka penyesuaian terhadap dampak covid-19 yang kemudian membawa pengaruh kepada tingkat pencapaian target RKAP 2020.
2. Dengan berbagai tantangan yang ada tersebut, manajemen mengambil berbagai kebijakan baik di bidang operasional maupun manajemen dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Berkat upaya tersebut dan didorong oleh kerja keras dari personel di semua lini, Perusahaan berhasil menutup tahun 2020

dengan kinerja keuangan dan operasional yang sudah mencukupi.

3. Beberapa prinsip utama yang diterapkan oleh manajemen dalam melakukan perubahan kebijakan pada tahun 2020, yaitu:
 - a. Komitmen pada pencapaian visi dan pelaksanaan misi Perusahaan;
 - b. Menjaga keseimbangan dalam mencapai pertumbuhan yang baik dan berkualitas;
 - c. Meningkatkan kompetensi, motivasi dan produktivitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan organisasi.
4. Inisiatif tersebut kemudian diturunkan kepada kebijakan strategis di masing-masing satuan kerja. Di bidang operasional, komitmen perusahaan untuk selalu meningkatkan layanan kepada pelanggan.
5. Dalam tahun 2020 penyampaian keluhan pelanggan melalui *SMS center*, surat, buku keluhan, kotak saran, email dan langsung dengan petugas.
6. Peningkatan kompetensi personil dilakukan melalui kebijakan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan melalui *training*, *coaching*, dan *benchmarking*. Di sisi lain, perbaikan manajemen SDM secara menyeluruh mulai dilakukan dengan penyusunan peta kompetensi personil yang ada sebagai dasar dalam perencanaan dan pengelolaan SDM ke depan. Pemenuhan kewajiban pasca kerja karyawan serta pengikutsertaan karyawan ke dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dilakukan oleh manajemen.
7. Manajemen telah membuat asersi (*assertion*) Pernyataan manajemen yang terkandung didalam komponen laporan keuangan serta rangkaian deklarasi secara keseluruhan terkait penyajian Laporan Keuangan secara akurat, benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku.
8. Manajemen telah menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perusahaan.

Sekretaris Dewan Komisaris

Dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan efektivitas peran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Dewan Komisaris

Untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris;
- b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai

- dengan Anggaran Dasar Perusahaan;
- c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
- d. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris;
- e. Menyusun Rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris;
- f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.

Selain melaksanakan tugas tersebut di atas, Sekretaris Dewan Komisaris selaku pimpinan Sekretariat, melaksanakan tugas lainnya seperti berikut:

- a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi Peraturan Perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
- b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan atau sewaktu-waktu apabila diminta.
- c. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
- d. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain. Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretaris Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen penyelenggaraan kegiatan tersimoan dengan baik di Perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal

Seiring dengan perkembangan usaha perusahaan yang terus tumbuh, PIDC memandang perlu dilakukannya pengendalian internal secara menyeluruh dan terintegrasi, serta berupaya meningkatkan penerapan pengendalian internal melalui pengembangan sistem dan prosedur yang aplikatif dan mencegah terjadinya *fraud*.

Fungsi pelaksanaan pengendalian internal dilakukan oleh Direksi melalui Unit Internal Audit. Sedangkan fungsi pengawasan dan penasehatan telah dilakukan oleh Dewan Komisaris terkait dengan proses kecukupan dan kewajaran dalam penyusunan laporan keuangan, pengelolaan risiko dengan memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Syarat & Kompetensi Sumber Daya Unit Audit Internal

Untuk menjadi Auditor Internal, harus memenuhi persyaratan dan kualifikasi sebagai berikut:

- Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya; Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;

- Memiliki pengetahuan yang memadai untuk dapat mengenali, meneliti dan menguji adanya indikasi kecurangan;
- Secara kolektif memiliki pengetahuan tentang risiko dan pengendalian yang penting dalam bidang teknologi informasi dan teknik-teknik audit berbasis teknologi informasi;
- Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan perundang-undangan terkait lainnya;
- Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- Wajib mematuhi standar profesi dan kode etik yang dikeluarkan oleh *International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing*;
- Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/ atau data Perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Internal Audit kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/ putusan pengadilan;
- Memahami prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan manajemen risiko;
- Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus;

Internal Audit Charter

PIDC telah memiliki *Internal Audit Charter* yang menjadi dasar dan panduan pelaksanaan kegiatan Audit Internal.

Tujuan pembentukan *Internal Audit Charter* adalah:

1. Menetapkan posisi kegiatan Unit Audit Internal dalam Organisasi;
2. Memberikan otorisasi kewenangan kepada Unit Audit Internal dalam memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap semua catatan dan atau informasi tentang seluruh aktivitas dan sumber daya Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
3. Menetapkan lingkup tugas dan aktivitas Audit Internal.

Tugas dan Kewenangan Unit Audit Internal

Berdasarkan *Internal Audit Charter*, tugas dan kewenangan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

1. Membuat pelaksanaan audit tahunan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan audit kepada Direksi, serta membuat rekomendasi perbaikan.
3. Berkoordinasi dengan auditor eksternal dalam pelaksanaan audit, apabila ada atau diperlukan, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan audit.

Pembinaan SDM dan Pengembangan Profesi Audit

Pengembangan kompetensi bagi auditor PIDC

dilakukan melalui pelatihan pada institusi pelatihan dalam bentuk kursus atau seminar/ lokakarya terkait dengan masalah auditing baik yang dilaksanakan oleh internal Perusahaan maupun Lembaga Pendidikan Eksternal lainnya.

Monitoring Tindak Lanjut Temuan

Sesuai ketentuan Pedoman Kerja Satuan Pengawas Internal mengenai Standar Implementasi tentang Pemantauan Tindak Lanjut, salah satu tugas dari Kepala SPI adalah menyusun dan memelihara sistem untuk memantau tindak lanjut hasil penugasan yang telah disampaikan kepada manajemen.

Monitoring tindak lanjut temuan auditor adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh SPI untuk menentukan bahwa obyek audit (*auditee*) telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan, baik yang berasal dari auditor internal maupun auditor eksternal, dalam tenggang waktu yang telah disepakati sebelumnya.

Monitoring tindak lanjut bertujuan untuk menilai secara obyektif sejauh mana pelaksanaan rekomendasi temuan dilaksanakan dan mengecek kebenaran data baik tertulis maupun fisik di lapangan atas laporan tinjau yang pernah disampaikan *auditee*.

Kegiatan *monitoring* tindak lanjut temuan auditor di tahun 2020 dilaksanakan sepanjang tahun dengan meminta laporan tindak lanjut kepada *auditee* secara berkala. Kegiatan cek fisik ke lapangan juga dilakukan untuk melihat realisasi fisik pelaksanaan tindak lanjut pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang.

Manajemen Risiko

PT PIDC menyadari pelaksanaan manajemen risiko korporat semakin menjadi tuntutan, karena keberhasilannya merupakan faktor kunci sukses pencapaian tujuan dan kemenangan persaingan ditingkat global.

Penerapan manajemen risiko dapat meningkatkan *shareholder value*, sekaligus memberikan gambaran komprehensif kepada *stakeholder* maupun pengelola Perusahaan mengenai potensi peluang maupun kerugian, dengan demikian pengambil keputusan dan pembuat kebijakan internal memiliki ketersediaan data dan informasi mengenai kinerja Perusahaan, sehingga memungkinkan pembuatan keputusan yang lebih efektif dan efisien.

PT PIDC secara berkelanjutan mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif, sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini

dan selanjutnya dapat diambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko.

Kerangka manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, kewenangan dan ketentuan lain, serta berbagai perangkat manajemen risiko yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas usaha.

Komponen Pengelolaan Risiko

Sistem manajemen risiko terdiri dari 3 komponen saling terkait yaitu:

1. Prinsip-prinsip manajemen risiko;
2. Kerangka kerja dalam mengelola risiko; dan
3. Proses pengelolaan risiko.

Prinsip-prinsip manajemen risiko merupakan pondasi (aturan dasar) bagi pengembangan kerangka kerja pengelolaan risiko yang merupakan pilar-pilar bagi penerapan proses manajemen risiko. Sementara proses manajemen risiko adalah penjabaran dari kerangka kerja pengelolaan risiko dalam rangka mempermudah penerapan prinsip-prinsip pengelolaan risiko, baik di tingkat korporat, di tingkat unit kerja, maupun individu.

Perkara Hukum

Perkara penting adalah permasalahan hukum yang dihadapi PIDC selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum, baik melalui jalur Pengadilan ataupun Arbitrase. Sementara Nilai Perkara merupakan nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada PIDC sebagai pihak tergugat atau nilai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh PIDC sebagai pihak penggugat, baik kerugian materil maupun perkara yang dihadapi PIDC.

Etika Perusahaan (Code of Conduct)

Sebagai bentuk komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di Perusahaan, PT PIDC bertekad untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan etika tertinggi dalam kejujuran dan keadilan. Komitmen ini dirancang bukan hanya sekadar untuk mematuhi Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, tetapi juga untuk memperoleh dan menjaga kepercayaan para nasabah, pemegang saham, karyawan, dan mitra usaha. Hal ini merupakan hal yang sangat substansial bagi keberhasilan usaha jangka panjang.

PIDC telah merumuskan berbagai kebijakan menyangkut etika Perusahaan dengan mengupayakan penerapan standar etika terbaik dalam menjalankan segenap aktivitas bisnisnya sesuai dengan visi, misi, dan budaya yang dimiliki melalui implementasi Etika Bisnis.

Penyebaran Etika Bisnis

Sosialisasi merupakan tahapan penting dari penerapan Standar Etika Perusahaan. PIDC senantiasa melakukan sosialisasi dalam penerapan Etika Bisnis kepada seluruh pegawai PIDC, mulai dari *level* operasional sampai kepada *top management*. Sosialisasi ini dimaksudkan agar insan PIDC senantiasa patuh terhadap Etika Bisnis.

Penegakan Etika Bisnis

PT PIDC melakukan penegakan terhadap Etika Bisnis yang dilakukan dengan melakukan pemantauan secara berkala terhadap penegakan Etika Bisnis. Upaya penegakan Etika Bisnis dilakukan oleh PIDC melalui penyediaan media pengaduan pelanggaran, penerapan *reward and punishment*, serta pernyataan komitmen.

Whistleblowing System

Kebijakan pengaduan pelanggaran diperlukan untuk mengatur penyelesaian Pengaduan Pelanggaran bagi stakeholders. Kebijakan Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*whistleblowing system*) merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi di dalam suatu Perusahaan.

Jenis Pengaduan

Jenis pengaduan yang dapat disampaikan melalui mekanisme *Whistleblowing System* adalah sebagai berikut:

1. Pelanggaran atas aturan atau persyaratan internal.
2. Pelanggaran atas hukum atau peraturan yang berlaku tidak termasuk *fraud* atau pencurian (termasuk *insider trading*).
3. *Fraud* atau pencurian.
4. Membahayakan kesehatan atau keselamatan.
5. Masalah-masalah sumber daya manusia yang telah gagal untuk diselesaikan melalui prosedur pengaduan SDM.
6. Memalsukan atau menyembunyikan catatan keuangan.
7. Memalsukan atau menyembunyikan informasi manajemen *non-finansial*.
8. Perilaku tidak etis.
9. Perlakuan terhadap pelanggan yang tidak pada tempatnya.
10. Kerusakan lingkungan.

Mekanisme Sistem Pengaduan

Kebijakan Pengaduan Pelanggaran yang disusun dimaksudkan untuk mengelola dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi antara lain terkait dengan kerugian perusahaan secara finansial maupun reputasi perusahaan yang bersifat negatif. Pengaduan pelanggaran dapat disampaikan secara lisan maupun tulisan, melalui email maupun surat resmi.

Pengaduan dari pihak ketiga dan/atau dari karyawan Perusahaan harus ditempatkan dalam kerangka peningkatan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Pengaduan harus disampaikan oleh pelapor dengan rasa tanggung jawab dan bukan bersifat fitnah yang dapat mencemarkan nama baik atau reputasi seseorang.

Pengaduan yang disampaikan harus memenuhi syarat-syarat bahwa pengaduan disampaikan secara tertulis, memuat identitas pelapor (kerahasiaan identitas pelapor akan tetap terjaga), memuat informasi yang memberikan petunjuk mengenai permasalahan seperti yang diuraikan pada bagian di atas, Informasi harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan sebagai data awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

BAB VII

Laporan Keuangan



DAFTAR ISI

	Halaman
SURAT PERNYATAAN DIREKSI	
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	
LAPORAN KEUANGAN	
• Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 2
• Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3
• Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4
• Laporan Arus Kas Konsolidasian	5
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	6 – 62
Informasi Tambahan :	
LAPORAN KEUANGAN POKOK	
(Informasi Keuangan - Entitas Induk Saja sebagai Laporan Keuangan Tersendiri)	
• Laporan Posisi Kuangan - Induk Saja	1-2
• Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain - Induk Saja	3
• Laporan Perubahan Ekuitas - Induk Saja	4
• Laporan Arus Kas - Induk Saja	5



PT. PELITA INDONESIA DJAYA

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020
PT. PELITA INDONESIA DJAYA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Effendi
Alamat Kantor : Ruko Cempaka Mas Jl. Letjend. Soeprapto Blok Q no. 05,
Kemayoran – Jakarta Pusat
No. Telp : (021) 42883720 – 42883740
Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Ki Mangun Sarkoro RT 001 / RW 010, Kel. Bekasi Jaya, Kec.
Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat
Posisi : Direktur Utama

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan.
2. Laporan Keuangan Perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan Keuangan Perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggung jawab atas Sistem Pengendalian Internal Perusahaan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 10 Mei 2021
Direktur Utama

EFFENDI

Ruko Cempaka Mas Jl. Letjen Soeprapto Blok Q no. 05 – Jakarta Pusat



**HENDRAWINATA HANNY
ERWIN & SUMARGO**

Laporan Auditor Independen

No : 00159/2.1127/AU.1/05/0060-1/1/V/2021

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Pelita Indonesia Djaya**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Pelita Indonesia Djaya dan Entitas Anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelita Indonesia Djaya dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penekanan suatu hal

Sebagai bagian dari audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Pelita Indonesia Djaya dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, kami juga mengaudit penyesuaian yang dijelaskan pada catatan 35 atas laporan keuangan terlampir yang diterapkan untuk menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Menurut opini kami, penyesuaian tersebut sudah tepat dan telah diterapkan dengan tepat. Kami tidak ditugasi untuk mengaudit, mereviu, atau menerapkan prosedur apapun atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut selain yang berkaitan dengan penyesuaian tersebut dan, oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini atau bentuk lainnya atas laporan keuangan tanggal 31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut secara keseluruhan.

Registered Public Accountants | License No. 678/KM.1/2017

Intiland Tower 18th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 32, Jakarta 10220, Indonesia

T : +62 21 571 2000, +62 21 570 7997 | F : +62 21 570 6118, +62 21 571 1818 | Email : hhes.jakarta@kreston.co.id | www.kreston.co.id

A Member of Kreston International | A global network of independent accounting firms

People do business with people they know, like and trust.

Hal lain

Laporan Keuangan Konsolidasian PT Pelita Indonesia Djaya dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya bertanggal 6 April 2020.

HENDRAWINATA HANNY ERWIN & SUMARGO


HENDRAWINATA HANNY
ERWIN & SUMARGO
Registered Public Accountants
Welly Adrianto, CPA
No. Ijin Akuntan Publik: AP. 0060
Jakarta, 10 Mei 2021

	Catatan	2020	2019*)	2018
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Setara Kas	5	14.642.422.860	38.509.285.869	27.220.762.667
Piutang Usaha	6	103.898.544.299	75.161.303.574	61.028.616.909
<i>Setelah dikurangi provisi kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 858.778.470, Rp229.023.666 dan Rp9.595.581</i>				
Aset Keuangan Lancar Lainnya	7	3.682.565.256	1.298.430.767	555.362.120
Persediaan	8	3.552.398.632	5.084.216.218	-
Uang Muka	9	29.339.976.483	14.600.012.321	6.158.464.955
Aset Kontrak	10	51.142.180.437	66.704.157.072	36.614.854.653
Pajak Dibayar Dimuka	16a	11.125.571.483	25.910.010.616	19.412.560.810
Jumlah Aset Lancar		217.383.659.450	227.267.416.437	150.990.622.114
ASET TIDAK LANCAR				
Aset Tetap	11	47.251.625.968	37.758.280.382	24.753.061.157
<i>Setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp21.565.183.017 Rp16.637.183.332 dan Rp11.000.292.055</i>				
Aset Tak Berwujud	12	960.180.043	927.849.807	778.072.663
Aset Hak Guna	13	1.358.353.377	-	-
Aset Pajak Tangguhan	16d	2.131.158.232	2.070.499.253	1.547.723.220
Aset Tidak Lancar Lainnya	14	2.057.300.000	2.557.300.000	-
Jumlah Aset Tidak Lancar		53.758.617.620	43.313.929.442	27.078.857.040
JUMLAH ASET		271.142.277.070	270.581.345.880	178.069.479.154

*Setelah penyajian kembali (lihat catatan 35)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019*)	2018
LIABILITAS DAN EKUITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang Usaha	15	12.472.580.309	9.722.979.396	16.574.275.420
Utang Pajak	16b	678.900.437	6.481.209.222	1.968.911.631
Beban Akrua	17	70.080.967.066	76.275.770.548	28.141.684.896
Liabilitas Hak Guna Jangka Pendek	18	751.248.337	-	-
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	19	5.083.346.117	1.238.020.806	1.800.456.199
Bagian Lancar Atas				
Liabilitas Jangka Panjang	20	4.195.797.343	3.414.540.000	3.414.540.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		93.262.839.609	97.132.519.972	51.899.868.146
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang Pihak Berelasi	21	16.093.935.042	26.691.567.878	1.993.116.744
Liabilitas Hak Guna Jangka Panjang	18	614.099.489	-	-
Liabilitas Jangka Panjang	20	2.074.480.401	1.861.787.000	2.445.580.600
Liabilitas Imbalan Kerja	22	5.771.196.449	5.040.444.803	3.493.281.283
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		24.553.711.381	33.593.799.681	7.931.978.627
JUMLAH LIABILITAS		117.816.550.990	130.726.319.653	59.831.846.773
EKUITAS				
Modal Saham	23	2.010.000.000	2.010.000.000	2.010.000.000
Modal dasar sebanyak 2.010 saham ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.				
Cadangan Umum	24	131.974.755.011	81.732.995.380	70.733.995.291
Saldo Laba	25	20.525.452.883	57.279.364.340	46.055.458.282
Komponen Ekuitas Lainnya	26	(1.406.997.326)	(1.436.489.836)	(666.748.426)
Jumlah Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		153.103.210.568	139.585.869.884	118.132.705.147
Kepentingan Non Pengendali	27	222.515.512	269.156.343	104.927.234
JUMLAH EKUITAS		153.325.726.080	139.855.026.227	118.237.632.381
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		271.142.277.070	270.581.345.880	178.069.479.154

*Setelah penyajian kembali (lihat catatan 35)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019*)
Pendapatan Usaha	28	368.210.585.149	485.847.640.062
Beban Usaha	29	(295.856.738.925)	(368.406.382.425)
LABA KOTOR		72.353.846.224	117.441.257.637
Beban Administrasi dan Umum	30	(41.527.300.168)	(43.979.343.408)
LABA USAHA		30.826.546.056	73.461.914.229
Pendapatan (Beban) Non Usaha Bersih	31	(733.047.876)	(1.685.566.290)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		30.093.498.180	71.776.347.939
Beban (Manfaat) Pajak Penghasilan:			
Kini	16c	(7.753.969.499)	(20.486.628.760)
Tanggung	16d	84.528.079	266.195.564
Jumlah		(7.669.441.420)	(20.220.433.196)
LABA TAHUN BERJALAN		22.424.056.760	51.555.914.743
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja :			
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria	22d	37.810.910	(1.026.321.880)
Efek pajak keuntungan (kerugian) Terkait		(8.318.400)	256.580.470
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		29.492.510	(769.741.410)
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan		22.453.549.270	50.786.173.333
Labas Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada:			
Pemilik Entitas Induk		22.468.147.443	51.541.685.634
Kepentingan Non Pengendali		(44.090.683)	14.229.109
Labas Tahun Berjalan		22.424.056.760	51.555.914.743
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan kepada:			
Pemilik Entitas Induk		22.497.639.953	50.771.944.224
Kepentingan Non Pengendali		(44.090.683)	14.229.109
Labas Tahun Berjalan		22.453.549.270	50.786.173.333
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR		11.156.247	25.649.709

*Setelah penyajian kembali (lihat catatan 35)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	354.157.580.681	438.129.766.161
Pembayaran Kas kepada Pemasok	(239.974.261.855)	(269.165.192.393)
Pembayaran operasional	(103.600.082.363)	(109.104.821.989)
Pengeluaran Lain-Lain	(2.099.022.289)	(3.093.203.452)
Pembayaran Pajak	(13.297.363.796)	(22.205.585.412)
Penerimaan Lain-lain	(212.902.871)	867.124.873
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) untuk Aktivitas Operasi	(5.026.052.493)	35.428.087.788
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Penambahan Aset Tetap	(14.421.345.271)	(18.642.110.497)
Penambahan Aset Tak Berwujud	(248.000.000)	(312.942.480)
Jumlah Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(14.669.345.271)	(18.955.052.977)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan pinjaman Bank	5.000.000.000	-
Penerimaan (Pembayaran) dari dan ke Pemegang Saham	-	26.691.567.878
Penggunaan cadangan	-	(29.117.190.589)
Pembayaran utang Bank	(804.202.657)	-
Pembayaran dividen	(8.867.262.588)	(201.588.898)
Jumlah Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(4.671.465.245)	(2.627.211.609)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(24.366.863.009)	13.845.823.202
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	41.066.585.869	27.220.762.667
KAS DAN SETARA KAS AKHIR	16.699.722.860	41.066.585.869
Saldo akhir kas dan setara kas terdiri dari:		
Kas dan setara kas	14.642.422.860	38.509.285.869
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya disajikan pada akun aset keuangan tidak lancar lainnya	2.057.300.000	2.557.300.000
	16.699.722.860	41.066.585.869

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Laba (Rugi)		Komponen Ekuitas Lainnya		Kepentingan Non Pengendali	Jumlah Ekuitas
	Diedarkan	Belum Diedarkan	Laba	Rugi		
Saldo per 31 Desember 2018	2.010.000.000	70.733.995.291	46.055.458.282	(666.748.426)	104.927.234	118.237.632.381
Penyertaan modal non pengendali	-	-	-	-	150.000.000	150.000.000
Cadangan Umum	-	-	-	-	-	-
Penggunaan cadangan Umum	-	-	(40.116.190.678)	-	-	-
Dividen	-	-	(201.588.898)	-	-	-
Laba tahun berjalan	-	-	51.541.685.634	-	14.229.109	51.555.914.743
Keuntungan (kerugian) Aktuarial	-	-	-	-	-	(769.741.410)
Saldo per 31 Desember 2019 (Disajikan Kembali)	2.010.000.000	81.732.995.580	57.279.364.340	(1.436.489.836)	269.156.343	139.855.026.227
Efek Penyesuaian PSAK 71	-	-	-	(17.407.080)	-	(18.887.516)
Efek Penyesuaian PSAK 73	-	-	-	(96.699.313)	-	(96.699.313)
Saldo per 1 Januari 2020 (Dampak PSAK)	2.010.000.000	81.732.995.580	57.165.257.947	(1.436.489.836)	267.675.907	139.739.439.398
Cadangan Umum	-	-	-	-	-	-
Dividen	-	-	-	-	-	-
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	-
Keuntungan (kerugian) Aktuarial	-	-	-	-	-	-
Saldo per 31 Desember 2020	2.010.000.000	131.974.755.011	20.525.452.883	(1.406.997.326)	222.515.512	153.325.726.080

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Pelita Indonesia Djaya didirikan di Jakarta pada Tanggal 29 September 1969 berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 53 tanggal 29 September 1969 oleh Notaris Djojo Muljadi. S.H yang diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia Nomor 12 tanggal 10 Februari 1970.

Dalam perkembangannya PT Pelita Indonesia Djaya mengalami perubahan nama dikarenakan adanya keberatan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 26 tentang pemakaian nama Perseroan Terbatas. maka diputuskan merubah nama Perseroan Terbatas PT Pelita Indonesia Djaya Cooperation berkedudukan di Jakarta menjadi PT Pelita Indonesia Djaya berkedudukan di Jakarta. Hal ini telah disahkan dengan Akta Notaris SP. Henny Singgih. S.H No : 22 Tanggal 10 September 2001.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. PT PIDC merubah Anggaran Dasar Perusahaan sesuai Akta Notaris No. 7 tanggal 10 Juni 2009 oleh Notaris Raden Mas Soediartha Soenarto. S.H. SpN. Persetujuan Menkumham No : AHU 4380.AH.01.02.Tahun 2009 Tanggal 04 September 2009 dan perubahan Akta Notaris No. 6 tanggal 15 Maret 2016 oleh Notaris Dewi Sugina Mulyani. SH Persetujuan Menkumham Nomor :AHU-AH.01.03.0031933 tanggal 16 Maret 2016. Dengan perubahan terakhir Akta Notaris No. 5 tanggal 12 Februari 2020 yang dibuat oleh Notaris Ida Adiningsih. S.H Persetujuan Menkumham Nomor : AHU-AH.01.03-0116585 tanggal 02 Maret 2020.

Maksud dan tujuan Perusahaan didirikan adalah sebagai berikut:

Berdagang dalam arti kata seluas-luasnya, menjalankan perdagangan impor dan ekspor, antar pulau/daerah serta lokal. Selanjutnya bertindak sebagai perwakilan dari badan - badan dan perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Mendirikan dan menjalankan usaha-usaha dan Perusahaan-Perusahaan dibidang perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan darat/laut, kepariwisataaan, perhotelan, dan *real estate* serta percetakan.

Mendirikan dan menjalankan usaha-usaha yang berhubungan dengan rumah pendingin (*coold storage*).

Mengusahakan galangan-galangan pembuatan dan reparasi kapal-kapal (*shipdocking and shiprepairing*).

Menjalankan segala sesuatu yang selaras atau yang berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut dalam ayat-ayat dimuka dan akan menjalankan usaha-usahanya dalm arti kata yang seluas-luasnya, baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan orang lain, secara komisi atau tidak ataupun bersama-sama dengan orang atau badan lain, dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan asal yang demikian itu tidak melanggar hukum.

Perusahaan berkedudukan di Jalan Letjend Soeprato Ruko Cempaka Mas Blok Q Nomor 5.

Perusahaan mempunyai satu Strategis Unit Bisnis (SBU) yaitu wisma bahtera tretes yang terletak di Jawa Timur.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Entitas memiliki karyawan sebanyak 1.434 orang yang terdiri dari karyawan tetap 60 orang, karyawan PKWT 82 orang dan karyawan *outsourcing* 1.292 orang. Sedangkan tahun 2019 Entitas memiliki karyawan sebanyak 1.433 orang yang terdiri dari karyawan tetap 61 orang, karyawan PKWT 62 orang dan karyawan *outsourcing* 1.310 orang. Seluruh karyawan tersebut tidak diaudit.

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

b. Susunan Komisaris dan Direktur

Berdasarkan pernyataan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor : 5 tanggal 12 Februari 2020 yang diaktakan dihadapan Notaris Ida Adiningsih. S.H mengenai perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) dan telah mendapat persetujuan dari KEMENKUMHAM Nomor : AHU-AH.01.03-0116585 tanggal 02 Maret 2020 Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pelita Indonesia Djaya nomor 5 tanggal 12 Februari 2020 maka susunan Komisaris dan Direksi PT Pelita Indonesia Djaya (PT PID) adalah sebagai berikut :

	2020	2019
Komisaris Utama (Plt)	: Muhammad Tukul Harsono	Olih Masolich Sodikin
Komisaris	: Muhammad Tukul Harsono	Muhammad Tukul Harsono
Direktur	: Effendi	Effendi
Direktur Operasi (Plt)	: Effendi	Effendi

c. Entitas Anak

Perusahaan mempunyai Entitas Anak yaitu :

- PT Pelita Bandar Nasional (PBN)
- PT Pialang Asuransi Nasional Indonesia Jaya (PANI)

Entitas Anak yang dikonsolidasi dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Presentasi Kepemilikan	Tahun Operasi Komersial	Jumlah Aset Sebelum Eliminasi	
					2020	2019
PT Pelita Bandar Nasional	Surabaya	Bongkar Muat	98%	1989	7.606.502.728	7.102.059.249
PT Pialang Asuransi Nasional Indonesia Jaya	Jakarta	Asuransi	95%	2019	4.203.086.985	4.065.059.858

1. UMUM (Lanjutan)

c. Entitas Anak (Lanjutan)

PT Pelita Bandar Nasional (PT PBN)

Pelita Bandar Nasional (PT PBN) Surabaya didirikan berdasarkan Akta Notaris Atmadji di Surabaya No. 19 tanggal 28 Juni 1989 dan telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan Nomor C - 131213 tahun 2000 tanggal 6 Juli 2000. Anggaran Dasar Perusahaan diperbaharui dengan Akta Notaris Sujadi. S.H No. 3 tanggal 11 Juni 2009. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp250.000.000.

Anggaran Dasar Perusahaan diperbaharui dengan Akte Notaris Sujadi. S.H. No. 3 tanggal 11 Juni 2011. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp250.000.000.

Maksud dan Tujuan Perusahaan didirikan adalah :

- Melakukan kegiatan jasa bongkar muat termasuk kegiatan dalam bidang *stevedoring, cargodoring, recover*, dan kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan usaha bongkar muat.
- Kegiatan usaha lainnya yang menunjang pelaksanaan usaha bongkar muat.

Perusahaan berkedudukan di Jalan Perak Barat No. 437. Surabaya. Pada tanggal 31 Desember 2020 jumlah karyawan tetap Perusahaan adalah 10 orang (tidak audit).

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Pelita Bandar Nasional per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Komisaris :		
Komisaris Utama	: Effendi	Asiano Y. I. Lontoh
Anggota Komisaris	: Patoh Sembiring	Eko Sugiarto
Direksi :		
Direktur Utama	: Nur Hasanudin	Nur Hasanudin

PT Pialang Asuransi Nasional Indonesia Jaya (PT PANI)

PT Pialang Asuransi Nasional Indonesia Jaya (PT PANI) didirikan berdasarkan Akta Notaris Abdul Jumin S.H., MKn No. 07 tanggal 8 Agustus 2018 dan telah mendapatkan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0040074.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp. 3.000.000.000.

Maksud dan Tujuan Perusahaan didirikan adalah :

Pialang asuransi yang meliputi pialang asuransi memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

1. UMUM (Lanjutan)

c. Entitas Anak (Lanjutan)

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak bulan Oktober 2019.

Perusahaan berkedudukan di Komplek Perkantoran Pulomas 1 Gedung 1 Lt 2. Jl. Jend Ahmad Yani No. 2 Jakarta Timur.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Komisaris	
Komisaris Utama	: Effendi
Komisaris	: Drs Wibisono MM
Direksi	
Direktur Utama	: Samsudin
Direktur	: Rudy Haryono

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

Dalam tahun 2020 ini Perusahaan telah menerapkan semua Standar Akuntansi revisi serta Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan ini termasuk bilamana terdapat standar baru dan revisi, serta interpretasinya yang berdampak terhadap perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan yang mempengaruhi penyajian dan pengungkapan laporan keuangan komparasi untuk periode berjalan dan periode komparasi sebelumnya.

Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan

Pada tanggal 1 Januari 2020 Perusahaan menerapkan PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif sejak tanggal tersebut. Penyesuaian terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan telah dibuat berdasarkan ketentuan transisi dalam masing-masing standar dan interpretasi.

Penerapan dari standar-standar dan amendemen yang relevan terhadap kegiatan operasional dan bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap Perusahaan sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

- PSAK 71 “Instrumen Keuangan”
- PSAK 72 “Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan”
- PSAK 73 “Sewa”

Dampak terhadap laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

- PSAK 71 “Instrumen keuangan”

PSAK 71 menggantikan ketentuan PSAK 55 yang terkait dengan pengakuan, klasifikasi dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian pengakuan keuangan, penurunan nilai aset keuangan dan instrumen akuntansi lindung nilai.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (Lanjutan)

Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan (Lanjutan)

Penerapan PSAK 71 “Instrumen Keuangan” sejak 1 Januari 2020 mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Total dampak pada laba ditahan Perusahaan pada 1 Januari 2020 adalah Rp18.887.517

Pada tanggal 1 Januari 2020 Manajemen telah menilai model bisnis mana yang berlaku untuk aset keuangan yang dimiliki Perusahaan dan telah mengklasifikasikan instrumen keuangannya ke dalam kategori PSAK 71 yang sesuai.

Tabel berikut menjelaskan kategori pengukuran asli berdasarkan PSAK 55 dan kategori pengukuran baru berdasarkan PSAK 71 untuk masing masing aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 1 Januari 2020:

	Klasifikasi awal berdasarkan PSAK	Klasifikasi baru berdasarkan PSAK 71	Nilai tercatat awal berdasarkan PSAK 55	Nilai tercatat baru berdasarkan PSAK 71
Aset-aset Keuangan				
Piutang usaha	Piutang	Biaya perolehan diamortisasi	75.161.303.574	75.157.966.755
Total aset keuangan Lainnya			75.161.303.574	75.157.966.755

Penurunan nilai aset keuangan

Perusahaan memiliki jenis aset keuangan yang merujuk pada model kerugian kredit diharapkan yang baru dari PSAK 71 pada Piutang usaha.

Perusahaan diwajibkan untuk merevisi metodologi penurunan nilai berdasarkan PSAK 71 untuk masing-masing kelompok aset tersebut. Dampak dari perubahan metodologi penurunan nilai pada laba ditahan dan ekuitas Perusahaan sebesar Rp18.887.517.

Sementara kas dan setara kas dan aset keuangan lancar lainnya juga merujuk pada persyaratan penurunan nilai PSAK 71, kerugian penurunan nilai yang teridentifikasi tidak material.

Perusahaan menerapkan pendekatan sederhana PSAK 71 untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan penyisihan kerugian ekspektasian sepanjang umurnya. Hal ini mengakibatkan peningkatan penyisihan kerugian pada tanggal 1 Januari 2020 sebesar Rp3.336.817 untuk piutang usaha.

• PSAK 72 “Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan”

Perusahaan telah mengadopsi PSAK 72 Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sejak 1 Januari 2020 yang mengakibatkan perubahan kebijakan akuntansi dan penyesuaian jumlah yang diakui dalam laporan keuangan. Sesuai dengan ketentuan transisi dalam PSAK 72 Perusahaan telah mengadopsi aturan baru secara retrospektif.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (Lanjutan)

• PSAK 73 “Sewa”

Perusahaan telah menerapkan PSAK 73 Sewa secara retrospektif sejak 1 Januari 2020. Tetapi belum menyajikan kembali komparatif untuk periode pelaporan 2020, seperti yang diizinkan berdasarkan ketentuan transisi spesifik dalam standar. Oleh karena itu, reklasifikasi dan penyesuaian yang timbul dari aturan sewa guna usaha yang baru diakui dalam saldo awal neraca pada tanggal 1 Januari 2020.

Berdasarkan penerapan PSAK 73. Perusahaan mengakui liabilitas sewa sehubungan dengan sewa yang sebelumnya telah diklasifikasikan sebagai 'sewa operasi' berdasarkan prinsip sewa PSAK 30. Liabilitas ini diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman tambahan *lessee* per 1 Januari 2020. Tingkat pinjaman inkremental rata-rata tertimbang penyewa yang diterapkan pada liabilitas sewa pada tanggal 1 Januari 2020 adalah 10%.

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya. Perusahaan telah menggunakan cara praktis berikut yang diizinkan oleh standar:

- Menerapkan tingkat diskonto tunggal pada portofolio sewa dengan karakteristik yang mirip secara wajar
- Akuntansi sewa operasi dengan sisa jangka waktu sewa kurang dari 12 bulan pada tanggal 1 Januari 2020 sebagai sewa jangka pendek
- Menggunakan peninjauan kembali dalam menentukan jangka waktu sewa di mana kontrak berisi opsi untuk memperpanjang atau mengakhiri sewa

Aset hak pakai diukur sebesar jumlah yang sama dengan liabilitas sewa, disesuaikan dengan jumlah pembayaran sewa yang dibayar di muka atau yang masih harus dibayar terkait sewa tersebut yang diakui di neraca pada tanggal 31 Desember 2020.

Perubahan kebijakan akuntansi mempengaruhi item-item berikut di laporan posisi keuangan pada 1 Januari 2020:

- Aset hak guna - meningkat sebesar Rp 1.358.353.377
- Liabilitas sewa - meningkat sebesar Rp 1.365.347.826

Standar dan interpretasi standar akuntansi baru tertentu telah dikeluarkan tetapi tidak wajib diterapkan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan belum diterapkan secara dini oleh Perusahaan. Perusahaan telah mengkaji dampak dari standar dan interpretasi tersebut sebagaimana dijabarkan di bawah ini:

- Amendemen PSAK 1 “Penyajian laporan keuangan” dan PSAK 25 “Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi dan kesalahan”

Amendemen tersebut mengklarifikasi beberapa susunan kata dan definisi material dengan tujuan untuk menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka konseptual dan beberapa PSAK yang relevan.

- Amendemen PSAK 15 “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”

Amendemen tersebut mengatur bahwa entitas juga menerapkan PSAK 71 atas instrumen keuangan pada entitas asosiasi atau ventura bersama dimana metode ekuitas tidak diterapkan. Hal ini termasuk kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (Lanjutan)

- Konsesi sewa terkait Covid 19 – Amandemen PSAK 73

Sebagai akibat dari pandemi COVID-19 konsesi sewa telah diberikan kepada penyewa. Konsesi tersebut dapat diberikan dalam berbagai bentuk, termasuk pengampunan pembayaran dan penangguhan pembayaran sewa. Dewan standar membuat amendemen terhadap PSAK 73 Sewa yang memberi penyewa pilihan untuk memperlakukan konsesi sewa yang memenuhi syarat dengan cara yang sama seperti jika mereka bukan modifikasi sewa. Dalam banyak kasus, hal ini akan menghasilkan perlakuan akuntansi untuk konsesi sebagai pembayaran sewa variabel selama periode pemberiannya.

Entitas yang menerapkan kebijakan praktis harus mengungkapkan fakta ini, apakah kebijakan telah diterapkan pada semua konsesi sewa yang memenuhi syarat atau jika tidak informasi tentang sifat kontrak yang telah diterapkan serta jumlah yang diakui dalam laba rugi yang timbul dari konsesi sewa.

Implementasi dari standar-standar, amendemen dan penyesuaian tahunan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 dari standar di bawah ini tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau sebelumnya:

- ISAK 35 “Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nonlaba”
- Amendemen to ISAK 15 “Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama”
- Amendemen to PSAK 62 “Kontrak Asuransi”
- PSAK 102 “Akuntansi Murabahah”
- ISAK 101 “Pengakuan Pendapatan Murabahah Tangguh Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan”
- ISAK 102 “Penurunan Nilai Piutang Murabahah”. Dan
- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, dan Amendemen PSAK 60 tentang "Reformasi Acuan Suku Bunga”

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah mematuhi dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK”).

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun sesuai dengan Penyesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1: Penyajian Laporan Keuangan.

Sedangkan untuk laporan arus kas konsolidasian disusun sesuai dengan Penyesuaian Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 2: Laporan Arus Kas dan Amendemen PSAK 2, tentang Prakarsa Pengungkapan.

Laporan keuangan ini disusun berdasarkan konsep biaya perolehan, kecuali untuk instrumen derivatif (jika ada) yang dicatat sebesar nilai wajar.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan metode langsung (*direct method*) dan menyajikan perubahan dalam kas dan setara kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional. Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam Rupiah penuh kecuali bila dinyatakan lain.

c. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan konsolidasian pada tiap entitas dalam Grup diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (“mata uang fungsional”). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Grup.

Seluruh angka keuangan dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam Rupiah penuh kecuali apabila dinyatakan lain.

Transaksi dan Saldo

Sesuai PSAK No.10 Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing (Penyesuaian 2014), pada pengakuan awal transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional (yaitu: Rupiah). Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungsional dan valuta asing pada tanggal transaksi.

Pada akhir setiap periode pelaporan:

- Pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup;
- Pos non moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; dan
- Pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur.

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Kurs penutup yang digunakan pada akhir periode pelaporan Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah kurs tengah Bank Indonesia sebagai berikut:

	2020	2019
1 USD	14.105	13.901
1 SGD	10.644	10.321
100 YEN	13.600	12.800

Selanjutnya, untuk pungutan dan penyetoran pajak-pajak (PPN dan PPh) berkenaan dengan tagihan dan kewajiban dalam mata uang asing dibayarkan dengan Rupiah dan dicatat sesuai dengan ‘kurs pajak mingguan’ yang berlaku pada tanggal diterbitkannya faktur pajak yang bersangkutan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Prinsip-Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur) Grup sebagaimana diungkapkan pada Catatan 3b.

Pengendalian diperoleh apabila memiliki seluruh hal berikut ini:

Kekuasaan atas *investee*;

Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Pengkonsolidasian entitas anak dimulai pada saat Entitas memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Secara khusus penghasilan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dilepaskan selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal Entitas memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Entitas dieliminasi secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian.

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada Perusahaan dan kepentingan nonpengendali. Perusahaan juga mengatribusikan total laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Entitas.

Perubahan kepemilikan Entitas pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Nilai tercatat kepentingan entitas anak dan kepentingan non pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Selisih antara jumlah kepentingan non pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak keuntungan dan kerugian diakui didalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara:

- (1) keseluruhan nilai wajar yang diterima dan nilai wajar dari setiap sisa investasi; dan
- (2) nilai tercatat sebelumnya dari aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan non pengendali.

Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan / diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku).

Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 71.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

d. Prinsip-Prinsip Konsolidasi (Lanjutan)

Kepentingan Non pengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Kepentingan Non pengendali pemegang saham pada awalnya boleh diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan kepentingan non pengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat pada saat akuisisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi, nilai tercatat kepentingan non pengendali adalah jumlah kepentingan non pengendali pada pengakuan awal ditambah dengan proporsi kepentingan nonpengendali atas perubahan selanjutnya dalam ekuitas.

Jumlah pendapatan komprehensif diatribusikan pada kepentingan non pengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non pengendali mempunyai saldo defisit.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Grup dan entitas anak pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Nilai tercatat kepentingan entitas anak dan kepentingan non pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan non pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Bagian kepemilikan pemegang saham minoritas atas aset neto Entitas Anak disajikan sebagai "Kepentingan Non pengendali" pada Laporan Posisi Keuangan konsolidasian. Hak minoritas atas laba (rugi) neto Entitas Anak pada Laporan Laba Rugi Komprehensif konsolidasian disajikan sebagai "Laba/Rugi Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Nonpengendali".

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau Entitas yang terkait dengan Entitas yang menyiapkan laporan keuangannya ("Grup pelapor"):

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Entitas pelapor
 - b) Memiliki pengaruh signifikan atas Entitas pelapor, atau
 - c) Personal manajemen kunci Entitas pelapor atau perusahaan induk Entitas pelapor.
- 2) Suatu perusahaan berelasi dengan Entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a) Entitas dan Entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Entitas induk Entitas anak dan Entitas anak berikutnya terkait dengan Entitas lain);
 - b) Suatu Entitas adalah Entitas asosiasi atau ventura bersama dari Entitas lain (atau Entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana Entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c) Kedua perusahaan tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d) Satu Entitas adalah ventura bersama dari Entitas ketiga dan Entitas yang lain adalah Entitas asosiasi dari Entitas ketiga;
 - e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan paska kerja untuk imbalan kerja dari Perusahaan atau entitas yang terkait dengan Perusahaan. Jika Perusahaan adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut maka entitas sponsor juga berelasi dengan Perusahaan;

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

e. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (Lanjutan)

- f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (1);
- g) Orang yang diidentifikasi dalam angka (1) huruf (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (entitas induk dari entitas); dan
- h) Entitas atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut menyediakan jasa personal manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Semua transaksi penting dengan pihak berelasi baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai Setara Kas antara lain:

- 1) Deposito berjangka yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya (termasuk *deposit on call*); dan
- 2) Instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

g. Kas dan Setaran Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan setara kas yang ditempatkan sebagai bank garansi jaminan pelaksanaan dan lainnya untuk tujuan tertentu disajikan sebagai "Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya."

h. Instrumen Keuangan

h.1. Aset Keuangan

Kebijakan berlaku setelah 1 Januari 2020

Klasifikasi

Mulai 1 Januari 2020 Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori pengukuran berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar (baik melalui penghasilan komprehensif lain atau melalui laba rugi) dan
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Klasifikasi tersebut tergantung pada model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas.

Untuk aset yang diukur pada nilai wajar, keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Untuk investasi pada instrumen utang, hal ini akan bergantung pada model bisnis dimana investasi tersebut diadakan. Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan hal ini akan tergantung pada apakah Grup telah melakukan pemilihan tak terbatal pada saat pengakuan awal untuk mencatat investasi ekuitas pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

h.1. Aset Keuangan (Lanjutan)

Kebijakan berlaku setelah 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Pengukuran

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Biaya transaksi dari aset keuangan yang dicatat pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dibebankan pada laporan laba rugi.

Aset keuangan dengan derivatif melekat dipertimbangkan secara keseluruhan saat menentukan apakah arus kasnya hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga

Instrumen Utang

Pengukuran selanjutnya instrumen utang bergantung pada model bisnis Grup dalam mengelola aset dan karakteristik arus kas dari aset tersebut. Ada tiga kategori pengukuran yang Grup mengklasifikasikan instrumen utangnya:

- Biaya perolehan diamortisasi: Aset yang dimiliki untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dimana arus kas tersebut hanya mewakili pembayaran pokok dan bunga diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya atau penurunan nilainya. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI): Aset yang dimiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk menjual aset keuangan di mana arus kas aset tersebut hanya atas pembayaran pokok dan bunga. diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Perubahan nilai tercatat dilakukan melalui penghasilan komprehensif lain kecuali untuk pengakuan keuntungan atau kerugian penurunan nilai pendapatan bunga dan keuntungan dan kerugian selisih kurs yang diakui dalam laba rugi. Ketika aset keuangan dihentikan pengakuannya keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi dan diakui dalam keuntungan / (kerugian) lain-lain. Pendapatan bunga dari aset keuangan tersebut dimasukkan ke dalam pendapatan keuangan dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan dan kerugian selisih kurs disajikan dalam keuntungan dan kerugian lain-lain dan beban penurunan nilai pada beban lain-lain.
- Nilai wajar melalui laba rugi: Aset yang tidak memenuhi kriteria untuk biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari investasi utang yang selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai diakui dalam laporan laba rugi dan disajikan bersih dalam laporan laba rugi di dalam keuntungan / (kerugian) lainnya, dalam periode kemunculannya.

Instrumen Ekuitas

Grup selanjutnya mengukur semua investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika manajemen Grup telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian nilai wajar atas investasi ekuitas dalam penghasilan komprehensif lain tidak ada reklasifikasi keuntungan dan kerugian nilai wajar ke laba

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

h.1. Aset Keuangan (Lanjutan)

Instrumen Ekuitas (Lanjutan)

rugi setelah penghentian pengakuan investasi tersebut. Dividen dari investasi semacam itu tetap diakui dalam laba rugi sebagai pendapatan lainnya ketika hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui dalam keuntungan / (kerugian) lain-lain dalam laporan laba rugi sebagaimana berlaku. Kerugian penurunan nilai (dan pemulihan kerugian penurunan nilai) atas investasi ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak dilaporkan secara terpisah dari perubahan nilai wajar lainnya.

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori berikut ini: diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pinjaman dan piutang tersedia untuk dijual serta dimiliki hingga jatuh tempo. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan perolehan aset keuangan. Grup menentukan klasifikasi aset keuangan pada saat awal pengakuan.

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut:

- Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi adalah aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan. Aset keuangan diklasifikasikan ke dalam kategori ini jika perolehannya terutama untuk dijual dalam jangka pendek. Derivatif juga dikategorikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali jika ditetapkan sebagai lindung nilai. Aset pada kategori ini diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan; jika tidak aset tersebut diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

- Pinjaman yang diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran yang tetap atau dapat ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi harga di pasar aktif. Pinjaman yang diberikan dan piutang dimasukkan sebagai aset lancar kecuali jika jatuh temponya melebihi 12 bulan setelah akhir periode pelaporan. Pinjaman yang diberikan dan piutang ini dimasukkan sebagai aset tidak lancar.

- Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah instrumen non derivatif yang ditentukan pada kategori ini atau tidak diklasifikasikan pada kategori yang lain. Aset keuangan tersedia untuk dijual dimasukkan sebagai aset tidak lancar kecuali investasinya jatuh tempo atau Grup bermaksud melepaskannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

h.1. Aset Keuangan (Lanjutan)

- Dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan dimana Perusahaan mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset tersebut hingga jatuh tempo dan tidak ditetapkan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi atau tersedia untuk dijual.

Pengukuran

Investasi pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi untuk seluruh aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada awalnya dicatat sebesar nilai wajar dan biaya transaksinya dibebankan pada laporan laba rugi. Aset keuangan tersedia untuk dijual dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi selanjutnya dicatat sebesar nilai wajar. Pinjaman yang diberikan dan piutang dan aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Selisih neto yang timbul dari perubahan nilai wajar kategori “aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi” disajikan pada laporan laba rugi dalam “penghasilan keuangan” dalam periode terjadinya. Perubahan nilai wajar efek moneter dan non-moneter yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual diakui pada pendapatan komprehensif lainnya.

Pendapatan dividen dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan sekuritas yang tersedia untuk dijual diakui pada laporan laba rugi sebagai “penghasilan lain-lain” ketika hak Perusahaan untuk menerima pembayaran sudah ditetapkan. Pendapatan bunga aset keuangan tersebut dicatat pada “penghasilan keuangan”.

Bunga atas efek yang tersedia untuk dijual dihitung dengan menggunakan metode bunga efektif yang diakui pada laporan laba rugi sebagai “penghasilan keuangan”.

h.2. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Kebijakan berlaku setelah 1 Januari 2020

Pada setiap akhir periode pelaporan Grup menilai apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan telah mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai terjadi hanya jika terdapat bukti objektif bahwa penurunan nilai merupakan akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset (peristiwa kerugian) dan peristiwa kerugian (atau peristiwa) tersebut memiliki dampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi pada instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual penurunan nilai wajar efek yang signifikan dan berkepanjangan di bawah harga perolehan dapat dianggap sebagai indikator bahwa aset tersebut mengalami penurunan nilai.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

h.2. Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Kebijakan berlaku setelah 1 Januari 2020 (Lanjutan)

a) Aset dicatat sebesar harga perolehan diamortisasi

Untuk kategori pinjaman yang diberikan dan piutang jumlah kerugian diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang diestimasi (tidak termasuk kerugian kredit masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset dikurangi dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi. Jika pinjaman yang diberikan memiliki tingkat bunga mengambang tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur kerugian penurunan nilai adalah tingkat bunga efektif saat ini yang ditentukan dalam kontrak. Untuk alasan praktis Grup dapat mengukur penurunan nilai berdasarkan nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

Jika pada periode selanjutnya jumlah penurunan nilai berkurang dan penurunan tersebut dapat dihubungkan secara objektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (misalnya meningkatnya peringkat kredit debitur) pemulihan atas jumlah penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya diakui pada laporan laba rugi.

b) Aset diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual

Jika terdapat bukti objektif dari penurunan nilai aset keuangan yang tersedia untuk dijual kerugian kumulatif diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dan nilai wajar saat ini dikurangi rugi penurunan nilai aset keuangan tersebut yang sebelumnya diakui pada laporan laba rugi – dihapus dari ekuitas dan diakui pada laporan laba rugi. Jika di periode selanjutnya nilai wajar instrumen utang yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual mengalami kenaikan dan kenaikan tersebut dapat dikaitkan secara objektif dengan suatu peristiwa yang terjadi setelah rugi penurunan nilai diakui di laporan laba rugi, rugi penurunan nilai tersebut dibalik melalui laporan laba rugi.

Penurunan nilai atas instrumen ekuitas yang diakui di laporan keuangan konsolidasian tidak dibalik melalui laporan laba rugi konsolidasian pada periode berikutnya.

Grup menilai dengan dasar perkiraan masa yang akan datang kerugian kredit ekspektasian terkait dengan instrumen utangnya yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Metodologi penurunan nilai yang diterapkan tergantung pada apakah telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan

Untuk piutang usaha. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan yang diizinkan oleh PSAK 71, yang mensyaratkan kerugian seumur hidup yang diharapkan harus diakui dari pengakuan awal piutang.

h.3. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur sebesar nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam akuisisi atau penerbitan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi) dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan sesuai dengan pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan akuisisi liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui segera dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Grup memiliki liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi terkait dengan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif tidak diungkapkan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

h.3. Liabilitas Keuangan (Lanjutan)

Liabilitas keuangan lain-lain merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Jika substansi perjanjian kontraktual mengharuskan Grup untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan ini pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan memperhitungkan dampak amortisasi (atau akresi) berdasarkan suku bunga efektif atas premi diskonto dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika dan hanya jika liabilitas Grup telah dilepaskan dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

h.4. Saling-Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling-hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian jika dan hanya jika:

- a. Saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling-hapus atas jumlah yang telah diakui; dan
- b. Terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

h.5. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- Jika tidak terdapat pasar utama di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

h.5. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar utamanya bertindak untuk kepentingan ekonomi terbaik mereka.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan dimana data memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input relevan yang tidak dapat diobservasi.

Seluruh aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- 1) Level 1-Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- 2) Level 2-Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;
- 3) Level 3-Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran yang tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui sebesar nilai wajar dalam laporan keuangan konsolidasian secara berulang. Grup menentukan apakah terjadi transfer antara Level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar Grup telah menentukan kategori aset dan liabilitas berdasarkan sifat karakteristik dan risiko dari aset atau liabilitas tersebut dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal Laporan Posisi Keuangan (neraca) adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (*bid price* untuk posisi beli dan *ask price* untuk posisi jual), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila *bid price* dan *ask price* yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian.

Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini (*net present value*) perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi (*options pricing models*) dan model penilaian lainnya.

Dalam hal nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal menggunakan teknik penilaian, maka investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga dinyatakan pada biaya perolehan setelah dikurangi penurunan nilai.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (Lanjutan)

h.6. Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

i. Investasi Pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee* tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan menggunakan metode ekuitas kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 71. Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dengan metode ekuitas investasi pada entitas asosiasi diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi melebihi kepentingan Grup pada entitas asosiasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang yang secara substansi membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam entitas asosiasi). Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya.

Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Grup mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dari tanggal pada saat investasi menjadi entitas asosiasi. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Grup atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen asosiasi yang diakui pada tanggal akuisisi diakui sebagai *goodwill*. *Goodwill* termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilai sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan dari kepemilikan Grup dari nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali, segera diakui di dalam laba rugi pada periode dimana investasinya diperoleh.

Jika perlu jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk *goodwill*) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 71. Penurunan Nilai Aset sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi.

Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 (revisi 2014) sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas dari tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual.

Pada saat pelepasan suatu entitas asosiasi yang mengakibatkan Grup kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi investasi yang tersisa diukur pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajarnya dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sebagai suatu aset keuangan sesuai dengan PSAK 71.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

i. Investasi Pada Entitas Asosiasi (Lanjutan)

Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya atas entitas asosiasi diatribusikan ke sisa kepemilikan dan nilai wajar termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian atas pelepasan entitas asosiasi.

Grup memperhitungkan seluruh jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi tersebut dengan menggunakan dasar yang sama dengan yang diperlukan jika entitas asosiasi telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Oleh karena itu jika keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait maka Grup mereklasifikasi keuntungan atau kerugian dari ekuitas ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) sejak Grup menghentikan menggunakan metode ekuitas.

Jika Grup mengurangi bagian kepemilikan pada entitas asosiasi tetapi Grup tetap menerapkan metode ekuitas. Grup mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait).

Ketika Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebesar kepemilikan dalam entitas asosiasi yang tidak terkait dengan Grup.

j. Persediaan

Biaya perolehan ditentukan dengan metode masuk pertama keluar pertama (*first in first out - FIFO*). Pada akhir periode persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih mana yang lebih rendah. Nilai realisasi bersih merupakan taksiran harga jual persediaan dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih pada tahun berjalan.

Cadangan atas persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca).

k. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayar untuk masa manfaat dua belas bulan atau lebih. Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya menggunakan metode garis lurus.

Pada akhir periode pelaporan biaya dibayar dimuka disajikan sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui pada periode berjalan. Biaya dibayar dimuka jangka panjang disajikan sebagai "Aset Tidak Lancar Lainnya" dalam Laporan Posisi Keuangan (neraca).

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

l. Uang muka

Uang muka merupakan sejumlah kas keluar atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk suatu kegiatan atau suatu hal yang nantinya akan mendapat pertanggungjawaban dalam waktu tertentu dan telah ditetapkan.

m. Aset Tetap

Aset tetap kecuali tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan (*cost method*). tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai jika ada. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan seperti beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya.

Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan (selain tanah) dimulai pada tanggal aset tersebut digunakan atau siap untuk digunakan, penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

m. Aset Tetap (Lanjutan)

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan
Tanah	Tidak Ada Batasan	
Bangunan	40 Tahun	2.5%
Mesin Instalasi dan Peralatan Penunjang	15 Tahun	15.00%
Alat-alat Berat	12 Tahun	8.33%
Kendaraan	5 Tahun	20%
Inventaris dan Perabotan Rumah Tangga	6-7 Tahun	15%

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Nilai residu umur manfaat serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Aset Dalam Penyelesaian

Aset dalam penyelesaian merupakan aset tetap dalam tahap konstruksi dinyatakan sebesar biaya perolehan berdasarkan persentase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan, Dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap, yang dinyatakan berdasarkan biaya perolehan yaitu harga perolehan, biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap dan biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai aset selama masa pembangunan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut telah digunakan sesuai tujuannya, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

Aset Tidak Produktif/Tidak Berfungsi

Aset tetap yang tidak memberikan manfaat dalam aktivitas produksi/usahanya atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan/pelepasannya dikategorikan sebagai aset tidak produktif/tidak berfungsi dan disajikan pada kelompok aset tidak lancar lainnya.

Aset tetap pada kategori tersebut dilakukan penurunan nilai sebesar nilai tercatatnya pada saat tidak lagi memberikan manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Akumulasi penurunan nilai aset tidak produktif dibentuk sebagai penerapan atas akuntansi penurunan nilai.

Penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap mengikuti ketentuan yang berlaku. Aset tetap tidak produktif dihentikan pengakuannya bilamana telah mendapat persetujuan penghapusan dari Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham. Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap tidak produktif usulan penghapusan ini diakui pada kelompok pendapatan atau beban lain-lain.

Grup menerapkan PSAK No. 48 (Revisi 2014). "Penurunan Nilai Aset", yang mengatur lebih dalam kriteria mengenai hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan kriteria penyelesaian secara neto.

Pada setiap akhir tahun pelaporan Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian tahunan penurunan nilai aset (yaitu aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas aset takberwujud yang belum dapat digunakan atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai biaya "Rugi Penurunan Nilai".

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Penilaian dilakukan pada setiap akhir tahun pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat setelah dikurangi penyusutan. seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya.

Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut penyusutan aset tersebut disesuaikan di tahun mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi dikurangi nilai sisanya dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

n. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud dicatat pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Aset tak berwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset tak berwujud.

Umur manfaat aset tak berwujud dinilai sebagai terbatas atau tidak terbatas. Aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi sesuai umur manfaat ekonomis dan diuji untuk penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa aset tak berwujud mengalami penurunan nilai. Periode dan metode amortisasi aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah sekurang-kurangnya pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan pada perkiraan umur manfaat atau pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dijadikan pertimbangan dalam mengubah periode atau metode amortisasi dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas dicatat sebagai beban pada laba rugi sesuai dengan fungsi aset tak berwujud tersebut.

Aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi tetapi diuji setiap tahun untuk penurunan nilai secara individual atau pada tingkat unit penghasil kas. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali. Umur manfaat aset takberwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah peristiwa dan kondisi dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak maka perubahan umur manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Aset tak berwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi.

Biaya-biaya yang tidak mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode tidak dapat ditangguhkan termasuk kerugian yang timbul dari kegiatan awal operasi dan biaya pra-operasi / perintisan usaha.

o. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah penerimaan uang dari pihak lain sehubungan dengan jasa yang akan dilakukan oleh entitas dimasa depan tetapi jasa tersebut belum diserahkan kepada pihak tersebut.

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan dan beban diakui berdasarkan metode akrual. Pendapatan diperoleh dari penjualan produk dan atau jasa setelah dikurangi dengan retur penjualan. Pendapatan diakui pada saat terjadinya transaksi penjualan pemberian jasa dan penyerahan barang dan penerbitan faktur sedangkan beban diakui pada saat terjadinya.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban (Lanjutan)

Kebijakan berlaku setelah 1 Januari 2020

Sejak 1 Januari 2020 Grup telah menerapkan PSAK 72 yang membutuhkan pendapatan pengakuan untuk memenuhi 5 langkah penilaian:

1. Identifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Identifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.
3. Tentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Jika pertimbangan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel. Grup memperkirakan jumlah imbalan yang diharapkan berhak sebagai imbalan atas pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi perkiraan jumlah jaminan tingkat layanan yang akan dibayarkan selama masa kontrak.
4. Alokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya ekspektasian ditambah marjin.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan)

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan kurang dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Liabilitas kontrak diakui setelah imbalan yang dibayarkan oleh pelanggan lebih dari saldo kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi.

q. Sewa

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Pada awal masa sewa, *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.

Grup menerapkan PSAK No.30 "Sewa". Berdasarkan PSAK No.30 klasifikasi sewa berdasarkan pada sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada *lessor* atau *lessee* dan pada substansi transaksi dan bukan pada bentuk kontraknya.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

q. Sewa (Lanjutan)

Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Pada awal masa sewa, *lessee* mengakui sewa pembiayaan sebagai aset dan liabilitas dalam neraca sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.

Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas. Beban keuangan harus dialokasikan ke setiap periode selama masa sewa sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atau saldo liabilitas.

Jumlah yang dapat disusutkan dari aset sewaan dialokasikan ke setiap periode akuntansi selama masa perkiraan masa penggunaan dengan dasar yang sistematis dan konsisten dengan kebijakan penyusutan aset yang dimiliki jika tidak terdapat kepastian yang memadai bahwa *lessee* akan mendapatkan hal kepemilikan pada akhir masa sewa maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa dan umur manfaat aset sewaan.

Kebijakan Berlaku Setelah 1 Januari 2020

Lessor mengklasifikasikan setiap sewa sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan.

Lessor mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus atau sistematis lainnya. *Lessor* menerapkan dasar sistematis lain jika basis tersebut lebih mewakili pola di mana manfaat dari penggunaan aset yang mendasarinya berkurang.

Lessor mengakui biaya, termasuk penyusutan, yang terjadi dalam memperoleh pendapatan sewa sebagai beban.

Lessor menambahkan biaya langsung awal yang timbul dalam memperoleh sewa operasi ke nilai tercatat aset yang mendasarinya dan mengakui biaya tersebut sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa.

Kebijakan penyusutan untuk aset dasar yang dapat didepresiasi yang dikenakan sewa operasi harus konsisten dengan kebijakan penyusutan normal *lessor* untuk aset serupa. *Lessor* menghitung depresiasi sesuai dengan PSAK 16.

Lessor menerapkan PSAK 48 untuk menentukan apakah aset yang mendasari sewa operasi mengalami penurunan nilai dan mencatat setiap kerugian penurunan nilai yang diidentifikasi.

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan atau mengandung, sewa dibuat berdasarkan substansi perjanjian itu sendiri dan penilaian apakah pemenuhan atas perjanjian bergantung dari penggunaan aset tertentu atau aset dan apakah perjanjian memberikan hak untuk menggunakan aset.

Grup menyewa berbagai aset tetap. Kontrak sewa biasanya dibuat untuk periode tetap dari 5 hingga 10 tahun tetapi mungkin memiliki opsi ekstensi.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

q. Sewa (Lanjutan)

Kebijakan Berlaku Setelah 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Persyaratan sewa dinegosiasikan secara individual dan berisi berbagai persyaratan dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberlakukan perjanjian apapun selain jaminan untuk tujuan peminjaman.

Sewa diakui sebagai aset hak pakai dan liabilitas terkait pada tanggal di mana aset sewaan tersedia untuk digunakan oleh Grup, setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan ke laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga *periodic* yang konstan atas saldo liabilitas yang tersisa untuk setiap periode. Aset hak pakai didepresiasi selama periode yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa sewa dengan metode garis lurus.

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- Pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa
- Pembayaran sewa variabel yang didasarkan pada indeks atau tingkat, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau tingkat pada tanggal mulai.
- Jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa berdasarkan jaminan nilai residu.
- Harga pelaksanaan dari opsi pembelian jika penyewa cukup yakin untuk menggunakan opsi tersebut, dan
- Pembayaran penalti untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan penyewa yang melaksanakan opsi tersebut.

Pembayaran sewa yang harus dilakukan berdasarkan opsi perpanjangan tertentu juga termasuk dalam pengukuran liabilitas.

Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika tarif tidak dapat segera ditentukan di mana hal tersebut secara umum terjadi pada sewa dalam Perusahaan suku bunga pinjaman incremental penyewa digunakan yaitu tarif yang harus dibayar oleh penyewa untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak guna dalam lingkungan ekonomi serupa dengan syarat dan ketentuan yang serupa.

Untuk menentukan suku bunga pinjaman tambahan.:

Aset dan liabilitas yang timbul dari sewa pada awalnya diukur dengan basis nilai kini. Liabilitas sewa termasuk nilai bersih sekarang dari pembayaran sewa berikut:

- Jika memungkinkan, menggunakan pembiayaan pihak ketiga terkini yang diterima oleh penyewa individu sebagai titik awal disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kondisi pembiayaan sejak pembiayaan pihak ketiga diterima.
- Menggunakan pendekatan *build-up* yang dimulai dengan suku bunga bebas risiko yang disesuaikan dengan risiko kredit dan
- Membuat penyesuaian spesifik untuk sewa, misalnya jangka waktu, negara, mata uang, dan keamanan.

Grup dihadapkan pada potensi kenaikan di masa depan dalam pembayaran sewa variabel berdasarkan indeks atau tarif yang tidak termasuk dalam liabilitas sewa sampai diberlakukan. Ketika penyesuaian pembayaran sewa berdasarkan indeks atau suku bunga mulai berlaku, liabilitas sewa dinilai kembali dan disesuaikan dengan aset hak guna.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

q. Sewa (Lanjutan)

Kebijakan Berlaku Setelah 1 Januari 2020 (Lanjutan)

Pembayaran sewa dialokasikan antara biaya pokok dan keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laporan laba rugi selama masa sewa sehingga menghasilkan suku bunga periodik yang konstan atas sisa saldo liabilitas untuk setiap periode.

Aset hak pakai diukur pada biaya perolehan yang terdiri dari berikut ini:

- Jumlah pengukuran awal liabilitas sewa
- Pembayaran sewa yang dilakukan pada saat sebelum tanggal dimulainya dikurangi insentif sewa yang diterima
- Biaya langsung awal, Dan
- Biaya restorasi.

Aset hak guna umumnya disusutkan sepanjang waktu yang lebih pendek antara lama masa manfaat aset dan jangka waktu sewa menggunakan metode garis lurus. Jika grup cukup yakin untuk melaksanakan opsi pembelian aset hak guna disusutkan selama masa manfaat aset yang mendasarinya. Sementara grup menilai kembali tanah dan bangunannya yang ada di dalam properti, gedung dan peralatan. Grup memilih untuk tidak melakukannya untuk bangunan hak guna yang dimiliki oleh Grup.

Pembayaran terkait dengan sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah diakui atas dasar garis lurus sebagai beban dalam laporan laba rugi. Sewa jangka pendek adalah sewa dengan masa sewa 12 bulan atau kurang.

Opsi Ekstensi dan Terminasi

Opsi ekstensi dan terminasi termasuk dalam sejumlah sewa properti dan peralatan di seluruh Grup. Istilah-istilah ini digunakan untuk memaksimalkan fleksibilitas operasional dalam hal pengelolaan kontrak. Mayoritas opsi ekstensi dan terminasi yang dimiliki hanya dapat dilaksanakan oleh Grup dan bukan oleh pemberi sewa masing-masing.

Jaminan Nilai Residu

Untuk mengoptimalkan biaya sewa selama periode kontrak, Grup terkadang memberikan jaminan nilai residu sehubungan dengan sewa peralatan.

Pendapatan sewa guna usaha dari kegiatan operasi sewa dimana Grup bertindak sebagai pemberi sewa diakui sebagai pendapatan secara garis lurus selama masa sewa.

r. Provisi

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Provisi diakui ketika Grup memiliki Liabilitas kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu dan besar kemungkinan Grup diharuskan menyelesaikan Liabilitas serta jumlah Liabilitas tersebut dapat diestimasi secara andal.

Jumlah diakui sebagai provisi merupakan taksiran terbaik yang diharuskan menyelesaikan Liabilitas pada tanggal laporan posisi keuangan dengan memperhatikan unsur risiko dan ketidakpastian yang melekat pada Liabilitas tersebut. Provisi diukur menggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan Liabilitas kini dengan jumlah tercatatnya sebesar nilai kini dari arus kas tersebut.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

r. Provisi (Lanjutan)

Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga. Piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

Imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan kerja yang akan dibayarkan/terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Kewajiban pembayaran imbalan ini diakui sebesar jumlah yang didiskontokan dan jatuh tempo setelah satu periode akuntansi dan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi komprehensif dan liabilitas.

Bagian kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu satu periode akuntansi akan dicatat sebagai liabilitas jangka pendek dan bagian kewajiban yang akan jatuh tempo setelah satu periode akuntansi dicatat sebagai liabilitas jangka panjang.

s. Pensiun

Program Pensiun Manfaat Pasti

Program Dana Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah manfaat pensiun, yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun setelah memperhitungkan faktor usia masa kerja dan jenjang kepangkatan (golongan) dan nilai kompensasi.

Dalam program ini manfaat pensiun yang akan dibayarkan dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir dan masa kerja karyawan. Program manfaat pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Perseroan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4).

Pembayaran kontribusi (iuran dana pensiun) kepada Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) dibiayai oleh karyawan (Peserta) dan Perseroan (Pemberi Kerja). Iuran Dana Pensiun (IDP) beban peserta ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun dan kontribusi Perseroan. IDP beban pemberi kerja ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuarial sesuai dengan kebutuhan dana bagi pembiayaan Program Pensiun setelah dikurangi IDP beban peserta. Perhitungan aktuarial dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun.

Untuk tujuan pelaporan keuangan imbalan pensiun manfaat pasti dihitung dengan menggunakan asumsi aktuarial berdasarkan metode *Projected Unit Credit* (PUC) seperti yang diharuskan oleh PSAK No. 24 (Revisi 2013) "Imbalan Kerja". Untuk tujuan pendanaannya metode aktuarial yang digunakan adalah *Projected Benefit Cost Method* dengan capaian usia normal.

Seluruh pengukuran kembali terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset dana pensiun (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak mengklasifikasi laba atau rugi pada periode berikutnya.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

t. Imbalan Kerja

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan.

Beban bunga dan pengambilan aset dana pensiun yang diharapkan sebagaimana digunakan dalam PSAK 24 versi sebelumnya digantikan dengan beban bunga – neto yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto untuk mengukur kewajiban manfaat pasti – neto atau aset pada saat awal dari tiap periode pelaporan tahunan.

Program iuran pasti diakui sebesar jumlah yang tak-diskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan interim setelah dikurangi iuran yang telah dibayar dan sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Jika iuran yang telah dibayar melebihi iuran terutang untuk jasa sebelum akhir periode pelaporan maka kelebihan tersebut diakui sebagai aset sepanjang kelebihan tersebut akan mengurangi pembayaran iuran masa depan atau pembayaran kembali dalam bentuk kas.

u. Perpajakan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas dan penghasilan komprehensif lain.

Pajak kini

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Beban pajak kini Grup ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Aset dan liabilitas pajak kini diakui, jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset dan jika jumlah pajak kini yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding ketika hasil banding sudah diputuskan kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari "Beban Pajak Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini saling hapus jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

u. Perpajakan (Lanjutan)

Pajak Tangguhan

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan *metode balance sheet* untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian.

Mengacu pada revisi PSAK No. 46 sebagaimana disebutkan di atas pajak final tidak lagi diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Perusahaan telah memutuskan untuk menyajikan semua pajak final yang timbul dari pendapatan sewa yang dihasilkan dari properti investasi.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditinjau kembali pada tanggal laporan posisi keuangan dan nilai tercatat tersebut diturunkan apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai untuk kompensasi tersebut.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Pajak tangguhan yang berkaitan dengan transaksi baik yang ada di pendapatan komprehensif lainnya atau langsung dibebankan ke ekuitas, dicatat pada pendapatan komprehensif lainnya atau ekuitas bersangkutan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan serta Perseroan dan entitas anak yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

v. Penggunaan Saldo Laba Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

Penggunaan saldo laba yang dilakukan atas dasar keputusan/risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) direalisasikan sesuai dengan isi keputusan tersebut. Penggunaan tersebut meliputi tetapi tidak terbatas pada pembagian dividen biaya pegawai dan penyisihan saldo laba ke cadangan umum. Pembagian laba tersebut tidak diperlakukan sebagai beban (*expense*) melainkan sebagai distribusi/ pengurang saldo laba.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (Lanjutan)

w. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi total laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

keuangan yang tidak memerlukan penyesuaian, apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, seperti yang diungkapkan dalam catatan 4 pada laporan keuangan, manajemen diminta untuk membuat penilaian estimasi dan asumsi nilai tercatat aset dan liabilitas yang telah disajikan oleh sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa, pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

b. Provisi Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Provisi kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Provisi yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas. antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

c. Provisi Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Provisi kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai.

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (Lanjutan)

Pertimbangan (Lanjutan)

c. Provisi Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (Lanjutan)

Akun pinjaman dan piutang dihapus bukukan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan.

Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dibentuk dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai piutang tak tertagih yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan. Jika hasil pemeriksaan pajak mungkin berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah diestimasi maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tanggungan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Asumsi dan estimasi utama mengenai estimasi ketidakpastian di masa datang dan sumber utama estimasi tersebut pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun/periode buku selanjutnya diungkapkan di bawah ini.

Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi:

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi.

Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga). Sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud

Perseroan mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset tak berwujud berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap dan aset tak berwujud adalah berdasarkan penelaahan Grup terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset. Tetapi, adalah mungkin hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud akan meningkatkan beban penyusutan dan menurunkan nilai tercatat aset tetap dan aset takberwujud.

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (Lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

c. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Penurunan nilai muncul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) melebihi nilai terpulihkannya, yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Perhitungan nilai pakai didasarkan pada model arus kas yang didiskontokan. Perhitungan nilai pakai mengharuskan manajemen untuk mengestimasi arus kas masa mendatang yang diharapkan akan diperoleh dari unit penghasil kas menggunakan tingkat pertumbuhan dan diskonto yang wajar dalam menghitung nilai kini. Proyeksi arus kas tidak termasuk aktivitas restrukturisasi yang belum ada perikatannya atau investasi signifikan di masa depan yang akan meningkatkan kinerja dari UPK yang diuji. Nilai terpulihkan paling.

Sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi

d. Imbalan Pasca Kerja

Penentuan liabilitas dan manfaat pasca kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah kewajiban dan imbalan tersebut. Asumsi yang digunakan mencakup, antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji

Walaupun Grup berpendapat bahwa asumsi yang digunakan wajar dan dapat diandalkan, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi dapat secara material mempengaruhi jumlah liabilitas imbalan pasti pasca kerja Perusahaan. Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, liabilitas imbalan pascakerja

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Grup menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57 "Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi".

e. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan.

f. Cadangan Penurunan Nilai Persediaan Usang dan Bergerak Lambat

Cadangan persediaan usang dan bergerak lambat diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia Termasuk namun tidak terbatas kepada kondisi fisik persediaan yang dimiliki harga jual pasar estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Cadangan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

4. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (Lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (Lanjutan)

g. Provisi untuk kerugian penurunan nilai atas piutang

Penerapan PSAK 71 menyebabkan perubahan terhadap penilaian signifikan estimasi dan asumsi akuntansi terhadap provisi untuk kerugian penurunan nilai atas piutang. Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian yang menggunakan cadangan kerugian kredit ekspektasian seumur hidup untuk seluruh piutang usaha. Dalam penentuan kerugian kredit ekspektasian, manajemen diharuskan untuk menggunakan pertimbangan dalam mendefinisikan hal apa yang dianggap sebagai kenaikan risiko kredit yang signifikan dan dalam pembuatan asumsi dan estimasi. Untuk menghubungkan informasi yang relevan tentang kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi. Pertimbangan diaplikasikan dalam menentukan periode seumur hidup dan titik pengakuan awal piutang.

Pencadangan secara spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat informasi tambahan yang diterima yang memengaruhi jumlah yang diestimasi. Selain provisi khusus terhadap piutang yang signifikan secara individual. Perusahaan juga mengakui provisi penurunan nilai secara kolektif terhadap risiko kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang sama dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasi membutuhkan provisi khusus, memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi daripada ketika piutang pada awalnya diberikan kepada debitur.

Cadangan spesifik ini dievaluasi ulang dan disesuaikan karena informasi tambahan yang diterima mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Selain penyisihan khusus atas piutang yang signifikan secara individual. Perusahaan juga mengakui penyisihan penurunan nilai kolektif terhadap eksposur kredit debitur yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang umum dan meskipun tidak secara spesifik diidentifikasi sebagai memerlukan penyisihan khusus memiliki risiko gagal bayar yang lebih besar dibandingkan saat piutang pada awalnya diberikan kepada debitur.

Pada tanggal 31 Desember 2020 penyisihan penurunan nilai piutang perusahaan adalah sebesar Rp 858.778.470 Piutang Usaha (Catatan 6) dan Rp 198.064.478 Piutang lain-lain (Catatan 7).

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

5. KAS DAN SETARA KAS

	2020	2019
Kas		
Rupiah	66.917.723	57.328.551
USD	-	25.883.662
	66.917.723	83.212.213
Bank		
Pihak berelasi:		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	13.665.873.246	34.902.467.641
PT Bank BJB	288.255.466	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	283.249.078	3.110.720.256
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	213.860.262	289.143.006
Jumlah Pihak Berelasi	14.451.238.052	38.302.330.903
Pihak Ketiga:		
PT Bank Central Asia (Persero). Tbk	124.267.085	123.742.753
Jumlah Pihak Ketiga	124.267.085	123.742.753
Jumlah	14.642.422.860	38.509.285.869

Seluruh kas dan setara kas adalah milik Perusahaan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas kewajiban/pinjaman lainnya serta tidak ada yang dibatasi penggunaannya.

6. PIUTANG USAHA

	2020	2019
<u>Pihak berelasi</u>		
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	72.343.003.868	70.316.551.181
PT Sarana Bandar Nasional	118.800.000	103.914.705
Sub Jumlah	72.461.803.868	70.420.465.886
<u>Pihak ketiga</u>		
Piutang Pajak	23.514.060.531	-
CV Yoga Pratama Jaya	797.076.326	-
PT Karya Retra	683.981.360	718.981.360
PT Wahana Ria Cakrawala	565.807.140	147.950.635
RS Pelayaran Nasional Indonesia	347.285.895	-
PT Kukuh Mandiri	261.990.760	-
PT Hoka Mandiri	270.307.652	134.403.900
PT Kasuang Semesta Mandiri	164.298.240	-
PT SGS	142.836.144	-
PT Sinar Wijaya Playwood Industrie	-	57.564.492
Koperasi Bina Sejahtera	-	19.153.913
Lainnya	1.554.644.472	-
Sub Jumlah	28.302.288.520	71.498.520.186
Cadangan kerugian penurunan nilai	(677.236.722)	(152.702.702)
Jumlah Entitas Induk	100.086.855.666	71.345.817.484

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

6. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

<u>Entitas Anak</u>		
Sinar Jaya Wijaya	881.675.852	1.120.335.263
PT Pelayanan. Trip	880.724.750	831.245.705
PT Prima Sejahtera Line	587.948.806	392.170.359
PT Nindya Karya (Persero)	580.023.280	-
PT Wira Cipta Perkasa	440.708.667	453.490.844
Sari Ampenan	227.522.400	197.529.356
CV Lautan Rimba Raya	113.434.340	-
Eddy Barokah	76.320.963	76.320.964
PT Asuransi Jasa Indonesia	-	813.735.563
Lainnya	204.871.323	6.979.000
	3.993.230.381	3.891.807.054
Cadangan kerugian penurunan nilai	(181.541.748)	(76.320.964)
Jumlah Entitas Anak	3.811.688.633	3.815.486.090
Jumlah	103.898.544.299	75.161.303.574

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo Awal	229.023.666	9.595.581
Dampak Penerapan PSAK 71	3.336.819	-
Pembentukan	626.417.985	219.428.085
Saldo Akhir	858.778.470	229.023.666

Berdasarkan Umur Piutang

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Semester I	6.984.728.855	65.527.284.764
Semester II	89.787.052.511	7.888.564.791
Lebih dari 1 (satu) Tahun	7.126.762.933	1.745.454.019
Jumlah	103.898.544.299	75.161.303.574

Berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara PT Pelayanan Nasional Indonesia (Persero) dengan PT Pelita Indonesia Djaya bahwa tidak melakukan perhitungan provisi kerugian penurunan nilai piutang karena PT Pelayanan Nasional Indonesia (Persero) sudah memberikan jaminan bahwa atas piutang tersebut akan diperhitungkan dengan kewajiban PT Pelita Indonesia Djaya melalui proses kompensasi. Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tak tertagihnya piutang.

Piutang Pajak berasal dari Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Perusahaan atas tahun pajak dari Januari 2018 sampai dengan Juli 2019 yang telah direstitusi Perusahaan dan mendapatkan persetujuan berdasarkan SKPLB No. 00012/407/19/093/20 tanggal 11 November 2020. Namun pengembalian kas baru diterima pada bulan Februari 2021.

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

7. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Deposito Jaminan	30.000.000	30.000.000
Piutang Lain-Lain	3.652.565.256	1.268.430.767
Jumlah	3.682.565.256	1.298.430.767
a. Deposito Jaminan		
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Tbk	-	-
Uang Deposit	30.000.000	30.000.000
Jumlah	30.000.000	30.000.000

Kas dan Setara Kas yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito yang telah dijamin kepada PT Pelabuhan Indonesia III atas pemanfaatan gudang Jumbo Jamrud Selatan.

Aset tidak lancar merupakan uang deposit Sewa Ruko Cempaka Mas Block Q No 7 selama 2 tahun yang beralamat di Jalan Letjen Suprpto, Sumur Batu, Kemayoran - Jakarta Pusat.

b. Piutang Lain-Lain

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Pihak berelasi</u>		
Piutang Pegawai	815.080.791	13.680.759
<u>Pihak ketiga</u>		
Koperasi	2.973.223.082	1.179.605.657
Lainnya	62.325.861	75.144.351
Sub Jumlah	3.850.629.734	1.254.750.008
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(198.064.478)	-
Jumlah Piutang Ketiga	3.652.565.256	1.268.430.767

Piutang lainnya kepada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 merupakan pembayaran pinjaman modal kerja untuk Koperasi Karyawan PID dan piutang lelang kendaraan bermotor kepada karyawan.

Piutang lain-lain pada sub lainnya pada tanggal 31 Desember 2020 merupakan piutang atas Perusahaan pengurusan jasa kepabeanan sedangkan per tanggal 31 Desember 2019 merupakan piutang atas hasil lelang kendaraan yang belum selesai pelunasannya oleh Pembeli.

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

8. PERSEDIAAN

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Persediaan terdiri dari:		
Bahan <i>Chemical</i>	3.552.398.632	2.303.405.850
Permakanan	-	2.780.810.368
	<u>3.552.398.632</u>	<u>5.084.216.218</u>

Persediaan per tanggal 31 Desember 2020 tersebut merupakan persediaan Chemical yang ada di Kantor Cabang Tanjung Priok, Surabaya dan Makasar.

9. UANG MUKA

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Permakanan	22.660.862.977	5.124.687.316
Jasa pelayanan kapal	3.769.314.713	5.963.615.507
Jasa kebersihan di Kapal	2.268.473.705	1.127.805.671
Administrasi dan umum	515.220.723	412.841.091
Investasi aset tetap	126.104.365	641.400.000
Jasa pengamanan	-	1.151.781.646
Tenaga kerja bongkar muat	-	177.881.090
Jumlah	<u>29.339.976.483</u>	<u>14.600.012.321</u>

Uang muka jasa pelayanan kapal merupakan uang muka yang dibayarkan kepada divisi Jasa *Maintenance & IT*, Pelayanan Jasa, Komersial untuk swakelola pekerjaan perbaikan diatas kapal-kapal PT Pelni (Persero). Uang muka tiket dan uang muka Diklat yang belum dipertanggung jawabkan. Meningkatnya uang muka ini disebabkan karena sejak tahun 2019 perusahaan melakukan pengadaan sendiri tanpa melalui pembelian dari pihak ketiga (vendor).

Uang muka permakanan merupakan uang muka yang dibayarkan divisi komersial untuk membeli bahan makanan yang akan dikirim ke kapal-kapal PT Pelni (Persero). Meningkatnya uang muka ini disebabkan karena pelaksanaan pertanggung jawaban yang tertunda akibat pandemi Covid-19 dan proses klarifikasi kepada pihak vendor yang belum selesai.

Uang muka jasa kebersihan dikapal merupakan alat penunjang kebersihan diatas kapal-kapal PT Pelni (Persero)

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

10. Aset Kontrak

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pihak Berelasi		
PT PELNI:		
Permakanan	27.402.418.744	25.814.125.318
Usaha lainnya	11.964.727.426	29.799.961.830
Usaha Jasa	6.667.655.886	9.075.942.821
	<u>46.034.802.056</u>	<u>64.690.029.969</u>
Rumah Sakit PELNI	<u>-</u>	<u>1.362.767.835</u>
Pihak Ketiga		
Usaha lainnya	5.107.378.381	651.359.268
Jumlah	<u>51.142.180.437</u>	<u>66.704.157.072</u>

Aset Kontrak atas usaha permakanan, usaha lainnya dan usaha yaitu pendapatan yang masih harus diterima atas jasa *outsourcing*, pengadaan bahan makanan diatas kapal dan pekerjaan perawatan dan perbaikan kapal.

Aset Kontrak atas usaha lainnya yaitu pendapatan yang masih harus diterima atas kegiatan pekerjaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan *driver* kantor pusat.

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP

	2020			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
Biaya Perolehan:				
<u>Perolehan Langsung</u>				
Tanah	1.637.320.846	-	-	1.637.320.846
Gedung	16.648.716.862	1.475.374	-	16.650.192.236
Kendaraan	8.690.819.822	296.000.000	-	8.986.819.822
Inventaris				
Kantor	1.438.496.172	249.924.050	-	1.688.420.222
Kontainer	1.151.213.300	-	-	1.151.213.300
Perl. Produksi	1.242.076.713	398.447.000	-	1.640.523.713
Sub Jumlah	30.808.643.715	945.846.424	-	31.754.490.139
<u>Aset Sewa Pembiayaan</u>				
Kendaraan	23.323.920.603	7.843.461.300	-	31.167.381.903
Aset dalam Penyelesaian	262.899.396	5.632.037.547	-	5.894.936.943
Jumlah	54.395.463.714	14.421.345.271	-	68.816.808.985
Akumulasi Penyusutan:				
<u>Perolehan Langsung</u>				
Gedung	744.879.455	371.265.514	-	1.116.144.969
Kendaraan	1.500.093.781	649.055.031	-	2.149.148.812
Inventaris				
Kantor	487.170.646	269.883.905	-	757.054.551
Kontainer	1.151.213.306	-	-	1.151.213.306
Perl. produksi	288.850.448	290.583.942	-	579.434.390
Jumlah	4.172.207.636	1.580.788.392	-	5.752.996.028
<u>Aset Sewa Pembiayaan</u>				
Kendaraan	12.464.975.696	3.347.211.293	-	15.812.186.989
Jumlah	16.637.183.332	4.927.999.685	-	21.565.183.017
Nilai Buku	37.758.280.382			47.251.625.968

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

11. ASET TETAP (Lanjutan)

	2019			Saldo Akhir
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	
Biaya Perolehan:				
<u>Perolehan Langsung</u>				
Tanah	1.519.520.258	117.800.588	-	1.637.320.846
Gedung	12.952.277.148	3.696.439.714	-	16.648.716.862
Kendaraan	1.244.862.300	7.445.957.522	-	8.690.819.822
Inventaris				
Kantor	707.607.650	730.888.522	-	1.438.496.172
Kontainer	1.151.213.300	-	-	1.151.213.300
Perl. produksi	301.276.713	940.800.000	-	1.242.076.713
Sub Jumlah	17.876.757.369	12.931.886.346	-	30.808.643.718
<u>Aset Sewa Pembiayaan</u>				
Kendaraan	17.682.595.843	5.641.324.760	-	23.323.920.603
Aset dalam Penyelesaian	194.000.000	262.899.396	194.000.000	262.899.396
Jumlah	35.753.353.212	18.836.110.502	194.000.000	54.395.463.714
Akumulasi Penyusutan:				
<u>Perolehan Langsung</u>				
Gedung	393.377.178	351.502.277	-	744.879.455
Kendaraan	849.318.647	650.775.134	-	1.500.093.781
Inventaris				
Kantor	325.156.956	162.013.690	-	487.170.646
Kontainer	1.151.213.306	-	-	1.151.213.306
Perl. produksi	237.201.487	51.648.961	-	288.850.448
Jumlah	2.956.267.574	1.215.940.062	-	4.172.207.636
<u>Aset Sewa Pembiayaan</u>				
Kendaraan	8.044.024.481	4.420.951.215	-	12.464.975.696
Jumlah	11.000.292.055	5.636.891.277	-	16.637.183.332
Nilai Buku	24.753.061.157			37.758.280.382

Tanah dan bangunan milik Entitas yang terletak di Surabaya masih dalam proses hukum dan pengalihan dari pihak ketiga.

Seluruh aset tetap tidak diasuransikan dan Manajemen berpendapat bahwa tingkat risiko yang akan terjadi terhadap aset tetap tidak signifikan sehingga tidak perlu untuk di asuransikan.

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

12. ASET TAK BERWUJUD

	2020			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan:				
<u>Perolehan Langsung</u>				
Perangkat Lunak	1.289.590.135	248.000.000		1.537.590.135
Akumulasi Penyusutan:				
<u>Perolehan Langsung</u>				
Perangkat Lunak	361.740.328	215.669.764		577.410.092
Nilai Buku	<u>927.849.807</u>			<u>960.180.043</u>
	2019			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan:				
<u>Perolehan Langsung</u>				
Perangkat Lunak	976.647.655	312.942.480	-	1.289.590.135
Akumulasi Penyusutan:				
<u>Perolehan Langsung</u>				
Perangkat Lunak	198.574.992	163.165.336	-	361.740.328
Nilai Buku	<u>778.072.663</u>			<u>927.849.807</u>

13. ASET HAK GUNA

	2020				
	Saldo Awal	Dampak PSAK 73	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan:					
Gedung	-	340.351.905	378.713.976	-	719.065.881
Alat Angkut	-	2.168.348.762	-	-	2.168.348.762
Sub Jumlah	-	<u>2.508.700.667</u>	<u>378.713.976</u>	-	<u>2.887.414.643</u>
Akumulasi Penyusutan:					
Gedung	-	360.284.210	-	-	360.284.210
Alat Angkut	-	1.168.777.056	-	-	1.168.777.056
Sub Jumlah	-	<u>1.529.061.266</u>	-	-	<u>1.529.061.266</u>
Nilai Buku	-				<u>1.358.353.377</u>

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

13. ASET HAK GUNA (Lanjutan)

Aset hak guna merupakan objek sewa kendaraan alat angkut selama 3 (tiga) tahun sejak Desember 2018 hingga Desember 2021 dan sewa Gedung di Sumur Batu dan Kemayoran Jakarta Pusat dengan masa sewa selama 3 (tiga) tahun sejak November 2020 hingga Desember 2023.

Nilai perolehan dicatat sebesar nilai dibayar dimuka pada saat melakukan perjanjian sewa. nilai amortisasi dicatat sebesar perhitungan amortisasi dari awal masa sewa sampai dengan akhir masa sewa.

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

	2020	2019
Deposito		
Pihak berelasi:		
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.000.000.000	2.500.000.000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	57.300.000	57.300.000
Jumlah	<u>2.057.300.000</u>	<u>2.557.300.000</u>

15. UTANG USAHA

	2020	2019
Pihak berelasi:		
PT Telkom	2.358.700.000	-
PT Sukanda Djaya	1.639.233.458	-
PT TELE NET	1.122.389.355	3.030.240.000
PT Telkomsat	857.612.711	-
PT Amidis	645.964.940	-
PT Iti Marine & Oifield Utama	577.504.476	410.038.860
PT Asuransi Jasa Indonesia	489.837.698	371.364.000
PT Asuransi Central Asia	486.066.799	4.300.000
PT ISA TELKOM	470.150.000	454.000.000
PT Hoka Karya Mandiri	459.851.000	617.128.816
PT Tunas Cahaya Pratama	416.000.000	-
PT Ferindo Sakti	401.252.984	333.446.200
KOP Puskopal Kolinlamil	323.140.116	-
PT Eastern Indotech Multitama	309.723.197	-
PT Bilgit	300.000.000	300.000.000
PT Enseval	248.558.990	-
PT Multi Architama Mandiri	168.849.000	168.849.000
PT Unisat	166.965.500	-
PT Metta Karuna	136.155.938	-
PT Pertani	113.637.500	-
PT Intisarana	102.335.000	-
PT Eastern Citra Bamantara	-	1.164.573.630
PT Cipta karya Mandiri Insani	-	969.783.648
PT Sarana Makmur Bersaudara	-	488.853.837
Lainnya di bawah 300 juta	678.651.647	1.410.401.405
Jumlah	<u>12.472.580.309</u>	<u>9.722.979.396</u>

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN

	2020	2019
a. Pajak Dibayar Dimuka		
Entitas Induk		
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)		
PPN Masukan	10.279.134.875	25.910.010.616
Pajak Penghasilan 28a	846.436.608	-
Jumlah Entitas Induk	11.125.571.483	25.910.010.616
b. Utang Pajak		
Entitas Induk		
Pasal 21	260.958.693	700.000.000
Pasal 29	-	5.735.112.685
Pasal 25	141.180.497	-
Pasal 23	92.056.009	-
Pasal 4 ayat 2	52.087.901	-
Pajak Lainnya	42.818.727	42.818.727
Jumlah Entitas Induk	589.101.827	6.477.931.412
Entitas Anak		
PPh Pasal 29	-	1.550.010
Pasal 21	45.657.093	-
PPN Keluaran	44.141.517	1.727.800
Jumlah Entitas Anak	89.798.610	3.277.810
Jumlah	678.900.437	6.481.209.222
c. Taksiran Penghasilan		
	2020	2019
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Entitas Induk	30.121.515.146	79.326.835.694
Dikurangi Bagian Laba dari Entitas Anak	628.311.845	(591.266.601)
Laba Sebelum Koreksi Fiskal	30.749.826.991	78.735.569.093
Koreksi Fiskal :		
Perbedaan Temporer:		
Beban Manfaat Karyawan	768.562.556	520.841.641
Beban Penyisihan Piutang	793.283.498	152.702.703
Beban Penyusutan Aset Tetap	(48.264.286)	1.016.161.236
	1.513.581.768	1.689.705.580
Perbedaan Permanen:		
Sumbangan Duka	719.504.161	80.641.700
Rumah Tangga	712.925.345	363.315.333
Entertainment	567.038.836	355.326.159
Promosi Lainnya	148.705.000	13.164.627
Denda/Klaim	212.931.490	494.014.214
Beban Telekomunikasi	40.955.839	6.815.089
Beban PPh Pasal 4 (ayat 2)	-	12.088.108
Beban Non Usaha Lainnya	850.587.178	485.321.645
Pendapatan Jasa Giro dan Deposito	(343.803.048)	(295.645.840)
	2.908.844.801	1.515.041.035

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

16. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Taksiran Penghasilan (Lanjutan)							
Laba Fiskal		35.172.253.560				81.940.315.000	
Taksiran pajak penghasilan		7.737.895.783				20.485.078.750	
Kredit Pajak:							
Pajak Penghasilan Pasal 22		2.741.258.334				4.513.278.195	
Pajak Penghasilan Pasal 23		2.043.659.529				2.925.788.730	
Pajak Penghasilan Pasal 25		3.799.414.528				7.310.899.140	
		8.584.332.391				14.749.966.065	
Taksiran pajak (lebih) kurang dibayar		(846.436.608)				5.735.112.685	
Entitas Induk							
Kini		7.737.895.783				20.485.078.750	
Tanggung		(84.528.079)				(266.195.564)	
Entitas Anak							
Kini		16.073.716				1.550.010	
Jumlah taksiran pajak penghasilan		7.669.441.420				20.220.433.196	
d. Pajak Tangguhan							
		31 Desember 2019	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif	Dampak Penerapan Awal PSAK 71	Penyesuaian atas Perubahan Tarif Pajak dan Lainnya	31 Desember 2020
Penyisihan Piutang	38.175.675	174.522.370	-	(15.550.700)	(4.581.081)	192.566.264	
Penyusutan Aset Tetap	772.212.377	(10.618.143)	-	-	(92.665.485)	668.928.749	
Imbalan Kerja	1.260.111.201	169.083.762	(8.318.400)	-	(151.213.344)	1.269.663.219	
Aset Pajak Tangguhan	2.070.499.253	332.987.989	(8.318.400)	(15.550.700)	(248.459.910)	2.131.158.232	
		31 Desember 2018	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi komprehensif		31 Desember 2019	
Penyisihan Piutang	270.792.400	(232.616.725)	-	-	-	38.175.675	
Penyusutan Aset Tetap	403.610.499	368.601.878	-	-	-	772.212.377	
Imbalan Kerja	873.320.321	130.210.410	-	256.580.470	-	1.260.111.201	
Aset Pajak Tangguhan	1.547.723.220	266.195.564	256.580.470	256.580.470	256.580.470	2.070.499.253	

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

17. BEBAN AKRUAL

	2020	2019
Usaha permakanaan	30.594.455.330	26.090.613.190
Dibayar Usaha lainnya	28.372.373.457	34.702.130.326
Usaha Jasa	6.331.378.669	2.223.669.292
Administrasi dan Umum	4.782.759.610	12.903.671.869
Sampingan	-	355.685.871
Jumlah	70.080.967.066	76.275.770.548

Dibayar usaha lainnya merupakan kewajiban pada pihak ketiga atas jasa perbaikan dan perawatan diatas kapal, penyediaan bahan makanan serta layanan jaringan diatas kapal, pengadaan alat medis penanggulangan covid – 19 dan pengadaan PERTASHOP.

Pada tahun 2020 Perusahaan menerima surat nomor 06.03/04/S-B/040/2020 mengenai hasil pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2019, yang menimbulkan kewajiban pada PT Pelita Indonesia Djaya sebesar Rp7.566.266.873 atas denda keterlambatan penyerahan pekerjaan pengadaan pakaian dinas harian nahkoda dan anak buah kapal pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 687.516.339, serta kekurangan pembayaran upah sebesar Rp6.878.750.534 kepada petugas kebersihan dan kasur diatas kapal penumpang.

Pada tanggal 22 Oktober 2020, Perusahaan telah melunasi denda keterlambatan penyerahan pekerjaan pengadaan pakaian dinas harian nahkoda dan anak buah kapal kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

Pada tahun 2020, Perusahaan telah membayarkan secara bertahap kepada petugas kebersihan dan Kasur di atas kapal penumpang sebesar Rp 1.343.168.607.

18. LIABILITAS HAK GUNA

	2020	2019
Liabilitas Pokok Sewa Aset Hak Guna	1.365.347.826	-
Bagian lancar jatuh tempo 1 tahun	(751.248.337)	-
Liabilitas Pokok Sewa Aset Hak Guna Jangka Panjang	614.099.489	-

Liabilitas Kontrak merupakan perjanjian sewa Perusahaan yang terdiri dari sewa gedung dan alat angkut dimana memiliki jangka waktu sewa lebih dari 1 tahun sampai dengan tahun 2023.

19. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA

	2020	2019
Utang lain-lain	4.796.419.617	670.062.221
Liabilitas Kontrak	286.926.500	567.958.585
Jumlah	5.083.346.117	1.238.020.806

a. Liabilitas Kontrak

	2020	2019
Usaha Jasa	192.426.500	395.167.010
Uang titipan	75.000.000	75.000.000
Lainnya	19.500.000	97.791.575
Jumlah	286.926.500	567.958.585

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

19. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA (Lanjutan)

Liabilitas kontrak merupakan pendapatan usaha jasa uang muka diterima dari pelanggan untuk kegiatan Kapal PINISI.

Uang titipan merupakan dana penjualan aktiva cabang Surabaya ke kantor pusat PT. Pelita Indonesia Djaya.

Pendapatan diterima dimuka lainnya merupakan penerimaan yang belum teridentifikasi.

b. Utang lain-lain

	2020	2019
Utang Sewa Pembiayaan	3.537.422.000	-
Uang Jaminan	328.115.400	328.115.400
Uang Titipan	184.336.800	146.446.800
BPJS Ketenagakerjaan	35.858.935	27.652
Klaim Asuransi/THT Pegawai	25.580.514	25.580.514
Utang Biaya Pegawai	19.510.256	-
Iuran SP PELNI	1.845.000	1.647.000
Deviden	1.069.712	137.600.459
Koperasi	-	3.111.334
Iuran YKPP	-	3.342.087
Lainnya	662.681.000	24.190.975
Jumlah	4.796.419.617	670.062.221

Uang jaminan tersebut berasal dari PT Wahana Ria Cakrawala atas uang jaminan pekerjaan pembuatan Mini Theater sedangkan uang titipan merupakan bagian bagi hasil kepada pihak ketiga yang belum diambil.

Utang sewa pembiayaan merupakan pokok sewa pembiayaan 6 unit Toyota Innova Venturer 2.0 Q A/T. 15 Mitsubitsi Expander 1.5 GLS-L dan 1 unit Toyota Camry New Hybrid 2.5 L A/T.

20. LIABILITAS JANGKA PANJANG

	2020	2019
Sewa guna usaha kendaraan bermotor	2.074.480.400	5.276.327.000
Utang Bank yang Jatuh Tempo	4.195.797.344	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	6.270.277.744	5.276.327.000
Bagian lancar jatuh tempo 1 tahun	(4.195.797.343)	(3.414.540.000)
Bagian jatuh tempo lebih dari 1 tahun	2.074.480.401	1.861.787.000

Utang sewa guna usaha per tanggal 31 Desember 2020 tersebut terdiri dari pembelian kendaraan bermotor/alat angkut yang akan disewakan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan kepada pihak ketiga lainnya. (lihat catatan 13).

Utang Bank yang Jatuh Tempo adalah utang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 5.000.000.000 dengan nomor surat RCO.JKB/0045/KMK/2020 dengan Tingkat suku bunga: 8.50% per tahun. Jangka Waktu Kredit 1 oktober 2020 s/d 30 September 2021 (12 bulan). Tujuan Penggunaan Kredit yaitu Pembiayaan kebutuhan produktif usaha *food and beverages, outshourching service, car rent, Wisata, information technology service management (ITSM), maintenance service, crewing* dan usaha penunjang lainnya untuk pelayani PT PELNI (Persero). Perusahaan menyerahkan agunan kepada Bank Sebidang tanah SHGB rumah toko 4 (empat) lantai di kompleks Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok Q No. 5 Jl. Letjen suprapto. kel sumur batu kec kemayoran jakarta pusat.

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

21. UTANG PIHAK BERELASI

Saldo utang kepada PT PELNI (Persero) per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp16.093.935.042 dan Rp26.691.567.878.

Utang kepada PT PELNI (Persero) per tanggal 31 Desember 2020 tersebut terkait dengan pembayaran iuran kesehatan YKPP. Iuran dana pensiun dan iuran BPJS Kesehatan yang diberikan kepada karyawan PT PELNI (Persero) yang diperbantukan.

Sedangkan kewajiban kepada PT PELNI (Persero) per tanggal 31 Desember 2019 tersebut merupakan utang yang berasal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) terhadap pengadaan bahan baku makanan di kapal dan biaya makan petugas di kapal PELNI.

Pengembalian dana yang berasal dari pengadaan bahan baku makanan di kapal dan biaya makan petugas di kapal PELNI terkait dengan temuan BPK-RI tersebut sebesar Rp29.117.190.589. Selama tahun buku 2019 telah dibayarkan melalui PT PELNI (Persero) sebesar Rp2.425.622.711.

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Perusahaan memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawannya sesuai dengan imbalan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/ 2003). Tabel berikut menyajikan komponen dari beban imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan untuk liabilitas diestimasi imbalan kerja yang dihitung oleh aktuaris independen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Berdasarkan laporannya No. 554/PSAK-TBA.AN/III/-2021. Tanggal 18 Maret 2021 dan No. 053/PASPID/ LAP/II/20. Tanggal 20 Januari 2020. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan paska kerja untuk periode Januari sampai dengan Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebanyak 57 orang dan 59 orang Perhitungan aktuaris menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Jumlah karyawan (orang)	57	59
Usia Pensiun	56 Tahun	56 Tahun
Tingkat Kematian	Indonesia - III (2011)	Indonesia - III (2011)
Tingkat Cacat	0.02% per tahun	0.02% per tahun
Tingkat Pengunduran Diri:		
- Usia 18 - 30 Tahun	5% per tahun	5% per tahun
- Usia 31 - 40 Tahun	4% per tahun	4% per tahun
- Usia 41 - 44 Tahun	3% per tahun	3% per tahun
- Usia 45 - 52 Tahun	1% per tahun	1% per tahun
- Usia 53 - 55 Tahun	0% per tahun	0% per tahun
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Kenaikan Gaji (Upah)	5% per tahun	5% per tahun
Tingkat Bunga Kewajiban	7.11% per tahun	7.44% per tahun
Tingkat Bunga pada Aset	0% per tahun	0% per tahun

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Jumlah yang diakui pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
a. Beban imbalan paska kerja		
Biaya Jasa Kini	393.553.463	426.209.024
Beban Bunga Bersih dari Liabilitas Manfaat Pasti (Keuntungan) Kerugian atas Kurtailmen & Setlemen	375.009.093	316.775.161
	-	(222.142.545)
Jumlah	768.562.556	520.841.640
b. Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan		
Nilai Kini Kewajiban Awal	5.040.444.803	3.493.281.282
Biaya Bunga	375.009.093	316.775.161
Biaya Jasa Kini	393.553.463	426.209.024
(Laba) Rugi Aktuarial pada Kewajiban	-	-
Perkiraan pembayaran manfaat (Keuntungan)/kerugian aktuarial-perubahan asumsi (Keuntungan)/kerugian aktuarial-pada kewajiban	-	(53.415.906)
	-	233.229.235
	(37.810.910)	624.366.007
Nilai kewajiban pada akhir periode	5.771.196.449	5.040.444.803
c. Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan		
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Nilai Kini Kewajiban Awal	5.771.196.449	5.040.444.803
Nilai Wajar Aset	-	-
Status Pendanaan	5.771.196.449	5.040.444.803
Kewajiban Transisi yang Belum Diakui	-	-
Biaya Jasa Lalu yang Belum Diakui	-	-
(Laba) Rugi Aktuarial yang Belum Diakui	-	-
Nilai kewajiban pada akhir periode	5.771.196.449	5.040.444.803
d. Rekonsiliasi Biaya Dibayar Dimuka (Cadangan) Kewajiban Imbalan Paska Kerja		
Kekayaan (kewajiban) pada awal periode	5.040.444.803	3.493.281.282
Pembayaran (pendapatan) manfaat	-	-
Beban tahun berjalan	768.562.556	520.841.641
Rugi (Laba) komprehensif tahun berjalan	(37.810.910)	1.026.321.880
Nilai kewajiban pada akhir periode	5.771.196.449	5.040.444.803

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

23. MODAL SAHAM

Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh	Presentase Kepemilikan	Jumlah Nilai Saham
PT Pelni (Persero)	2.000	99.50%	2.000.000.000
YKPP	10	0.50%	10.000.000
Jumlah	2.010	100.00%	2.010.000.000

Modal saham yang disetor ke Entitas merupakan 99.5% penyertaan PT Pelayaran Nasional Indonesia dan 0.5% penyertaan Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni sesuai dengan Akta Notaris Raden Mas Soediarso Soenarto, SH No. 7 tanggal 10 Juni 2009 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.AHU-43800.AH.01.02 Tahun 2009 Tanggal 4 September 2009.

24. CADANGAN UMUM

	2020	2019
Saldo awal	81.732.995.380	70.733.995.291
Dividen	(8.866.192.876)	-
Penambahan Cadangan Umum	59.107.952.507	10.999.000.089
Saldo akhir	131.974.755.011	81.732.995.380

25. SALDO LABA

	2020	2019*)
Saldo awal	57.279.364.340	46.055.458.282
Cadangan umum	(59.107.952.507)	(40.116.190.678)
Dividen	-	(201.588.898)
Pengaruh disajikan Kembali	-	(7.566.266.873)
Penyesuaian PSAK	(114.106.393)	-
Laba tahun berjalan	22.468.147.443	59.107.952.507
Saldo akhir	20.525.452.883	57.279.364.340

Berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Pelita Indonesia Djaya yang dibuat dihadapan Notaris Kiki Hertanto, SH No. 3 tanggal 6 Juli 2020. Perusahaan menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan sebesar Rp59.107.952.507 sebagai dividen untuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp8.866.192.876 dan kepada YKPP sebesar Rp1.069.683. Bagian dividen untuk PT Pelni seluruhnya dibentuk sebagai cadangan.

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

25. SALDO LABA (Lanjutan)

Berdasarkan surat dari PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. 09.24/03/S-B/090/2019. Tanggal 24 September 2019 perihal tanggapan temuan audit BPK-RI atas biaya makan penumpang kapal PELNI (Persero) periode tahun buku 2018. Seluruh cadangan yang dibentuk sebagaimana alinea diatas sebesar Rp40.116.190.678 tersebut dipergunakan untuk mengembalikan biaya makan penumpang sebesar Rp29.117.190.589 (diciil selama 24 bulan) sedangkan sisanya sebesar Rp10.999.000.089 dibentuk sebagai cadangan umum.

Terkait dengan pencatatan penggunaan dana cadangan umum untuk memenuhi kewajiban mengembalikan dana kepada Pemerintah melalui PT Pelni (Persero). PT Pelita Indonesia Djaya mengacu pada Akta pendirian No. 53. tanggal 29 September 1969 yang dibuat dihadapan Notaris Djojo Muljadi SH. khususnya Dana Cadangan pasal 19 ayat 1.

26. KOMPONEN EKUITAS LAIN

	2020	2019
Saldo awal	(1.436.489.836)	(666.748.426)
Laba (rugi) aktuarial – neto	29.492.510	(769.741.410)
Saldo akhir	(1.406.997.326)	(1.436.489.836)

27. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

	2020	2019
Saldo awal		
Modal disetor	150.000.000	5.000.000
Bagian laba tahun lalu	119.156.343	99.927.234
Penyesuaian PSAK 71	(1.480.436)	-
Dividen	(1.069.712)	-
Bagian laba tahun berjalan	(44.090.683)	14.229.109
Modal disetor tahun berjalan	-	150.000.000
Jumlah	222.515.512	269.156.343

Rincian kepentingan non pengendali adalah sebagai berikut:

	2020	2019
PT Pelita Bandar Nasional		
Modal disetor	5.000.000	5.000.000
Akumulasi jumlah bagian laba	115.988.473	110.624.351
Jumlah	120.988.473	115.624.351

PT Pialang Asuransi Nasional Indonesia Jaya

Modal disetor	150.000.000	150.000.000
Akumulasi jumlah bagian laba	(48.472.961)	3.531.992
Jumlah	101.527.039	153.531.992

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

28. PENDAPATAN USAHA

	2020	2019
Bahan Permakanan	177.182.527.721	276.612.208.533
<i>Cleaning Services</i> Kapal dan Gedung	51.595.445.541	61.732.135.194
Jasa <i>Maintenance</i>	27.535.595.329	51.929.303.094
Pendapatan Non Jasa Pelayanan Kapal Lainnya	22.144.900.306	3.498.153.472
Sistem Komunikasi Kapal (Siskomkap)	20.258.835.501	22.141.019.910
Pengamanan/Denkawal	20.603.543.765	16.679.164.902
<i>Frontliner & Manage Service</i>	17.464.233.416	15.884.624.874
Penyewaan Kendaraan	9.150.306.457	7.995.390.528
Hiburan Band	3.116.010.733	9.796.686.943
<i>House Keeping/Kasur</i>	4.301.595.162	9.797.884.058
Janitor	3.068.339.476	2.780.590.244
Usaha Pelabuhan Muat (OPP)/Pelabuhan Tujuan (OPT)	3.214.743.129	4.140.292.370
Wisma Tretes	106.055.396	173.427.506
Usaha Sampingan Lainnya	8.468.453.217	2.686.758.434
Jumlah	368.210.585.149	485.847.640.062

29. BEBAN USAHA POKOK

	2020	2019
Bahan Permakanan	146.348.615.175	214.045.195.508
<i>Cleaning Services</i> Kapal dan Gedung	35.002.136.893	35.863.331.264
Jasa <i>Maintenance</i>	24.079.040.779	44.094.577.582
Sistem Komunikasi Kapal (Siskomkap)	20.532.709.644	21.078.220.443
Pengamanan/Denkawal	15.015.410.907	13.593.912.430
<i>Frontliner & Manage Service</i>	14.642.525.663	12.943.333.288
Beban Non Jasa Pelayanan Kapal Lainnya	17.980.512.552	2.481.004.967
Penyewaan Kendaraan	4.779.014.847	5.409.500.708
<i>House Keeping/Kasur</i>	3.899.341.064	4.177.903.007
Hiburan Band	1.557.015.546	6.611.372.402
Janitor	1.888.186.472	1.637.723.264
Usaha Pelabuhan Muat (OPP)/Pelabuhan Tujuan (OPT)	1.216.028.195	1.916.735.122
Outsourcing Lainnya	894.398.654	356.266.763
Pengadaan <i>Cover</i> Kasur	973.198.035	3.422.729.469
Wisma Tretes	115.165.022	157.136.300
Usaha Sampingan Lainnya	6.933.439.477	617.439.908
Jumlah	295.856.738.925	368.406.382.425

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

30. BEBAN ADMINISTRASI DAN UMUM

	2020	2019
Pegawai Administrasi dan Umum	25.936.745.194	26.151.183.753
Penyusutan dan amortisasi	2.363.170.444	1.407.909.776
Gaji, Premi dan Tunjangan Direksi/Komisaris	2.955.217.199	6.592.060.217
Jamuan dan Sumbangan	1.978.119.892	1.026.636.504
Profesional dan Manajemen	1.392.526.847	1.883.122.671
Administrasi Kantor	1.352.994.911	1.813.634.477
Pemeliharaan	2.279.889.229	1.217.806.890
Pemasaran	760.734.402	1.144.956.441
Air dan Listrik	403.522.295	497.818.480
Komunikasi	92.930.201	219.721.254
Sewa	74.534.535	1.174.513.263
Lainnya	1.936.915.019	849.979.682
Jumlah	41.527.300.168	43.979.343.408

31. PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA

	2020	2019
Pendapatan Non Usaha:		
Pendapatan Jasa Giro	389.124.990	324.813.126
Pendapatan Bunga Deposito	83.883.969	65.674.067
Jasa Administrasi	111.641	51.000
Lainnya	115.376.562	316.186.291
	588.497.162	706.724.484
Beban Non Usaha:		
Beban Bunga	127.125.578	-
Beban Administrasi Bank	49.169.657	42.979.352
Beban Denda/Klaim	-	15.065.877
Kerugian Selisih Kurs	-	3.828.722
PPH pasal 4 ayat 2	-	12.088.108
Lainnya	1.145.249.803	2.318.328.715
	1.321.545.038	2.392.290.774
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Usaha Bersih	(733.047.876)	(1.685.566.290)

32. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

a. Sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak - pihak berelasi :

No.	Pihak-Pihak Berelasi	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi	Transaksi
1.	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Entitas Induk	Utang piutang, pendapatan dan beban
2.	PT Rumah Sakit Pelni	Entitas Asosiasi	Uang muka kerja usaha pemasangan aplikasi rental mobil dan jasa antar jemput pasien
3.	PT Pelita Bandar Nasional	Entitas Anak	Penyertaan utang piutang
4.	PT PANI	Entitas Anak	Penyertaan utang piutang

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 Tanggal 31 Desember 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

32. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (Lanjutan)

No.	Pihak-Pihak Berelasi	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi	Transaksi
1.	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Pendapatan Piutang usaha Pend. masih harus diterima Utang usaha jangka panjang	341.196.785.180 81.394.421.241 38.285.660.831 16.093.935.042
2.	PT Rumah Sakit Pelni	Pendapatan Pend. masih harus diterima	347.285.895
3.	PT Sarana Bandar Nasional	Pendapatan Piutang usaha Pend. Masih harus diterima	1.189.852.569 115.100.501 47.185.253

33. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN

Berikut ikhtisar nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan yang dinyatakan dalam laporan posisi keuangan:

	2020	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan:		
Kas dan Setara Kas	14.642.422.860	14.642.422.860
Piutang Usaha	103.898.544.299	103.898.544.299
Aset Keuangan Lancar Lainnya	3.682.565.256	3.682.565.256
Uang Muka	29.339.976.483	29.339.976.483
Aset Kontrak	51.142.180.437	51.142.180.437
Jumlah	202.705.689.335	202.705.689.335
Liabilitas Keuangan:		
Utang Usaha	12.472.580.297	12.472.580.297
Beban Akrua	70.080.967.066	70.080.967.066
Utang Pihak Berelasi	16.093.935.042	16.093.935.042
Liabilitas Kontrak Sewa Jangka Panjang	614.099.489	614.099.489
Bagian lancar dari Liabilitas Jangka Panjang	4.195.797.343	4.195.797.343
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	5.083.346.117	5.083.346.117
Jumlah	108.540.725.354	108.540.725.354

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
 Tanggal 31 Desember 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

33. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (Lanjutan)

	2019	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan:		
Kas dan Setara Kas	38.509.285.869	38.509.285.869
Piutang Usaha	75.161.303.574	75.161.303.574
Aset Keuangan Lancar Lainnya	1.298.430.767	1.298.430.767
Uang Muka	14.600.012.321	14.600.012.321
Aset Kontrak	66.704.157.072	66.704.157.072
Jumlah	196.273.189.603	196.273.189.603
	2019	
	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Liabilitas Keuangan:		
Utang Usaha	9.722.979.395	9.722.979.395
Beban Akrua	76.275.770.548	76.275.770.548
Utang Pihak Berelasi	26.691.567.878	26.691.567.878
Bagian lancar dari Liabilitas Jangka Panjang	3.414.540.000	3.414.540.000
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	1.238.020.806	1.238.020.806
Jumlah	117.342.878.627	117.342.878.627

34. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 DAN 73

Catatan ini menjelaskan dampak penerapan PSAK 71 Instrumen Keuangan dan PSAK 73 Leases.

Dampak terhadap laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	PSAK 71	PSAK 73	1 Jan 2020 Penyajian Kembali
Aset Lancar				
Kas dan Setara Kas	41.009.285.869	-	-	41.009.285.869
Piutang Usaha	75.161.303.574	(3.336.817)	-	75.157.966.757
Aset Keuangan Lancar Lainnya	1.355.730.767	-	-	1.355.730.767
Persediaan	5.084.216.218	-	-	5.084.216.218
Uang Muka	14.600.012.321	-	-	14.600.012.321
Pendapatan masih harus diterima	66.704.157.072	-	-	66.704.157.072
Pajak dibayar dimuka	25.910.010.616	-	-	25.910.010.616
Aset Tidak Lancar				
Aset Tetap	37.758.280.382	-	-	37.758.280.382
Aset Tak Berwujud	927.849.807	-	-	927.849.807
Aset Hak Guna	-	-	1.358.353.377	1.358.353.377
Aset Pajak Tangguhan	2.070.499.253	(15.550.700)	-	2.054.948.553
Jumlah Aset	270.581.345.879	(18.887.517)	1.358.353.377	271.920.811.739

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

34. DAMPAK PENERAPAN PSAK 71 DAN 73 (Lanjutan)

	31 Desember 2019	PSAK 71	PSAK 73	1 Jan 2020 Penyajian Kembali
Liabilitas				
Utang usaha	9.722.979.395	-	-	9.722.979.395
Beban Akrua	76.275.770.548	-	-	76.275.770.548
Utang Pajak	6.481.209.222	-	-	6.481.209.222
Liabilitas kontrak sewa jangka Pendek	-	-	1.455.052.690	1.455.052.690
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya	1.238.020.806	-	-	1.238.020.806
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya	3.414.540.000	-	-	3.414.540.000
Utang Pihak Berelasi	26.691.567.878	-	-	26.691.567.878
Liabilitas jangka panjang	1.861.787.000	-	-	1.861.787.000
Liabilitas imbalan kerja	5.040.444.803	-	-	5.040.444.803
Jumlah Liabilitas	130.726.319.652	-	1.455.052.690	132.181.372.342
Ekuitas				
Modal Saham - nilai nominal	2.010.000.000	-	-	2.010.000.000
Cadangan Umum	81.732.995.380	-	-	81.732.995.380
Saldo Laba	57.279.364.340	(18.887.517)	(96.699.313)	57.163.777.510
Komponen Ekuitas Lainnya	(1.436.489.836)	-	-	(1.436.489.836)
Kepentingan Non Pengendali	269.156.343	-	-	269.156.343
Jumlah Ekuitas	139.855.026.227	(18.887.517)	(96.699.313)	139.739.439.397
Jumlah Liabilitas & Ekuitas	270.581.345.879	(18.887.517)	1.358.353.377	271.920.811.739

35. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Pada tahun 2020, Manajemen Perusahaan telah memutuskan untuk menyajikan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang disebabkan oleh adanya koreksi dalam kegiatan penyerahan pengadaan pakaian dinas harian nahkoda dan anak buah kapal serta kekurangan pembayaran upah kepada petugas kebersihan dan Kasur di atas kapal penumpang. Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, manajemen telah menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2019, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

Laporan posisi keuangan

	31 Desember 2019		
	Sebelum penyajian kembali	Penyesuaian	Setelah penyajian kembali
Liabilitas			
Beban Akrua	68.709.503.675	7.566.266.873	76.275.770.548
Jumlah	68.709.503.675	7.566.266.873	76.275.770.548
Ekuitas			
Saldo Laba	64.845.631.213	(7.566.266.873)	57.279.364.340
Jumlah	64.845.631.213	(7.566.266.873)	57.279.364.340

Laporan Laba Rugi dan Komperhensif Lainnya

	31 Desember 2019		
	Sebelum penyajian kembali	Penyesuaian	Setelah penyajian kembali
Beban Umum dan Administrasi	(36.413.076.535)	(7.566.266.873)	(43.979.343.408)
Jumlah	(36.413.076.535)	(7.566.266.873)	(43.979.343.408)

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

36. REKLASIFIKASI LAPORAN KEUANGAN

Perusahaan telah mereklasifikasi akun yang tercatat dalam laporan Posisi Keuangan, terkait jumlah kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

	31 Desember 2019		
	Penyajian terdahulu	Reklasifikasi	Setelah reklasifikasi
Laporan Posisi Keuangan			
Kas dan Setara Kas	41.009.285.869	(2.500.000.000)	38.509.285.869
Aset Keuangan Lancar Lainnya	1.355.730.767	(57.300.000)	1.298.430.767
Aset Tidak Lancar Lainnya	-	2.557.300.000	2.557.300.000

37. KEJADIAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Tidak ada peristiwa/kejadian penting setelah tanggal laporan posisi keuangan yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

- a. Pada bulan November 2020 Undang-Undang No.11/2020 (“UU Cipta Kerja”) tentang cipta kerja mulai berlaku Pada tanggal otorisasi laporan keuangan ini. Pemerintah secara resmi mengesahkan 51 peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja. Perusahaan masih melakukan penilaian atas potensi dampak dari peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja terhadap laporan keuangan.

b. STANDAR DAN INTERPRETASI AKUNTANSI BARU

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan yang baru dan penyempurnaan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (“PSAK”) standar akuntansi tersebut akan berlaku efektif atau berlaku pada laporan keuangan Perseroan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021:

- Amandemen PSAK No. 1 “Penyajian Laporan Keuangan”;
- Amandemen PSAK No. 22 “Kombinasi Bisnis” dan
- PSAK No. 112 “Akuntansi Wakaf”.

38. KONDISI EKONOMI

Omnibus Law

Omnibus law merupakan RUU komprehensif yang akan mengatur banyak ketentuan di berbagai sektor industri menjadi satu undang-undang. Ia berupaya memperkuat ekonomi dengan meningkatkan daya saing. Menciptakan lapangan kerja dan mempermudah berbisnis di Indonesia.

Pemerintah menyadari bahwa untuk memenuhi visi tersebut harus mengatasi masalah overregulasi di Indonesia.

Omnibus law dirancang untuk membantu memenuhi tujuan ini. Sebagian dengan menyederhanakan lingkungan peraturan negara yang kompleks terkadang berlebihan. Undang-undang tersebut akan meringankan pembatasan di 11 bidang penting. Termasuk undang-undang ketenagakerjaan, penanaman modal, perizinan usaha, pajak perusahaan dan pembebasan tanah. Tak perlu dikatakan langkah-langkah ini jika diterapkan akan membuat Indonesia menjadi tujuan yang jauh lebih menarik bagi bisnis dan investor asing.

Berikut adalah area yang terkena Omnibus Law antara lain:

1. Mempermudah perizinan usaha
2. Mengurangi pembatasan investasi asing
3. Meringankan hukum ketenagakerjaan
4. Memperlancar peraturan perpajakan perusahaan

Sampai dengan tanggal laporan keuangan ini. Grup masih dalam proses menilai dampak Omnibus Law tersebut dalam laporan keuangannya.

PT PELITA INDONESIA DJAYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

38. KONDISI EKONOMI (Lanjutan)

COVID-19

Perlambatan ekonomi global dan dampak negatif di pasar keuangan utama yang disebabkan oleh penyebaran pandemi virus Covid-19, telah mengakibatkan dampak yang merugikan antara lain merugikan pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan, operasi bisnis, yang dapat berlanjut dan mengakibatkan keuangan dan operasi Perusahaan yang tidak menguntungkan. Kemampuan Indonesia dalam meminimalisir dampak perlambatan ekonomi global terhadap perekonomian negara sebagian besar bergantung pada efektifitas kebijakan dan tindakan respon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan penyebaran virus Covid-19. Sebagaimana serta fiskal dan langkah-langkah lain yang sedang diambil oleh otoritas Pemerintah. Efektivitas kebijakan termasuk tindakan dan peristiwa berada di luar kendali Perusahaan.

Per 31 Desember 2020, Perusahaan memang mengalami dampak yang signifikan dari pandemi COVID-19 sebagai berikut:

1. Menurunnya dalam Pendapatan Usaha terkait kegiatan supply diatas kapal
2. Biaya Pegawai yang tetap ketika adanya pengurangan waktu pekerjaan
3. Pembayaran Piutang yang mengalami keterlambatan pembayaran

Manajemen Grup berkeyakinan bahwa pandemi COVID-19 saat ini berdampak signifikan terhadap kinerja bisnis Grup, namun terdapat ketidakpastian yang signifikan mengenai dampak kondisi saat ini terhadap bisnis Grup di masa yang akan datang.

39. TANGGAL PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen PT Pelita Indonesia Djaya bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan telah menyetujui laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 diterbitkan pada tanggal 10 Mei 2021.

PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN INDUK SAJA
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019*)	2018
Aset			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas	11.130.129.627	35.825.452.222	24.907.653.431
Piutang Usaha	99.888.791.188	71.345.817.484	58.379.151.570
Aset Keuangan Lancar			
Lainnya	2.989.787.322	1.790.430.768	491.062.120
Persediaan	3.552.398.632	5.084.216.218	-
Uang Muka	27.935.831.314	13.489.819.950	4.624.718.861
Aset Kontrak	52.251.825.659	67.148.081.790	37.358.779.371
Pajak Dibayar Dimuka	11.125.571.482	25.910.010.616	19.412.560.810
Penyertaan	7.857.448.894	8.582.701.026	5.141.434.426
Jumlah Aset Lancar	216.731.784.118	229.176.530.074	150.315.360.589
Aset Tidak Lancar			
Aset Tetap	46.852.585.200	37.228.797.392	24.623.824.509
Aset Hak Guna	1.358.353.377	-	-
Aset Tak Berwujud	960.180.043	927.849.807	778.072.663
Aset Pajak Tangguhan	2.131.158.232	2.070.499.253	1.547.723.220
Jumlah Aset Tidak Lancar	51.302.276.852	40.227.146.452	26.949.620.392
Jumlah Aset	268.034.060.970	269.403.676.526	177.264.980.981

*) Disajikan Kembali (Catatan 35)

PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN INDUK SAJA
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019*)	2018
Liabilitas dan Ekuitas			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha	11.447.727.771	9.294.661.198	16.574.275.420
Utang Pajak	589.101.827	6.477.931.412	1.968.911.631
Beban Akrua	69.621.331.120	76.130.770.548	28.117.834.896
Liabilitas Hak Guna Sewa Jangka Pendek	751.248.337	-	-
Liabilitas keuangan Jangka pendek lainnya	3.824.348.500	906.103.803	1.124.735.259
Bagian Lancar Atas Liabilitas Jangka Panjang	4.195.797.343	3.414.540.000	3.414.540.000
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	90.429.554.898	96.224.006.961	51.200.297.206
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Pihak Berelasi	16.041.519.167	26.691.567.878	1.993.116.744
Liabilitas Hak Guna Jangka Panjang	614.099.489	-	-
Liabilitas Jangka Panjang	2.074.480.400	1.861.787.000	2.445.580.600
Liabilitas Imbalan Kerja	5.771.196.449	5.040.444.803	3.493.281.283
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	24.501.295.505	33.593.799.681	7.931.978.627
Jumlah Liabilitas	114.930.850.403	129.817.806.641	59.132.275.833
Ekuitas			
Modal Saham <i>Modal dasar 2.010 saham ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp.1.000.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.</i>	2.010.000.000	2.010.000.000	2.010.000.000
Cadangan Umum	131.974.755.021	81.732.995.380	70.733.995.291
Saldo Laba	20.525.452.872	57.279.364.340	46.055.458.283
Komponen Ekuitas Lainnya	(1.406.997.326)	(1.436.489.836)	(666.748.426)
Jumlah Ekuitas	153.103.210.567	139.585.869.884	118.132.705.148
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	268.034.060.970	269.403.676.526	177.264.980.981

*) Disajikan Kembali (Catatan 35)

PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPERHENSIF LAIN INDUK SAJA
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019*)	2018
Pendapatan Usaha	364.538.718.554	480.787.333.312	380.425.057.778
Beban Pokok Usaha	(294.337.698.953)	(366.188.667.059)	(302.515.005.878)
LABA KOTOR	70.201.019.601	114.598.666.253	77.910.051.900
Beban Umum dan Administrasi	(38.616.716.734)	(41.676.191.275)	(24.693.443.289)
LABA USAHA	31.584.302.867	72.922.474.978	53.216.608.611
Pendapatan (Beban) Non Usaha – Bersih	(1.462.787.721)	(1.161.906.157)	733.970.360
LABA SEBELUM PAJAK	30.121.515.146	71.760.568.821	53.950.578.971
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan:			
Kini	(7.737.895.783)	(20.485.078.750)	(13.930.479.250)
Tangguhan	84.528.079	266.195.563	297.679.855
Jumlah	(7.653.367.704)	(20.218.883.187)	(13.632.799.395)
LABA TAHUN BERJALAN	22.468.147.442	51.541.685.634	40.317.779.576
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pengukuran Kembali Imbalan Kerja :			
Keuntungan (Kerugian) aktuarial	37.810.910	(1.026.321.880)	53.210.646
Efek pajak keuntungan (kerugian) terkait	(8.318.400)	256.580.470	-
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	22.497.639.952	50.771.944.224	40.370.990.222

*)Disajikan Kembali (Catatan 35)

PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN ARUS KAS INDUK SAJA
Tanggal 31 Desember 2020
(Dinyatakan dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2020	2019
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan kas dari pelanggan	349.964.457.449	438.031.364.979
Pembayaran kas kepada pemasok	(238.590.123.912)	(363.744.000.620)
Pembayaran biaya operasional	(101.617.322.092)	(35.707.978.818)
Pengeluaran lain-lain	(801.171.013)	(2.365.055.889)
Pembayaran Pajak	(13.384.738.093)	(1.988.430.025)
Penerimaan lain-lain	(925.584.418)	1.203.149.732
Jumlah Arus Kas Bersih Diperoleh (Digunakan) dari Aktivitas Operasi	(5.354.482.079)	35.429.049.359
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Penambahan aset tetap	(14.421.345.271)	(18.129.829.879)
Penambahan aset tak berwujud	(248.000.000)	(312.942.480)
Jumlah Arus Kas bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(14.669.345.271)	(18.442.772.359)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Penerimaan Utang Bank	5.000.000.000	-
Penyertaan	-	(3.441.266.600)
Penerimaan (Pembayaran) dari dan ke Pemegang Saham	-	26.691.567.878
Pembentukan Cadangan	-	(29.117.190.589)
Pembayaran Utang Bank	(804.202.657)	-
Pembayaran Dividen	(8.867.292.588)	(201.588.898)
Jumlah Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(4.671.495.245)	(6.068.478.209)
Kenaikan (penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(24.695.322.595)	10.917.798.792
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	35.825.452.222	24.907.653.431
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	11.130.129.627	35.825.452.222

5

PT PELITA INDONESIA DJAYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS INDUK SAJA
Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019
(Dinyatakan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Laba (Rugi) Dicadangkan	Laba (Rugi) Belum Dicadangkan	Komponen Ekuitas Lainnya	Jumlah Ekuitas
Saldo per 31 Desember 2018	2.010.000.000	70.733.995.291	46.055.458.283	(666.748.426)	118.132.705.148
Cadangan Umum	-	10.999.000.089	(10.999.000.089)	-	-
Penggunaan Cadangan Umum	-	-	(29.117.190.589)	-	(29.117.190.589)
Dividen	-	-	(201.588.898)	-	(201.588.898)
Laba Tahun Berjalan	-	-	51.541.685.634	-	51.541.685.634
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	-	-	-	(769.741.410)	(769.741.410)
Saldo per 31 Desember 2019 (Disajikan kembali)	2.010.000.000	81.732.995.380	57.279.364.340	(1.436.489.836)	139.585.869.884
Penyesuaian PSAK 71	-	-	(17.407.080)	-	(17.407.080)
Penyesuaian PSAK 73	-	-	(96.699.313)	-	(96.699.313)
Saldo per 1 Januari 2020	2.010.000.000	81.732.995.380	57.165.257.947	(1.436.489.836)	139.471.763.491
Cadangan Umum	-	59.107.952.517	(59.107.952.517)	-	-
Dividen	-	(8.866.192.876)	-	-	(8.866.192.876)
Laba (rugi) Tahun Berjalan	-	-	22.468.147.442	-	22.468.147.442
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial	-	-	-	29.492.510	29.492.510
Saldo per 31 Desember 2020	2.010.000.000	131.974.755.021	20.525.452.872	(1.406.997.326)	153.103.210.567



PT PELITA INDONESIA DJAYA (PIDC)

Ruko Cempaka Mas Blok Q No.5
Jl. Letjen Suprpto, Kemayoran

☎ 021 42883720 - 42883740

📷 pelniservices

📘 PT. Pelita Indonesia Djaya

✉ corporate@pidc.co.id

pt.pidc@gmail.com

www.pelniservices.com